

**Prof. Dr. Rohmat Mulyana, M.Pd**  
**Dr. Rahmat Hidayat, MA**

# *Pendidikan* **KARAKTER** *Pada* **Perguruan Tinggi**

A photograph of four students in a library. A male student in a white shirt is on the left, gesturing towards an open book. Three female students, two in black hijabs and one in a white hijab, are smiling and looking at the book. The background shows bookshelves filled with books.

Kata Pengantar

**Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T**  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI



# Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi

Buku ini mengulas tentang pentingnya pendidikan karakter di perguruan tinggi sebagai bagian integral dari pengembangan mahasiswa, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan kepribadian yang unggul. Pendidikan karakter dianggap krusial untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi individu yang memiliki etika, tanggung jawab sosial, dan kemampuan untuk beradaptasi di dunia profesional.

Buku ini menjelaskan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi tidak hanya dapat mengatasi masalah moral dan sosial di kalangan mahasiswa, tetapi juga mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penulis menekankan bahwa karakter yang baik dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi tantangan kehidupan, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.

Buku ini terdiri dari berbagai bab yang membahas konsep dasar pendidikan karakter, prinsip-prinsip penerapannya di perguruan tinggi, serta berbagai metode dan strategi yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum dan kehidupan kampus. Selain itu, buku ini juga menyajikan contoh-contoh program dan kegiatan yang telah sukses dilaksanakan di perguruan tinggi untuk mengembangkan karakter mahasiswa, seperti pelatihan kepemimpinan, kegiatan sosial, dan pengembangan keterampilan emosional.

Pentingnya kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pihak kampus lainnya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang kuat juga menjadi sorotan utama dalam buku ini. Dengan demikian, buku ini menawarkan panduan praktis bagi para pengelola perguruan tinggi, dosen, dan pihak terkait lainnya dalam mengimplementasikan pendidikan karakter yang efektif untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pendidikan karakter dapat diterapkan di perguruan tinggi dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang lebih baik, siap menghadapi tantangan global dengan integritas dan etika yang kuat.



Jl. KL. Yos Sudarso No. 224 Medan  
Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi  
[undharpress@dharmawangsa.ac.id](mailto:undharpress@dharmawangsa.ac.id)  
Anggota IKAPI



9

ISBN 978-623-97199-7-5



786239

719975

**Prof. Dr. Rohmat Mulyana, M.Pd**  
**Dr. Rahmat Hidayat, MA**

# **Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi**

**Kata Pengantar**

**Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T**  
**Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI**

**Editor:**

**Muya Syaroh Iwanda Lubis, S.Sos, M.I.Kom**  
**M. Fuad Zaini Siregar, S.Pd, M.Pd**



**Copyright © 2025, Penerbit Undhar Press, Medan**

Judul Buku : **Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi**  
Penulis : Prof. Dr. Rohmat Mulyana, M.Pd  
Dr. Rahmat Hidayat, MA  
Editor : Muya Syaroh Iwanda Lubis, S.Sos, M.I.Kom  
M. Fuad Zaini Siregar, S.Pd, M.Pd  
Penerbit : Universitas Dharmawangsa Press  
(Undhar Press)  
Cetakan Pertama : Maret 2025  
Penata Letak : Mumtaz Advertising  
Desain Sampul : Mumtaz Advertising  
ISBN : 9786239719975

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian  
atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya  
tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.



## KATA PENGANTAR



Pendidikan karakter di perguruan tinggi telah menjadi perhatian penting dalam konteks pendidikan nasional. Di tengah dinamika global dan tantangan masyarakat modern, pembentukan karakter mahasiswa menjadi suatu keharusan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki integritas.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjelaskan dan mendalami konsep pendidikan karakter dalam konteks perguruan tinggi. Kami mengajak pembaca untuk memahami bahwa pendidikan karakter bukan sekadar tambahan dalam kurikulum, melainkan bagian integral dari pendidikan itu sendiri. Melalui pendekatan holistik, diharapkan mahamamahasiswa dapat mengembangkan sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif yang akan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan di masyarakat.

Kami menyadari bahwa implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak—dosen, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Dengan sinergi ini, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembentukan karakter yang kuat.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi para pendidik, mahasiswa, serta pihak-pihak terkait dalam upaya membangun karakter yang kokoh, sehingga lulusan perguruan tinggi tidak hanya siap menghadapi tantangan dunia kerja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita dalam mendidik generasi penerus bangsa.

**Medan, November 2024**  
**Penulis**

**Prof. Dr. Rohmat Mulyana, M.Pd**  
**Dr. Rahmat Hidayat, MA**



## **KATA PENGANTAR**

**Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T**  
**Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat terwujud dengan baik. Buku *Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi* ini merupakan kontribusi penting dalam upaya membangun pendidikan yang lebih holistik dan bermakna. Buku ini hadir sebagai bentuk pemikiran dan perenungan mendalam mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam hal akademik, tetapi juga memiliki karakter yang unggul dan integritas yang tinggi.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi menjadi sangat relevan di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dan penuh tantangan. Globalisasi yang membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan mengharuskan kita untuk mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Mahasiswa sebagai generasi muda, adalah agen perubahan yang akan membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki pondasi karakter yang kokoh agar mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan bijaksana.

Selama ini, banyak perguruan tinggi yang telah fokus pada pengembangan akademik mahasiswa, namun seringkali pendidikan karakter menjadi hal yang terabaikan. Padahal, karakter yang baik adalah kunci kesuksesan dalam kehidupan, baik di dunia pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sosial. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pendidikan karakter di perguruan tinggi dan bagaimana pendidikan karakter dapat diterapkan dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, saya merasa bahwa pendidikan karakter memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan agama, pendidikan karakter tidak hanya terbatas pada tindakan yang benar, tetapi juga mencakup sikap batin yang luhur, seperti kejujuran, kedamaian, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian,



pendidikan karakter bukan hanya soal bagaimana seseorang bertindak, tetapi juga tentang bagaimana mereka berpikir dan merasakan terhadap sesama.

Pendidikan karakter adalah landasan yang sangat penting bagi pengembangan individu. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kita tidak hanya membutuhkan individu yang cerdas, tetapi juga individu yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan penuh empati, berkomunikasi dengan baik, serta mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana. Pendidikan karakter adalah alat yang dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan ini, yang pada gilirannya akan memperkaya kehidupan sosial mereka.

Buku ini memaparkan berbagai konsep dasar pendidikan karakter dan menjelaskan dengan rinci bagaimana pendidikan karakter dapat diterapkan di perguruan tinggi. Salah satu sorotan penting dalam buku ini adalah penerapan pendidikan karakter yang holistik, di mana pendidikan karakter tidak hanya diajarkan melalui mata kuliah tertentu, tetapi juga melalui aktivitas sehari-hari di kampus, interaksi antar mahasiswa, dan hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Dengan pendekatan ini, pendidikan karakter akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan akademik di perguruan tinggi.

Penting untuk dipahami bahwa pendidikan karakter bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Ini adalah sebuah proses yang memerlukan waktu, kesabaran, dan konsistensi dalam penerapannya. Oleh karena itu, buku ini memberikan panduan praktis bagi pengelola perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa untuk menerapkan pendidikan karakter dalam kehidupan kampus secara berkelanjutan. Melalui buku ini, pembaca akan memperoleh wawasan tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya karakter yang baik di perguruan tinggi.

Buku ini juga membahas berbagai program pendidikan karakter yang telah diterapkan dengan sukses di perguruan tinggi di Indonesia. Berbagai contoh program ini dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lainnya yang ingin mengembangkan pendidikan karakter di kampus mereka. Sebagai contoh, program pengembangan diri, pelatihan kepemimpinan, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan di luar ruang kelas dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kehidupan kampus.

Dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi dan informasi, tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa juga semakin kompleks. Pendidikan karakter akan membantu mahasiswa untuk membangun



ketangguhan mental, mengelola emosi dengan bijak, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan akademik. Mahasiswa yang memiliki karakter yang kuat akan lebih mampu mengatasi tekanan dan menghadapi dinamika sosial serta perubahan zaman dengan penuh keyakinan.

Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak di perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan karakter. Tidak hanya dosen dan pengelola kampus, tetapi juga mahasiswa itu sendiri memiliki peran penting dalam membangun iklim kampus yang positif. Proses pendidikan karakter ini harus dilakukan secara sinergis agar nilai-nilai karakter dapat berkembang dan tertanam dalam diri mahasiswa.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi juga akan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan individu yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Di dunia profesional nanti, seorang lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk menguasai kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim, memahami kebutuhan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan sosialnya. Pendidikan karakter yang diberikan di kampus menjadi modal penting untuk mencapai hal tersebut.

Saya berharap, buku ini dapat memberikan wawasan baru bagi para pendidik, pengelola perguruan tinggi, dan mahasiswa dalam mengembangkan pendidikan karakter yang efektif di perguruan tinggi. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya kualitas pendidikan di perguruan tinggi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis. Setiap pembaca dapat mengadopsi ide-ide dan langkah-langkah yang tercantum dalam buku ini, untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter di lingkungan masing-masing.

Buku ini juga mengingatkan kita bahwa pendidikan karakter bukan hanya soal menanamkan nilai-nilai moral, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Dengan demikian, pendidikan karakter yang diterapkan di perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang luhur dan dapat membawa perubahan positif bagi bangsa.

Sebagai penutup, saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tinggi untuk tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter mahasiswa. Pembentukan karakter



adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak pada kehidupan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan karakter yang baik, kita dapat mencetak generasi muda yang tangguh, berbudi pekerti luhur, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kontribusi luar biasa melalui buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan pendidikan karakter di perguruan tinggi di Indonesia, dan menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik dan mahasiswa dalam membentuk pribadi yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2024

**Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T**  
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI





## DAFTAR ISI



<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR PROF. DR. MUHAMMAD ALI RAMDHANI</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	4
Referensi .....	5
<b>BAB II KONSEP DASAR PENDIDIKAN KARAKTER</b> .....	6
A. Definisi Karakter dan Pendidikan Karakter.....	6
B. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Pendidikan Karakter .....	7
C. Media Pendidikan Karakter .....	7
D. Sumber dan Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter .....	9
E. Urgensi Pendidikan Karakter.....	12
F. Kontribusi Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Karakter Bangsa .....	14
Referensi .....	15
<b>BAB III LANDASAN TEORITIS PENDIDIKAN KARAKTER</b> .....	17
A. Teori-teori Pendidikan Karakter.....	17
B. Nilai-nilai Universal dalam Pendidikan Karakter .....	19
C. Proses Pembentukan Karakter .....	20
Referensi .....	25
<b>BAB IV PENANAMAN KARAKTER PADA LEMBAGA PENDIDIKAN</b> .....	27
A. Pengertian Lembaga Pendidikan .....	27
B. Peran dan Fungsi Lembaga Pendidikan.....	28
C. Pentingnya Pendidikan Karakter pada Lembaga Pendidikan.....	30



D. Peran Dosen dalam Pendidikan Karakter .....	32
E. Keterlibatan Mahasiswa dalam Pendidikan Karakter .....	37
F. Tantangan dalam Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi.....	38
G. Evaluasi dan Penilaian Pendidikan Karakter .....	40
Referensi .....	42

**BAB V PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KURIKULUM PERGURUAN**

<b>TINGGI</b> .....	44
A. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum.....	44
B. Pembelajaran Berbasis Pengalaman .....	45
C. Pengembangan Soft Skills.....	47
D. Lingkungan Belajar yang Positif.....	48
E. Penilaian dan Evaluasi .....	50
F. Implementasi Mata Kuliah Pendidikan Karakter .....	52
Referensi .....	54

**BAB VI METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER**

<b>DI PERGURUAN TINGGI</b> .....	56
A. Makna Metode Pembelajaran .....	56
B. Pentingnya Metode Pembelajaran di Perguruan Tinggi.....	57
C. Langkah-Langkah Memilih Metode dan Teknik Pembelajaran yang Tepat di Perguruan Tinggi .....	58
D. Metode Pembelajaran dan Kemandirian serta Kreativitas Mahasiswa.....	60
E. Jenis-Jenis Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter.....	61
Referensi .....	64

**BAB VII PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM KELUARGA**.....

A. Pengertian, Peran dan Fungsi Keluarga.....	66
B. Pentingnya Pendidikan Karakter dimulai dari Keluarga.....	70
C. Metode Pendidikan Karakter dalam Keluarga.....	71
D. Sinergi antara Keluarga dan Perguruan Tinggi.....	72
E. Implikasi pendidikan karakter dalam keluarga terhadap karakter Mahasiswa.....	74
Referensi .....	75



<b>BAB VIII PEMBENTUKAN KARAKTER PADA MASYARAKAT</b> .....	77
A. Pengertian, Peran dan Fungsi Masyarakat.....	77
B. Transformasi Sosial Melalui Masyarakat Madani .....	80
C. Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Masyarakat.....	88
D. Metode Pendidikan Karakter dalam Masyarakat.....	89
E. Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Karakter .....	92
F. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat dan Pendidikan Karakter .....	93
G. Implikasi pendidikan karakter dalam masyarakat terhadap karakter Mahasiswa .....	99
Referensi .....	100
<b>BAB IX PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER</b> .....	104
A. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Karakter Dunia .....	104
B. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Karakter di Indonesia .....	105
C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Karakter pada Tingkat Perguruan Tinggi .....	107
D. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan .....	108
Referensi .....	109
<b>BAB X PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA DIGITAL</b> .....	111
A. Era Digital dan Implikasinya.....	111
B. Pendidikan Karakter dan Era Digital.....	118
C. Peran Teknologi dalam Pendidikan Karakter .....	124
Referensi .....	128
<b>BAB XI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: PENGUATAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DI PERGURUAN TINGGI</b> .....	131
A. Pengertian dan Ciri-Ciri Korupsi.....	131
B. Pengertian Pendidikan Antikorupsi .....	135
C. Nilai-Nilai Antikorupsi .....	137
D. Bentuk Dan Jenis-Jenis Korupsi .....	140
E. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Korupsi .....	143
F. Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Lintasan Sejarah .....	145
G. Perguruan Tinggi sebagai Agen anti korupsi .....	152
H. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi .....	155
Referensi .....	158



<b>BAB XII PENDIDIKAN ANTIINTOLERANSI</b> .....	162
A. Pengertian Toleransi dan Intoleransi .....	162
B. Tujuan dan Manfaat Toleransi .....	164
C. . Jenis-Jenis Toleransi.....	166
D. Ciri dan Contoh Sikap Toleransi dan Intoleransi dalam Kehidupan .....	167
E. Bahaya Sikap Intoleransi dalam Bernegara.....	167
F. Peran Sikap Toleransi dalam Pembangunan.....	168
Referensi .....	169
<b>BAB XIII PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL</b> .....	171
A. Pengertian Pendidikan Anti Kekerasan.....	171
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Pendidikan.....	172
C. Nilai-Nilai Pendidikan Anti Kekerasan.....	173
D. Konsep Pendidikan Anti Kekerasan .....	174
E. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Perempuan.....	175
Referensi .....	175
<b>BAB XIV PENDIDIKAN ANTI PERUNDUNGAN</b> .....	177
A. Pengertian Perundungan ( <i>Bullying</i> ) .....	177
B. Bentuk-Bentuk Perundungan.....	178
C. Penyebab Terjadinya Perundungan .....	179
D. Karakteristik Pelaku Perundungan.....	180
E. Karakteristik Korban Perundungan .....	181
F. Strategi dalam Pencegahan Perundungan.....	182
Referensi .....	183
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	184
A. Kesimpulan .....	184
B. Rekomendasi untuk Pengembangan Pendidikan Karakter .....	185
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	187
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	202



# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Pendidikan karakter di perguruan tinggi semakin diakui sebagai aspek vital dalam mencetak generasi masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, mahamamahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan moral dan etika. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademis, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Menurut UNESCO (2014), pendidikan karakter berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan tinggi telah menjadi fokus kebijakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggarisbawahi pentingnya pengembangan karakter sebagai bagian dari kurikulum nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Integrasi nilai-nilai karakter dalam pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial.

Proses pembelajaran di perguruan tinggi harus mencerminkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk dosen, mahasiswa, dan orang tua (Lickona, 1991). Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan strategi yang inovatif dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kurikulum mereka.



Selanjutnya, penelitian ini akan membahas berbagai metode dan pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi. Dengan mengadopsi berbagai strategi, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman langsung, diharapkan mahamamahasiswa dapat lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam konteks nyata. Hal ini sejalan dengan pandangan Schwartz dan Sharpe (2006) yang menyatakan bahwa pengalaman belajar yang kontekstual akan lebih mendalam dan bermakna.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pendidik, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam usaha membangun pendidikan karakter yang efektif di perguruan tinggi. Dengan demikian, diharapkan lulusan perdosenan tinggi tidak hanya menjadi individu yang terampil, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

## **B. Tujuan dan Ruang Lingkup**

Pendidikan karakter di perguruan tinggi memiliki tujuan yang jelas dan terfokus: membentuk individu yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, pendidikan karakter menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan nilai-nilai yang relevan untuk kehidupan di masyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2013), pendidikan karakter bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, dan mampu bersaing di tingkat global.

Ruang lingkup buku ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Pertama, buku ini akan membahas konsep dasar pendidikan karakter, yang meliputi pengertian, prinsip, dan pentingnya karakter dalam konteks pendidikan tinggi. Dalam hal ini, penekanan pada nilai-nilai universal seperti kejujuran, disiplin, dan kerja sama menjadi krusial. Hal ini sejalan dengan pendapat Lickona (1991) yang menyatakan bahwa karakter terdiri dari tiga komponen utama: pengetahuan, keterampilan, dan niat.

Selanjutnya, buku ini juga akan membahas metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan karakter. Berbagai metode, termasuk pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan pengalaman langsung, akan dianalisis untuk menunjukkan bagaimana pendekatan-pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai karakter. Menurut Schwartz dan Sharpe (2006), pengalaman belajar yang



kontekstual dan interaktif cenderung lebih efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter pada mahamamahasiswa.

Buku ini juga akan menyoroti peran dosen sebagai agen perubahan dalam pendidikan karakter. Dosen tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan yang mampu menginspirasi mahamamahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, penting bagi dosen untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendidikan karakter agar dapat menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan relevan bagi mahamamahasiswa (Nasution, 2012).

Lebih lanjut, pembahasan mengenai keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan karakter juga akan menjadi fokus utama. Partisipasi aktif mahamamahasiswa dalam organisasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan layanan masyarakat dapat memperkuat proses pembelajaran karakter. Dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan nyata, mereka dapat mengembangkan empati, kerja sama, dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi, sesuai dengan prinsip pendidikan karakter yang dinyatakan oleh UNESCO (2014).

Tidak kalah penting, buku ini akan membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan dari pihak manajemen, resistensi dari mahamamahasiswa, dan tantangan budaya dapat memengaruhi efektivitas program pendidikan karakter. Oleh karena itu, solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan ini juga akan dikaji agar implementasi pendidikan karakter dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pendidik, mahamamahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam usaha membangun pendidikan karakter yang efektif di perguruan tinggi. Dengan memahami pentingnya pendidikan karakter dan cara-cara implementasinya, diharapkan lulusan per dosenan tinggi dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi agen perubahan di era global yang penuh tantangan ini.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi.



### **C. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian dalam penyusunan buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan karakter di perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan adalah gabungan antara studi literatur dan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid dan relevan. Dengan mengkaji berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan, penulis berusaha menghadirkan perspektif yang luas mengenai penerapan pendidikan karakter dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia.

Studi literatur menjadi langkah awal yang penting, di mana penulis menelusuri berbagai teori dan praktik yang ada di bidang pendidikan karakter. Sebagaimana dinyatakan oleh Lickona (1991), pemahaman yang mendalam mengenai komponen-komponen karakter—pengetahuan, keterampilan, dan niat—merupakan dasar untuk mengembangkan program pendidikan karakter yang efektif. Dengan merujuk pada literatur yang ada, penulis dapat membangun kerangka konseptual yang solid untuk pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris terkait implementasi pendidikan karakter di beberapa perdosenan tinggi. Wawancara dengan dosen, mahasiswa, dan pengelola institusi menjadi bagian penting dari metodologi ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2014) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial dan budaya yang terjadi dalam konteks pendidikan.

Dalam proses pengumpulan data, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap pendidikan karakter yang diterapkan di kampus mereka. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif mengenai efektivitas program pendidikan karakter. Menurut Sugiyono (2013), penggunaan kuesioner dalam penelitian sosial dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sikap dan pendapat responden.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggali tema-tema yang muncul dari wawancara dan hasil kuesioner. Penulis berusaha untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang diteliti, yang kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Pendekatan ini membantu penulis untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada data yang valid, sehingga kontribusi buku ini dapat lebih berarti bagi pengembangan pendidikan karakter di perdosenan tinggi.



Akhirnya, metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengembangkan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Dengan dasar yang kuat dan data yang komprehensif, buku ini bertujuan untuk menjadi sumber referensi bagi para pendidik, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam usaha membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter mulia.

### **Referensi**

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Pendidikan Karakter*.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Schwartz, M. S., & Sharpe, D. (2006). *Teaching Character Education Through Literature*. New York: Routledge.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNESCO. (2014). *Educating for Peace and Sustainability*. Paris: UNESCO Publishing.



# BAB II

## KONSEP DASAR PENDIDIKAN KARAKTER



### A. Definisi Karakter dan Pendidikan Karakter

Karakter sering diartikan sebagai sekumpulan nilai, sifat, dan perilaku yang membentuk identitas seseorang. Menurut Lickona (1991), karakter adalah kualitas moral yang menentukan bagaimana seseorang bertindak dalam situasi tertentu. Lickona menekankan bahwa karakter terdiri dari tiga elemen: pengetahuan tentang apa yang baik, keterampilan untuk berperilaku baik, dan keinginan untuk berbuat baik.

Sementara itu, Seligman (2002) dalam bukunya *"Authentic Happiness"* mendefinisikan karakter sebagai kebiasaan atau pola perilaku yang mencerminkan nilai-nilai seseorang. Ia mengemukakan bahwa karakter bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang siapa kita sebagai individu. Oleh karena itu, karakter berhubungan erat dengan integritas dan moralitas.

Dalam konteks pendidikan, Peterson dan Seligman (2004) memperkenalkan konsep *"Character Strengths and Virtues"* yang mengkategorikan karakter menjadi enam virtud: kebijaksanaan, keberanian, kemanusiaan, keadilan, temperance (pengendalian diri), dan spiritualitas. Mereka berargumen bahwa pengembangan karakter harus mencakup semua aspek ini untuk membentuk individu yang seimbang.

Di sisi lain, Pendidikan karakter adalah proses sistematis untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap yang positif pada individu. Dalam konteks pendidikan tinggi, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berperilaku etis dan bertanggung jawab dalam tindakan mereka (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Proses ini melibatkan pengajaran, penguatan, dan penerapan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari.



## **B. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Pendidikan Karakter**

Tujuan pendidikan karakter di perguruan tinggi meliputi pembentukan kepribadian yang kuat, pengembangan kemampuan sosial, dan penciptaan individu yang siap berkontribusi pada masyarakat. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang mampu beradaptasi dalam lingkungan yang beragam dan menanggapi tantangan sosial dengan cara yang konstruktif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Fungsi pendidikan karakter sangat luas, mulai dari meningkatkan kesadaran moral, membangun hubungan yang baik antarindividu, hingga menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pendidikan karakter juga berfungsi untuk mengurangi perilaku negatif, seperti bullying dan kekerasan, serta mendorong mahamamahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat (Lickona, 1991).

Prinsip pendidikan karakter mencakup integrasi nilai-nilai dalam kurikulum, keterlibatan aktif mahamamahasiswa, dan pendekatan yang berbasis pada pengalaman. Pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang optimal (Schwartz & Sharpe, 2006).

## **C. Media Pendidikan Karakter**

Media pendidikan karakter dapat berupa berbagai alat dan metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai karakter kepada mahamamahasiswa. Media ini mencakup buku, film, seminar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Penggunaan media yang beragam dapat meningkatkan efektivitas pendidikan karakter, karena mahamamahasiswa dapat belajar dari berbagai sumber dan pengalaman (Sugiyono, 2013).

Selain itu, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan karakter. Platform online seperti forum diskusi, blog, dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai karakter dan menciptakan dialog antara mahamamahasiswa. Hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan karakter yang memanfaatkan pengalaman sosial dan interaksi antarindividu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Media pendidikan karakter terdiri dari berbagai elemen yang saling mendukung dan berinteraksi. Keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, serta media cetak dan massa berkontribusi dalam



membangun karakter individu. Kerja sama antara semua pihak ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja; melainkan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa media pendidikan karakter yang berperan penting dalam proses pembentukan karakter individu.

#### 1. Keluarga

Keluarga adalah media pendidikan karakter yang paling awal dan fundamental. Sebagai lingkungan pertama bagi anak, keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai dasar yang membentuk karakter individu. Orang tua yang menerapkan komunikasi yang baik dan contoh perilaku positif akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan karakter anak. Menurut Gordon (2000), nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, menjadi fondasi bagi sikap dan perilaku anak di kemudian hari.

#### 2. Satuan Pendidikan

Sekolah atau satuan pendidikan merupakan media formal untuk pendidikan karakter. Di sini, nilai-nilai karakter dapat diajarkan secara sistematis melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam mata pelajaran dan aktivitas sehari-hari di sekolah dapat membantu mahasiswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013), sekolah harus berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar akademik, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung pengembangan karakter.

#### 3. Masyarakat

Masyarakat sebagai media pendidikan karakter berperan dalam memberikan contoh perilaku dan nilai-nilai yang dapat diadopsi individu. Interaksi sosial dalam komunitas memberikan pengalaman yang penting bagi individu untuk belajar tentang kerja sama, toleransi, dan kepedulian. Menurut Bandura (1977), observasi dan interaksi dengan orang-orang di sekitar akan membentuk sikap dan perilaku individu, sehingga masyarakat berfungsi sebagai lingkungan yang mendidik.

#### 4. Pemerintah

Pemerintah juga berperan sebagai media pendidikan karakter melalui kebijakan dan program yang mendukung pengembangan karakter. Melalui regulasi dan kampanye publik, pemerintah dapat mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang penting untuk dibudayakan. Misalnya, program-



program pendidikan karakter yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut di kalangan masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

#### 5. Dunia Usaha

Dunia usaha menjadi media pendidikan karakter yang penting, terutama dalam membangun karakter profesional. Perusahaan dapat berperan dalam mendidik karyawan melalui pelatihan dan pengembangan yang menekankan etika kerja, tanggung jawab sosial, dan integritas. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung nilai-nilai karakter, perusahaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan karakter masyarakat (Schwartz & Sharpe, 2006).

#### 6. Media Cetak dan Media Massa

Media cetak dan media massa memiliki peran signifikan dalam pendidikan karakter dengan menyebarkan informasi dan nilai-nilai positif kepada masyarakat luas. Melalui artikel, berita, dan program televisi, media dapat mempromosikan cerita-cerita inspiratif yang menggambarkan perilaku baik dan nilai-nilai karakter. Menurut Eisner (2002), media dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk opini publik mengenai pentingnya pendidikan karakter.

### **D. Sumber dan Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter**

Sumber pendidikan karakter dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk keluarga, lingkungan sosial, dan institusi pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertama di mana individu menerima nilai-nilai karakter. Interaksi dalam keluarga, terutama antara orang tua dan anak, sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak (Gordon, 2000).

Sumber pendidikan karakter meliputi agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Masing-masing sumber ini memberikan kontribusi penting dalam membentuk karakter individu. Melalui pendidikan yang mengintegrasikan berbagai sumber ini, diharapkan dapat terbentuk generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi. Pendidikan karakter bersumber dari berbagai aspek yang membentuk nilai-nilai dan norma dalam kehidupan individu. Berikut adalah beberapa sumber utama pendidikan karakter:



### 1. Agama

Agama merupakan salah satu sumber pendidikan karakter yang sangat penting. Dalam setiap agama, terdapat ajaran dan nilai-nilai moral yang mendukung pembentukan karakter individu. Misalnya, nilai kejujuran, toleransi, dan kasih sayang sering diajarkan dalam teks-teks suci dan melalui praktik keagamaan. Menurut Sutrisno (2013), pendidikan karakter berbasis agama dapat membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan. Pendidikan agama diharapkan tidak hanya mengajarkan aspek ritual, tetapi juga nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

### 2. Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga menjadi sumber penting dalam pendidikan karakter. Lima sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung kehidupan bermasyarakat yang harmonis, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013), pendidikan karakter yang mengacu pada Pancasila dapat membentuk individu yang memahami pentingnya kerjasama dan saling menghormati dalam kehidupan sosial. Pancasila memberikan panduan moral yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan perilaku individu dalam masyarakat.

### 3. Budaya

Budaya lokal dan tradisi masyarakat juga menjadi sumber pendidikan karakter. Setiap budaya memiliki nilai-nilai yang khas, seperti kebersamaan, penghormatan terhadap orang tua, dan kesopanan. Menurut Geertz (1973), budaya berfungsi sebagai sistem makna yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dan bertindak. Pendidikan karakter yang memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dapat membantu individu memahami identitasnya dan berkontribusi pada masyarakat secara positif. Dengan memahami dan menghargai budaya, individu dapat mengembangkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitasnya.

### 4. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional juga menjadi landasan dalam pendidikan karakter. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013), pendidikan karakter harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral yang tinggi. Integrasi pendidikan



karakter dalam kurikulum diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan ini secara efektif.

Nilai-nilai dalam pendidikan karakter mencakup kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan empati. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam pendidikan karakter. Pancasila mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya dan norma masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan toleransi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang dapat membentuk individu menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter yang penting untuk diajarkan dan diinternalisasi:

#### 1. Kejujuran

Kejujuran adalah nilai dasar dalam pendidikan karakter yang mencakup integritas dan keterbukaan. Individu yang jujur akan berkomunikasi dengan jelas dan menghindari penipuan. Pendidikan karakter yang menekankan kejujuran akan membantu menciptakan lingkungan yang saling percaya dan mendukung interaksi sosial yang sehat.

#### 2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab mengajarkan individu untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Ini mencakup kewajiban untuk memenuhi janji, menyelesaikan tugas, dan berkontribusi kepada masyarakat. Dengan mengembangkan rasa tanggung jawab, individu akan menjadi lebih disiplin dan dapat diandalkan.

#### 3. Empati

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Pendidikan karakter yang menekankan empati membantu individu untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, mendorong sikap toleran, dan mengurangi konflik. Empati juga penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung.

#### 4. Kerja Sama

Nilai kerja sama mengajarkan individu untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan karakter yang mengedepankan kerja sama mengajarkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian konflik. Hal ini penting dalam lingkungan pendidikan dan profesional di mana tim sering kali diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.



#### 5. Disiplin

Disiplin adalah nilai yang mengajarkan individu untuk mengatur diri dan mengendalikan perilaku. Pendidikan karakter yang mengajarkan disiplin membantu individu untuk mengembangkan rutinitas, fokus pada tujuan, dan menghargai waktu. Disiplin sangat penting dalam mencapai kesuksesan di berbagai aspek kehidupan.

#### 6. Rasa Hormat

Rasa hormat mengajarkan individu untuk menghargai orang lain dan diri sendiri. Pendidikan karakter yang menekankan rasa hormat akan menciptakan lingkungan yang positif, di mana setiap individu merasa dihargai dan didengarkan. Rasa hormat juga merupakan dasar dari interaksi sosial yang sehat.

#### 7. Kemandirian

Kemandirian adalah nilai yang mendorong individu untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Pendidikan karakter yang menekankan kemandirian akan membantu individu mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. Kemandirian juga penting dalam membangun kreativitas dan inovasi.

#### 8. Keadilan

Keadilan adalah nilai yang mengajarkan individu untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan setara. Pendidikan karakter yang menekankan keadilan akan membantu individu untuk memahami pentingnya hak dan kewajiban serta berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Keadilan juga berhubungan erat dengan kesetaraan dan hak asasi manusia.

### **E. Urgensi Pendidikan Karakter**

Urgensi pendidikan karakter di perdosenan tinggi semakin meningkat, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Pendidikan karakter penting untuk membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat (Lickona, 1991).

Dengan adanya pendidikan karakter, mahamamahasiswa diharapkan dapat menghadapi berbagai masalah sosial, seperti korupsi dan ketidakadilan. Pendidikan karakter membantu individu mengembangkan pemikiran kritis dan empati terhadap orang lain, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).



Era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, tantangan moral semakin kompleks, pendidikan karakter memiliki peran yang tinggi dalam membangun moral manusia melalui dunia pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan karakter berperan penting dalam membentuk insan profetik, yaitu individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Diantara urgensi Pendidikan karakter adalah:

#### 1. Memperbaiki Moral Manusia

Pendidikan karakter berfungsi sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki moral manusia. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, individu dapat memahami pentingnya perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini membantu membentuk sikap positif yang akan mempengaruhi interaksi sosial dan membangun masyarakat yang lebih baik.

#### 2. Menangkal Perilaku Negatif

Urgensi pendidikan karakter juga terletak pada kemampuannya untuk menangkali perilaku negatif, seperti korupsi, kekerasan, dan intoleransi. Dalam lingkungan pendidikan, pendidikan karakter menjadi alat yang efektif untuk membentuk kesadaran moral dan etika di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan peka terhadap masalah sosial.

#### 3. Membentuk Insan Profetik

Insan profetik adalah individu yang memiliki visi moral yang tinggi, mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan insan profetik yang mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan modern, tanpa kehilangan akar nilai-nilai moral. Melalui pendidikan yang berbasis pada karakter, individu akan lebih siap menghadapi tantangan dan berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif.

#### 4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Implementasi pendidikan karakter juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan mengedepankan pendidikan karakter, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan kepribadian. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih terlibat dan termotivasi dalam belajar, sehingga meningkatkan hasil pendidikan secara keseluruhan.



## 5. Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik

Urgensi pendidikan karakter dalam memperbaiki moral manusia juga berkaitan dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ketika individu dilengkapi dengan karakter yang kuat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada komunitas dan bangsa secara keseluruhan.

## **F. Kontribusi Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Karakter Bangsa**

Pendidikan karakter memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan karakter bangsa. Dengan membentuk individu yang berakhlak mulia dan berintegritas, pendidikan karakter dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Individu yang memiliki karakter yang kuat akan berkontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik (Schwartz & Sharpe, 2006).

Dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan karakter dapat mengurangi perilaku negatif di masyarakat, seperti korupsi dan ketidakadilan. Dengan mengedepankan nilai-nilai karakter, diharapkan masyarakat akan lebih bersinergi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral yang tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosi, yang meliputi kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak menghadapi masa depan yang penuh tantangan.

### 1. Membangun Kecerdasan Emosional

Ketika pendidikan karakter diintegrasikan dalam proses pembelajaran, anak-anak dilatih untuk mengenali dan mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. Misalnya, melalui diskusi tentang nilai-nilai seperti empati dan toleransi, anak diajarkan untuk memahami perasaan orang lain dan merespons dengan cara yang tepat. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dalam situasi yang menantang.



## 2. Memfasilitasi Keterampilan Sosial

Pendidikan karakter yang baik juga meningkatkan keterampilan sosial anak. Dengan memahami dan menghargai emosi orang lain, anak akan lebih mudah menjalin hubungan yang positif dengan teman-teman dan lingkungan sekitar. Keterampilan sosial ini penting untuk kerjasama, penyelesaian konflik, dan komunikasi yang efektif—semua aspek yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional.

## 3. Meningkatkan Resiliensi

Anak-anak yang dilatih untuk memiliki kecerdasan emosional cenderung lebih resiliens, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Dengan pendidikan karakter, mereka belajar cara menghadapi kegagalan dan tantangan tanpa kehilangan semangat. Ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk tekanan akademis. Anak yang resiliens akan lebih mampu beradaptasi dan menemukan solusi dalam situasi yang sulit.

## 4. Mempersiapkan Masa Depan

Kecerdasan emosional tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga akademis. Anak-anak dengan kecerdasan emosional yang baik memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar dan lebih mampu mengatasi stres yang berkaitan dengan tuntutan akademis. Mereka akan lebih mampu fokus, berpikir kritis, dan berperforma baik dalam lingkungan belajar.

## 5. Menciptakan Lingkungan Positif

Dengan pendidikan karakter yang sistematis, lingkungan belajar dapat menjadi lebih positif dan mendukung. Ketika anak-anak merasa aman dan dihargai, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan potensi mereka. Lingkungan yang positif ini juga membantu mengurangi perilaku negatif dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran.

## **Referensi**

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Eisner, E. W. (2002). *The Arts and the Creation of Mind*. New Haven: Yale University Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gordon, T. (2000). *Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children*. New York: Random House.



- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusurbuk.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Schwartz, M. S., & Sharpe, D. (2006). *Teaching Character Education Through Literature*. New York: Routledge.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2013). *Pendidikan Karakter Berbasis Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.



# BAB III

## LANDASAN TEORITIS PENDIDIKAN KARAKTER



### A. Teori-teori Pendidikan Karakter

Teori-teori pendidikan karakter memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana nilai-nilai positif dapat ditanamkan dan dikembangkan dalam individu. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, pendidik dapat menciptakan strategi yang lebih efektif dalam pendidikan karakter, sehingga membentuk individu yang berkualitas dan berakhlak mulia

Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari berbagai teori yang mendasari pengembangannya. Berbagai pendekatan dan konsep telah dikemukakan oleh para ahli untuk memahami dan menerapkan pendidikan karakter secara efektif. Berikut adalah beberapa teori utama yang menjadi landasan pendidikan karakter.

#### 1. Teori Behaviorisme

Teori behaviorisme, yang dipelopori oleh B.F. Skinner, berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu. Dalam konteks pendidikan karakter, teori ini menekankan pentingnya reinforcement positif untuk membentuk perilaku baik. Misalnya, memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dapat memperkuat perilaku tersebut (Skinner, 1974).

#### 2. Teori Kognitif

Teori kognitif, yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, menyoroti proses berpikir individu dalam memahami dunia. Pendidikan karakter berdasarkan teori ini melibatkan pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan reflektif tentang nilai-nilai yang diajarkan. Ini mencakup analisis situasi etis dan pengambilan keputusan yang baik (Piaget, 1952; Vygotsky, 1978).



### 3. Teori Humanisme

Teori humanisme, yang dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, menekankan pentingnya pengembangan potensi manusia dan aktualisasi diri. Pendidikan karakter dalam konteks ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai positif, seperti empati dan rasa hormat, yang mendukung kesejahteraan individu dan sosial (Maslow, 1970).

### 4. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme, yang dipopulerkan oleh Vygotsky dan Jerome Bruner, menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana mahasiswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Dalam pendidikan karakter, pendekatan ini melibatkan pengalaman langsung dan refleksi terhadap nilai-nilai yang dipelajari (Bruner, 1966).

### 5. Teori Sosial Kognitif

Albert Bandura mengembangkan teori sosial kognitif yang menekankan peran model dan observasi dalam pembelajaran. Pendidikan karakter yang mengadopsi teori ini mengajarkan bahwa mahasiswa dapat belajar nilai-nilai karakter melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, termasuk dosen dan teman sebaya (Bandura, 1977).

### 6. Teori Multikultural

Teori multikultural mengakui pentingnya menghargai keragaman budaya dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang berbasis pada teori ini mendorong mahasiswa untuk memahami dan menghargai perbedaan, serta mengembangkan sikap toleran terhadap orang lain (Banks, 1994).

### 7. Teori Moral Development

Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang mencakup enam tahapan perkembangan moral. Pendidikan karakter dapat mengacu pada teori ini untuk membantu mahasiswa memahami nilai-nilai moral yang kompleks dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Kohlberg, 1981).

### 8. Teori Nilai-nilai

Teori nilai-nilai, seperti yang dikemukakan oleh Rokeach, menjelaskan bagaimana nilai-nilai individu terbentuk dan diinternalisasi. Pendidikan karakter bertujuan untuk membangun nilai-nilai positif yang dapat memandu perilaku individu dalam masyarakat (Rokeach, 1973).

### 9. Teori Pendidikan Holistik

Teori pendidikan holistik berfokus pada pengembangan keseluruhan individu—fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan karakter



yang holistik mencakup berbagai aspek pengembangan mahamahasiswa untuk membentuk pribadi yang seimbang (Miller, 2000).

10. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Dalam pendidikan karakter, lingkungan sosial yang mendukung, seperti sekolah dan komunitas, memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu (Bandura, 1977).

## **B. Nilai-nilai Universal dalam Pendidikan Karakter**

Nilai-nilai universal merupakan landasan penting dalam pendidikan karakter yang dapat diterima di berbagai budaya dan sistem nilai. Berikut adalah beberapa nilai universal yang perlu diajarkan dalam pendidikan karakter.

1. Kejujuran

Kejujuran adalah nilai dasar yang mendasari semua hubungan sosial. Dalam pendidikan karakter, kejujuran diajarkan sebagai landasan kepercayaan dan integritas (Lickona, 1991).

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab mengajarkan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Nilai ini penting dalam membentuk individu yang dapat diandalkan dan memiliki komitmen (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

3. Empati

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Pendidikan karakter yang menekankan empati dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan saling mendukung (Eisenberg & Strayer, 1987).

4. Keadilan

Keadilan adalah nilai yang menekankan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu. Dalam pendidikan karakter, keadilan diajarkan untuk menciptakan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam masyarakat (Nussbaum, 2011).

5. Kerja Sama

Kerja sama mengajarkan individu untuk bekerja sama dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Nilai ini penting dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial (Johnson & Johnson, 1999).

6. Pengendalian Diri

Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi dan dorongan. Pendidikan karakter yang mengajarkan pengendalian diri



membantu individu untuk membuat keputusan yang baik dalam situasi yang menantang (Baumeister et al., 2007).

7. Rasa Hormat

Rasa hormat mengajarkan individu untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter yang menekankan rasa hormat akan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung (Goleman, 1995).

8. Kemandirian

Kemandirian mendorong individu untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Pendidikan karakter yang menekankan kemandirian membantu individu mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk membuat keputusan (Schunk, 2008).

9. Kepedulian Sosial

Kepedulian sosial mengajarkan individu untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain dan masyarakat. Pendidikan karakter yang menekankan kepedulian sosial akan mendorong individu untuk berkontribusi pada komunitas (Furco, 1996).

10. Integritas

Integritas adalah komitmen untuk berpegang pada nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan karakter yang mengajarkan integritas membantu individu untuk menjadi pribadi yang konsisten dalam tindakan dan sikap (Kohlberg, 1981).

### C. Proses Pembentukan Karakter

Proses pembentukan karakter yang melibatkan *Moral Knowing*, *Moral Feeling*, dan *Moral Action* merupakan pendekatan holistik dalam pendidikan karakter. Ketiga komponen ini saling mendukung dan berkontribusi dalam menciptakan individu yang tidak hanya memahami nilai-nilai moral, tetapi juga merasakan dan menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Implementasi pendidikan karakter yang efektif harus memperhatikan ketiga aspek ini untuk mencapai tujuan pembentukan karakter yang diinginkan.

1. *Moral Knowing* (Pengetahuan Tentang Moral)

*Moral knowing* adalah tahap pertama dalam pembentukan karakter, yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai moral. Pada tahap ini, individu diajarkan untuk mengenali perbedaan antara perilaku yang benar dan salah serta memahami prinsip-prinsip etika yang mendasarinya. Pengetahuan moral ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, diskusi, dan pengalaman hidup.



Moral knowing merupakan aspek yang krusial dalam pendidikan karakter. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika, yang akan membentuk individu untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berintegritas. Berikut adalah beberapa komponen penting dari moral knowing yang harus diajarkan:

a. *Moral Awareness* (Kesadaran Moral)

Lickona, T. (1991) menyatakan bahwa kesadaran moral merupakan kemampuan untuk mengenali situasi yang memiliki implikasi etis. Mahasiswa perlu dilatih untuk menjadi peka terhadap konteks sosial di sekitarnya dan untuk memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Hal ini penting agar mereka dapat mengambil tanggung jawab dalam tindakan yang mereka lakukan.

b. *Knowing Moral Values* (Mengetahui Nilai-nilai Moral)

Rokeach, M. (1973) menyatakan bahwa mengetahui nilai-nilai moral adalah aspek fundamental yang memungkinkan individu untuk memahami dan menginternalisasi apa yang dianggap baik dan benar. Melalui pendidikan karakter, mahasiswa diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan empati, yang menjadi panduan dalam perilaku sehari-hari.

c. *Perspective Taking* (Pengambilan Perspektif)

Eisenberg, N., & Strayer, J. (1987) menyatakan bahwa kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain sangat penting dalam mengembangkan empati. Dengan memahami sudut pandang orang lain, mahasiswa belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain.

d. *Moral Reasoning* (Alasan Moral)

Kohlberg, L. (1981) menyatakan bahwa *moral reasoning* melibatkan proses berpikir yang digunakan untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Pendidikan karakter harus melibatkan diskusi yang mendalam mengenai dilema etis, sehingga mahasiswa dapat berlatih dalam menilai situasi moral dan mengambil keputusan yang tepat.

e. *Decision Making* (Pengambilan Keputusan)

Rest, J. (1986) menyatakan bahwa pengambilan keputusan moral adalah kemampuan untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipahami. Pendidikan karakter harus mengajarkan mahasiswa untuk mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan mereka, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.



f. *Self Knowledge* (Pengetahuan Diri)

Schunk, D. H. (2004) menyatakan bahwa pengetahuan diri mencakup pemahaman individu tentang nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan mereka. Dengan memiliki pengetahuan diri yang baik, mahasiswa dapat lebih mudah menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral mereka.

2. *Moral Feeling* (Perasaan tentang Moral)

*Moral feeling* mengacu pada perasaan dan emosi yang terkait dengan nilai-nilai moral. Ini mencakup empati, rasa bersalah, dan rasa bangga terhadap tindakan yang baik. Ketika individu merasakan emosi positif terhadap perilaku yang baik dan negatif terhadap perilaku yang buruk, mereka lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang telah mereka pelajari. Penguatan emosi ini sangat penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moral.

*Moral feeling*, atau perasaan moral, merupakan aspek penting yang harus ditanamkan kepada anak dalam pendidikan karakter. Ini berfungsi sebagai sumber energi internal yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai *moral feeling* dan relevansinya dalam pembentukan karakter.

*Moral feeling*, atau perasaan moral, sangat penting dalam pendidikan karakter karena berfungsi sebagai sumber motivasi internal yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Menurut Eisenberg (2000), emosi seperti empati dan rasa tanggung jawab adalah kunci untuk mendorong tindakan prososial. Ketika anak-anak merasakan empati terhadap orang lain, mereka lebih termotivasi untuk membantu dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Selain itu, Hoffman (2000) menekankan bahwa perasaan moral dapat memperkuat komitmen individu terhadap nilai-nilai etika, yang penting dalam pembentukan identitas moral. Dengan mengembangkan *moral feeling*, individu tidak hanya belajar tentang nilai-nilai moral, tetapi juga mengalami dampak emosional yang membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai tersebut, sehingga menciptakan hubungan sosial yang lebih baik dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas maka *Moral Feeling* memiliki urgensi:

a. Sumber Energi untuk Bertindak

*Moral feeling* menjadi pendorong bagi individu untuk melakukan tindakan moral. Ketika anak merasakan empati atau tanggung jawab, mereka lebih termotivasi untuk membantu orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.



- b. Penguatan Emosi Positif  
Penguatan emosi positif, seperti rasa bangga ketika melakukan tindakan baik, dapat memperkuat komitmen individu terhadap nilai-nilai moral. Perasaan ini membantu anak memahami pentingnya berbuat baik dan membangun identitas moral mereka.
- c. Pembentukan Identitas Moral  
*Moral feeling* berperan penting dalam pembentukan identitas moral individu. Ketika anak merasakan dampak emosional dari tindakan mereka, mereka lebih cenderung menginternalisasi nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari diri mereka.
- d. Hubungan Sosial yang Lebih Baik  
Memiliki perasaan moral yang kuat membantu anak membangun hubungan sosial yang lebih baik. Empati dan kasih sayang menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan orang lain, meningkatkan kemampuan mereka untuk berkolaborasi dan berinteraksi secara positif.

Untuk menjadi individu yang berkarakter, terdapat enam aspek emosi yang harus mampu dirasakan dan dikembangkan, yaitu:

- a. *Conscience* atau nurani adalah kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, yang menjadi panduan moral dalam pengambilan keputusan (Lickona, 1991).
- b. *Self-esteem* atau percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri, yang berkontribusi pada keberanian untuk bertindak secara etis (Rosenberg, 1965).
- c. *Empathy*, yaitu kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, memungkinkan individu untuk berhubungan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial (Eisenberg, 2000).
- d. *Loving the good* atau mencintai kebenaran mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai positif dan keinginan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Hoffman, 2000).
- e. *Self-control* atau kemampuan untuk mengontrol diri adalah kunci dalam mengatasi godaan dan mempertahankan integritas moral (Mischel, 2014).
- f. *Humility* atau kerendahan hati membantu individu untuk tetap terbuka terhadap kritik dan pembelajaran, yang esensial untuk pertumbuhan pribadi dan sosial (Seligman, 2002). Dengan mengembangkan keenam aspek ini, seseorang dapat menjadi



individu yang lebih berkarakter dan berkontribusi positif pada masyarakat.

### 3. *Moral Action* (Perbuatan Bermoral)

*Moral action* adalah tahap terakhir dalam proses pembentukan karakter, di mana pengetahuan dan perasaan moral diterapkan dalam tindakan nyata. Pada tahap ini, individu diharapkan untuk mengambil keputusan yang baik dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang telah mereka pelajari. *Moral action* mencakup berbagai tindakan sehari-hari, seperti membantu orang lain, bersikap jujur, dan bertanggung jawab.

*Moral action* adalah proses di mana pengetahuan moral diwujudkan dalam tindakan nyata. Ini mencerminkan kemampuan individu untuk menerapkan prinsip-prinsip moral yang telah mereka pelajari ke dalam perilaku sehari-hari. Menurut Kohlberg (1981), tindakan moral tidak hanya bergantung pada pemahaman etis, tetapi juga pada kemampuan untuk bertindak berdasarkan pemahaman tersebut.

Perbuatan moral ini merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya: *moral knowing* dan *moral feeling*. *Moral knowing* memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai yang benar, sementara *moral feeling*, seperti empati dan kesadaran moral, memberikan motivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut (Lickona, 1991).

Tanpa keduanya, individu mungkin memiliki pengetahuan tentang apa yang benar, tetapi tidak memiliki dorongan emosional untuk bertindak secara etis. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus mencakup pengembangan ketiga komponen ini untuk menciptakan individu yang tidak hanya memahami moralitas, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik atau bertindak secara moral (*act morally*), penting untuk mempertimbangkan tiga aspek lain dari karakter yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan.

- a. Kompetensi (*competence*) merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali situasi moral dan mengambil tindakan yang tepat. Menurut Lickona (1991), kompetensi ini mencakup keterampilan



- berpikir kritis dan kemampuan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi secara etis dengan orang lain.
- b. Keinginan (*will*) mencerminkan motivasi internal individu untuk bertindak dengan cara yang baik. Tanpa keinginan yang kuat untuk berbuat baik, bahkan individu yang kompeten sekalipun mungkin tidak bertindak secara etis (Kohlberg, 1981).
  - c. Kebiasaan (*habit*) merupakan pola perilaku yang terbentuk dari tindakan yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan baik dapat menguatkan perilaku moral dan menjadikannya bagian integral dari identitas seseorang (Aristotle, 2000). Dengan memahami interaksi antara kompetensi, keinginan, dan kebiasaan, kita dapat lebih jelas melihat apa yang mendorong individu untuk bertindak secara moral.

## Referensi

- Aristotle. (2000). *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. New York: Oxford University Press.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Banks, J. A. (1994). *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice*. Review of Research in Education.
- Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). *The Strength Model of Self-Control*. Current Directions in Psychological Science.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Eisenberg, N. (2000). "Emotion, Regulation, and Moral Development." *Annual Review of Psychology*, 51, 665-697.
- Eisenberg, N., & Strayer, J. (1987). *Empathy and Its Development*. Cambridge University Press.
- Furco, A. (1996). *Service-Learning: A Balanced Approach to Experiential Education. Expanding Boundaries: Service and Learning*.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
- Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge University Press.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Boston: Allyn & Bacon.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Pendidikan Karakter*. Jakarta: Puskurbuk.



- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. New York: Harper & Row.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
- Miller, J. (2000). *Education and the Holistic Paradigm*. *Holistic Education Review*.
- Mischel, W. (2014). *The Marshmallow Test: Mastering Self-Control*. New York: Little, Brown and Company.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International Universities
- Rest, J. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*. New York: Praeger.
- Rokeach, M. (1973). *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton University Press.
- Schunk, D. H. (2004). *Learning Theories: An Educational Perspective*. New Jersey: Pearson.
- Seligman, M. E. P. (2002). *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment*. New York: Free Press.



# BAB IV

## PENANAMAN KARAKTER PADA LEMBAGA PENDIDIKAN



### A. Pengertian Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Lembaga ini dapat terdiri dari berbagai bentuk, seperti sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan non-formal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan generasi yang berkualitas (Depdiknas, 2003).

Lembaga pendidikan berfungsi sebagai tempat pembelajaran yang terstruktur, di mana pengetahuan dan keterampilan diajarkan melalui berbagai metode dan pendekatan. Proses pendidikan yang berlangsung di lembaga ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan moral peserta didik. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasution (2000), pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang baik.

Dalam konteks pendidikan formal, lembaga pendidikan biasanya memiliki kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum tersebut mencakup berbagai mata pelajaran yang dirancang untuk memenuhi standar pendidikan nasional. Hal ini penting agar peserta didik memperoleh pengetahuan yang relevan dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Mulyasa (2010), kurikulum yang baik akan memberikan panduan dalam proses pembelajaran yang efektif.

Selain pendidikan formal, lembaga pendidikan non-formal juga memainkan peran penting dalam masyarakat. Lembaga ini meliputi kursus, pelatihan, dan program pendidikan keaksaraan yang bertujuan untuk



meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Menurut UNESCO (2005), pendidikan non-formal dapat menjangkau kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan formal, sehingga membantu mereka untuk berpartisipasi lebih baik dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai wadah bagi interaksi sosial antara peserta didik, guru, dan masyarakat. Interaksi ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran ide dan pengalaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Bruner (1996), yang menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif sering kali terjadi dalam konteks sosial, di mana individu belajar dari satu sama lain.

Di era digital saat ini, lembaga pendidikan juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi semakin umum diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Seperti yang diungkapkan oleh Depdiknas (2006), pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Peran lembaga pendidikan dalam masyarakat juga berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa. Lembaga ini diharapkan tidak hanya mencetak individu yang cerdas, tetapi juga yang berintegritas dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Menurut Santrock (2008), pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari seluruh proses pendidikan.

Secara keseluruhan, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mencetak generasi penerus bangsa. Dengan adanya lembaga pendidikan yang berkualitas, diharapkan dapat melahirkan individu-individu yang tidak hanya unggul dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Depdiknas (2003), lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang mendukung pengembangan potensi setiap individu secara maksimal.

## **B. Peran dan Fungsi Lembaga Pendidikan**

Lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam pengembangan individu dan masyarakat. Salah satu fungsi utama lembaga pendidikan adalah menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut Depdiknas (2003), lembaga pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan



mempersiapkan generasi yang berkualitas melalui proses pembelajaran yang terstruktur.

Selain itu, lembaga pendidikan berfungsi sebagai agen sosialisasi. Di dalam lembaga ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang pelajaran akademik, tetapi juga norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa pendidikan membantu individu memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik. Pendidikan karakter menjadi aspek penting dalam pembentukan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab. Menurut Santrock (2008), pembelajaran yang baik harus mencakup pengembangan aspek moral dan sosial, sehingga lulusan dapat menjadi warga negara yang baik.

Lembaga pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global di era globalisasi saat ini. Pendidikan yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh Mulyasa (2010), lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman agar lulusannya memiliki daya saing di tingkat global.

Lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai tempat inovasi dan penelitian. Melalui penelitian, lembaga pendidikan dapat menghasilkan pengetahuan baru dan solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian lembaga pendidikan tinggi berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks pengembangan masyarakat, lembaga pendidikan dapat berfungsi sebagai pusat komunitas. Melalui program-program pendidikan non-formal, lembaga ini dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat luas. Menurut UNESCO (2005), pendidikan non-formal memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberdayakan individu.

Lembaga pendidikan juga berfungsi sebagai tempat pengembangan sosial dan emosional peserta didik. Interaksi dengan teman sebaya dan guru di dalam lembaga pendidikan dapat membantu peserta didik membangun keterampilan sosial dan emosional yang penting. Menurut Goleman (1995), kecerdasan emosional memainkan peran krusial dalam keberhasilan individu di berbagai aspek kehidupan.

Secara keseluruhan, lembaga pendidikan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Dengan berbagai fungsinya, lembaga pendidikan diharapkan dapat mencetak generasi penerus yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Depdiknas (2003), lembaga pendidikan harus terus berupaya untuk memenuhi tujuan mulia ini.



### **C. Pentingnya Pendidikan Karakter pada Lembaga Pendidikan**

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam proses pendidikan di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Menurut Lickona (1991), pendidikan karakter membantu membangun kepribadian yang kuat dan nilai-nilai positif pada peserta didik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara konstruktif dalam masyarakat.

Salah satu alasan pentingnya pendidikan karakter adalah untuk menciptakan individu yang memiliki rasa tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab merupakan nilai fundamental yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan. Santrock (2008) menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, yang merupakan landasan bagi hubungan sosial yang sehat.

Selain itu, pendidikan karakter juga berperan dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Di dalam lembaga pendidikan, interaksi dengan teman sebaya dan guru sangat penting untuk mengasah kemampuan komunikasi dan kerja sama. Sebagaimana diungkapkan oleh Goleman (1995), kecerdasan emosional yang dibangun melalui pendidikan karakter dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menjalin hubungan interpersonal yang baik.

Pendidikan karakter juga membantu peserta didik untuk menghadapi tantangan moral dan etika yang mereka hadapi. Dalam dunia yang semakin kompleks, siswa perlu memiliki panduan untuk membuat keputusan yang tepat. Menurut Berkowitz dan Bier (2005), pendidikan karakter memberikan kerangka kerja yang membantu siswa dalam menilai dan memilih tindakan yang etis.

Selain itu, lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulumnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang mendukung nilai-nilai karakter dapat mempengaruhi sikap dan perilaku siswa secara keseluruhan. Mulyasa (2010) menekankan bahwa suasana yang kondusif di lembaga pendidikan akan mendorong siswa untuk berperilaku baik dan berprestasi.

Pendidikan karakter juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan mendidik generasi muda untuk memiliki karakter yang baik, lembaga pendidikan berperan dalam membangun fondasi sosial yang kuat. Menurut UNESCO (2005), pendidikan karakter dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kohesi sosial di dalam masyarakat.

Pentingnya pendidikan karakter juga terlihat dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang. Dengan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini, diharapkan siswa dapat menghindari perilaku negatif seperti bullying, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan. Hal ini sesuai



dengan penelitian oleh Narvaez (2006) yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap perilaku berisiko.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada delapan alasan pentingnya pendidikan karakter pada lembaga pendidikan:

1. Pembentukan Kepribadian yang Baik. Pendidikan karakter membantu peserta didik mengembangkan sifat-sifat positif seperti integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Lickona (1991) menekankan bahwa pendidikan karakter adalah dasar untuk membentuk individu yang etis dan bermoral.
2. Pengembangan Keterampilan Sosial. Melalui interaksi di lembaga pendidikan, siswa belajar berkomunikasi dan bekerja sama. Menurut Goleman (1995), keterampilan emosional dan sosial yang dikembangkan di lingkungan pendidikan sangat penting untuk keberhasilan di masa depan.
3. Persiapan Menghadapi Tantangan Moral. Pendidikan karakter memberikan panduan untuk membantu siswa membuat keputusan etis. Berkowitz dan Bier (2005) menyatakan bahwa pendidikan karakter membantu siswa dalam menilai situasi moral yang kompleks dan membuat pilihan yang tepat.
4. Cipta Lingkungan Positif. Lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter menciptakan suasana yang mendukung nilai-nilai positif. Mulyasa (2010) menekankan bahwa lingkungan yang kondusif mendorong perilaku baik dan motivasi belajar siswa.
5. Pencegahan Perilaku Menyimpang. Pendidikan karakter berperan dalam mencegah perilaku negatif seperti bullying dan penyalahgunaan narkoba. Narvaez (2006) menunjukkan bahwa pendidikan karakter dapat melindungi siswa dari tindakan berisiko dengan menanamkan nilai-nilai positif.
6. Penguatan Kohesi Sosial. Individu yang memiliki karakter baik dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Menurut UNESCO (2005), pendidikan karakter berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih kuat dan berintegrasi.
7. Meningkatkan Kualitas Hidup. Pendidikan karakter membantu siswa mencapai kesejahteraan mental dan emosional yang lebih baik. Santrock (2008) menjelaskan bahwa aspek sosial dan emosional yang diajarkan dalam pendidikan karakter berpengaruh pada kualitas hidup individu.
8. Menyiapkan Warga Negara yang Bertanggung Jawab. Pendidikan karakter berperan dalam mencetak generasi yang memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini diungkapkan oleh Mulyasa (2010), yang menekankan pentingnya pendidikan karakter untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.



9. Mendorong Kepemimpinan yang Baik. Pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang positif. Menurut Zohar dan Marshall (2004), individu dengan karakter yang baik cenderung lebih efektif dalam memimpin dan menginspirasi orang lain.

Secara keseluruhan, pendidikan karakter memiliki peran krusial dalam pembentukan individu yang berkualitas. Lembaga pendidikan harus menempatkan pendidikan karakter sebagai salah satu prioritas dalam kurikulum mereka. Dengan demikian, diharapkan lulusan tidak hanya menjadi individu yang cerdas, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas.

#### **D. Peran Dosen dalam Pendidikan Karakter**

Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter di lembaga pendidikan tinggi. Mereka tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa melalui berbagai interaksi dan pendekatan. Menurut Lickona (1991), dosen sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar karakter yang baik.

Salah satu peran utama dosen dalam pendidikan karakter adalah sebagai teladan. Dosen yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan komitmen akan menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa. Goleman (1995) mengemukakan bahwa perilaku dan sikap dosen dapat memengaruhi sikap mahasiswa, sehingga menjadi penting bagi dosen untuk menjalankan peran ini dengan baik.

Dosen juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pengembangan karakter. Dengan membangun suasana yang positif dan mendukung, dosen dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Mulyasa (2010) menekankan bahwa lingkungan yang aman dan suportif sangat penting dalam proses pembelajaran karakter.

Melalui metode pengajaran yang kreatif, dosen dapat mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Misalnya, dengan menggunakan studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek sosial, dosen dapat mengajarkan nilai-nilai karakter secara langsung. Menurut Santrock (2008), pembelajaran berbasis pengalaman adalah cara yang efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai positif dalam diri mahasiswa.

Dosen juga memiliki peran dalam membimbing mahasiswa dalam pengambilan keputusan yang etis. Dalam situasi yang kompleks, mahasiswa sering membutuhkan panduan untuk membuat pilihan yang tepat.



Berkowitz dan Bier (2005) menyatakan bahwa dosen dapat membantu mahasiswa memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan masyarakat.

Selain itu, dosen dapat berkontribusi dalam program pengembangan karakter di luar kelas. Dengan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan workshop, dosen dapat memberikan pembelajaran yang lebih luas mengenai nilai-nilai karakter. Hal ini sejalan dengan pendapat Narvaez (2006) yang menekankan pentingnya pembelajaran karakter di berbagai konteks.

Dosen juga dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi di antara mahasiswa. Dengan menggunakan pendekatan yang adil dan empatik, dosen dapat membantu mahasiswa memahami perspektif satu sama lain, sehingga memperkuat keterampilan sosial dan emosional mereka. Menurut Zohar dan Marshall (2004), kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif adalah bagian penting dari pendidikan karakter.

Berikut adalah sembilan peran dosen dalam pendidikan karakter, lengkap dengan referensi:

1. Sebagai Teladan. Dosen berfungsi sebagai model bagi mahasiswa. Tindakan dan sikap dosen yang mencerminkan nilai-nilai karakter, seperti integritas dan kejujuran, dapat menjadi contoh yang menginspirasi. Lickona (1991) menekankan bahwa teladan yang baik sangat penting dalam pendidikan karakter.
2. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Positif. Dosen bertanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang mendukung pengembangan karakter. Mulyasa (2010) menyatakan bahwa lingkungan yang aman dan inklusif mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dan berkembang secara sosial.
3. Mengintegrasikan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum. Dosen dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam materi pembelajaran. Dengan menggunakan metode pengajaran yang kreatif, seperti studi kasus dan proyek kelompok, dosen dapat mengajarkan etika dan moral secara praktis. Santrock (2008) menyebutkan pentingnya pengalaman dalam pembelajaran karakter.
4. Membimbing Pengambilan Keputusan Etis. Dosen membantu mahasiswa dalam memahami situasi moral dan membuat keputusan yang tepat. Menurut Berkowitz dan Bier (2005), dosen berperan



- penting dalam membimbing mahasiswa untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka.
5. Mendorong Keterlibatan dalam Kegiatan Ekstrakurikuler. Dosen dapat memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar kelas, yang seringkali mengajarkan nilai-nilai karakter. Narvaez (2006) menunjukkan bahwa pembelajaran karakter dapat diperkuat melalui pengalaman di luar kelas.
  6. Menyelesaikan Konflik Secara Konstruktif. Dosen dapat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik di antara mahasiswa. Pendekatan yang empatik dan adil membantu mahasiswa belajar bagaimana menyelesaikan perbedaan secara damai. Menurut Zohar dan Marshall (2004), keterampilan ini adalah bagian penting dari pendidikan karakter.
  7. Memberikan Umpan Balik yang Konstruktif. Dosen berperan dalam memberikan umpan balik yang membantu mahasiswa memahami area yang perlu diperbaiki. Santrock (2008) menyatakan bahwa umpan balik yang positif dapat memperkuat perilaku baik dan mengarahkan mahasiswa ke arah yang lebih baik.
  8. Melibatkan Mahasiswa dalam Proyek Sosial. Dosen dapat memfasilitasi proyek yang berorientasi pada pengabdian masyarakat, yang memungkinkan mahasiswa menerapkan nilai-nilai karakter dalam konteks nyata. Menurut UNESCO (2005), keterlibatan dalam masyarakat dapat meningkatkan kesadaran sosial mahasiswa.
  9. Mendorong Refleksi Diri. Dosen dapat mengajak mahasiswa untuk melakukan refleksi tentang nilai-nilai dan tindakan mereka. Proses ini membantu mahasiswa memahami dan menginternalisasi karakter yang baik. Lickona (1991) menekankan pentingnya refleksi dalam pendidikan karakter.

Dengan peran yang beragam ini, dosen dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berintegritas. Secara keseluruhan, peran dosen dalam pendidikan karakter sangatlah multifaset. Dosen tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, teladan, dan fasilitator yang berkontribusi pada pengembangan karakter mahasiswa. Dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai prioritas, dosen dapat membantu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab.



Disisi lain terdapat lima strategi dosen dalam penerapan pendidikan karakter di kelas, diantaranya:

1. Menggunakan Metode Pembelajaran Berbasis Proyek. Dosen dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan nyata. Strategi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kerja sama dan tanggung jawab. Menurut Thomas (2000), pembelajaran berbasis proyek memungkinkan mahasiswa untuk mengalami dan menerapkan karakter dalam konteks praktis.
2. Integrasi Nilai Karakter dalam Kurikulum. Dosen dapat merancang kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai karakter, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Santrock (2008) menyebutkan bahwa pengajaran nilai-nilai tersebut dalam konteks akademis dapat membantu mahasiswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut.
3. Menggunakan Diskusi Kelas untuk Mengembangkan Pemikiran Kritis. Dosen dapat memfasilitasi diskusi kelas yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu etis dan moral. Dengan membahas kasus nyata, mahasiswa dapat belajar menganalisis situasi dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Menurut Goleman (1995), diskusi yang baik dapat meningkatkan kecerdasan emosional dan kesadaran sosial mahasiswa.
4. Memberikan Umpan Balik yang Konstruktif. Dosen perlu memberikan umpan balik yang membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Umpan balik yang positif dan membangun dapat mendorong mahasiswa untuk terus memperbaiki diri dan mengembangkan karakter yang baik. Lickona (1991) menekankan pentingnya umpan balik dalam proses pendidikan karakter.
5. Mengajak Mahasiswa untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler. Dosen dapat memfasilitasi dan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada pengembangan karakter, seperti organisasi sosial, program sukarela, dan kepemimpinan. Menurut Narvaez (2006), keterlibatan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang tanggung jawab sosial dan nilai-nilai karakter.



Adapun implikasi pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan terhadap karakter peserta didik, diantaranya:

1. Penguatan Nilai Moral. Pendidikan karakter berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral yang kuat pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter, siswa diharapkan dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter membantu membangun fondasi moral yang kokoh bagi individu.
2. Peningkatan Keterampilan Sosial. Melalui pendidikan karakter, siswa belajar berinteraksi secara positif dengan orang lain. Program yang melibatkan kerja sama, diskusi kelompok, dan proyek bersama dapat mengembangkan keterampilan sosial, seperti empati dan komunikasi. Menurut Goleman (1995), kemampuan emosional yang baik berkontribusi pada hubungan interpersonal yang sehat.
3. Pembentukan Sikap Proaktif. Pendidikan karakter dapat membentuk sikap proaktif pada peserta didik, di mana mereka tidak hanya berfokus pada diri sendiri tetapi juga pada kepentingan orang lain dan lingkungan sekitar. Narvaez (2006) menjelaskan bahwa keterlibatan dalam kegiatan sosial membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab dan kesadaran sosial.
4. Peningkatan Keberanian untuk Mengambil Keputusan Etis. Pendidikan karakter memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang pentingnya membuat keputusan yang etis. Dalam situasi yang sulit, siswa yang telah mendapatkan pendidikan karakter cenderung lebih mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Berkowitz dan Bier (2005) menyatakan bahwa pendidikan karakter berkontribusi pada kemampuan individu untuk mengambil keputusan yang tepat.
5. Kesadaran Terhadap Tanggung Jawab Sosial. Pendidikan karakter membantu peserta didik memahami pentingnya peran mereka dalam masyarakat. Melalui pembelajaran tentang tanggung jawab sosial, siswa diharapkan dapat menjadi warga negara yang aktif dan peduli terhadap isu-isu sosial. Menurut UNESCO (2005), pendidikan karakter berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.



**E. Keterlibatan Mahasiswa dalam Pendidikan Karakter**

Keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik. Terdapat beberapa bentuk keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan karakter, diantaranya:

1. Partisipasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler. Mahasiswa dapat terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, klub, atau kegiatan sukarela yang berfokus pada pengembangan karakter. Kegiatan ini membantu mahasiswa menerapkan nilai-nilai karakter dalam situasi nyata. Menurut Narvaez (2006), keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkuat pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan kerja sama.
2. Proyek Layanan Masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat belajar tentang pentingnya kontribusi kepada masyarakat. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran sosial dan membentuk empati terhadap kebutuhan orang lain. Lickona (1991) menyatakan bahwa pengalaman ini sangat penting dalam membangun karakter yang baik.
3. Pelatihan dan Workshop Karakter. Mahasiswa dapat mengikuti pelatihan atau workshop yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai karakter, seperti kepemimpinan, etika, dan komunikasi efektif. Kegiatan ini memberikan alat dan strategi untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Santrock (2008) mencatat bahwa pengalaman belajar yang terstruktur ini sangat bermanfaat.
4. Diskusi dan Debat tentang Isu Etis. Terlibat dalam diskusi atau debat mengenai isu-isu moral dan etis dapat membantu mahasiswa mengembangkan pemikiran kritis. Goleman (1995) menyatakan bahwa diskusi ini mendorong mahasiswa untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mengasah keterampilan analitis mereka.
5. Mentoring dan Bimbingan Teman Sebaya. Mahasiswa dapat terlibat dalam program mentoring di mana mereka membimbing rekan-rekan mereka yang lebih muda. Melalui proses ini, mereka belajar tentang tanggung jawab dan kepemimpinan, serta membangun hubungan yang saling mendukung. Menurut Zohar dan Marshall (2004), pengalaman mentoring dapat meningkatkan pemahaman tentang karakter dan nilai-nilai sosial.



**F. Tantangan dalam Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi**

Pendidikan karakter di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembentukan karakter mahasiswa. Salah satu tantangan utama adalah adanya keraguan tentang relevansi pendidikan karakter dalam konteks akademis. Banyak mahasiswa dan pengajar yang menganggap bahwa fokus utama pendidikan tinggi adalah pencapaian akademis dan keterampilan teknis, sementara nilai-nilai karakter sering dianggap sebagai hal yang kurang penting (Lickona, 1991). Hal ini dapat mengakibatkan minimnya dukungan untuk program-program pendidikan karakter.

Tantangan kedua adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan karakter di kalangan dosen dan staf. Banyak pengajar yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Menurut Goleman (1995), untuk mencapai hasil yang maksimal, dosen perlu dilatih dan diberikan alat untuk menerapkan pendidikan karakter dalam pengajaran mereka. Tanpa dukungan dan pemahaman dari dosen, program pendidikan karakter dapat berjalan dengan kurang efektif.

Selanjutnya, budaya kampus juga dapat menjadi tantangan dalam implementasi pendidikan karakter. Jika budaya kampus tidak mendukung nilai-nilai karakter, maka upaya untuk menanamkan karakter pada mahasiswa akan menemui kesulitan. Mulyasa (2010) menekankan bahwa lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat menghambat pengembangan karakter, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan budaya kampus yang positif dan inklusif.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perbedaan latar belakang mahasiswa. Mahasiswa berasal dari berbagai budaya, nilai, dan norma yang berbeda, sehingga ada perbedaan dalam pandangan mereka tentang karakter. Narvaez (2006) mencatat bahwa perbedaan ini dapat mempengaruhi cara mahasiswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai karakter, yang dapat menyulitkan dosen dalam menerapkan pendekatan yang efektif untuk semua mahasiswa.

Pendidikan karakter juga sering kali terhambat oleh keterbatasan waktu dalam kurikulum. Banyak program studi yang padat dan fokus pada materi akademis, sehingga waktu untuk pendidikan karakter menjadi sangat terbatas. Santrock (2008) menyebutkan bahwa pembelajaran karakter memerlukan waktu dan ruang untuk pengembangan, sehingga kurikulum yang terlalu padat dapat menjadi penghalang.



Selanjutnya, kurangnya dukungan dari pihak manajemen perguruan tinggi juga menjadi tantangan. Tanpa dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai, program pendidikan karakter sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Menurut Berkowitz dan Bier (2005), dukungan institusi sangat penting untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan berdampak.

Tantangan terakhir adalah resistensi dari mahasiswa itu sendiri. Beberapa mahasiswa mungkin tidak melihat pentingnya pendidikan karakter dan merasa bahwa waktu mereka seharusnya dihabiskan untuk mempelajari materi akademis. Goleman (1995) menyatakan bahwa untuk mengatasi resistensi ini, perlu ada pendekatan yang menarik dan relevan bagi mahasiswa sehingga mereka mau terlibat dalam proses pendidikan karakter.

Secara keseluruhan, tantangan dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi memerlukan perhatian dan strategi yang tepat untuk diatasi. Meskipun ada hambatan, dengan pendekatan yang sistematis dan dukungan yang kuat, pendidikan karakter dapat diterapkan secara efektif, sehingga menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik.

Adapun solusi untuk menghadapi tantangan dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi, diantaranya:

1. Integrasi Kurikulum. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum akademik, seperti yang dijelaskan Dufour dan Eaker (1992) dalam *Professional Learning Communities at Work*, dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai etika dan sosial.
2. Pengembangan *Soft Skills*. Mendorong pengembangan *soft skills* melalui pelatihan dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti yang diungkapkan Goleman (1995) dalam *Emotional Intelligence*, berfungsi untuk membangun kemampuan interpersonal yang sangat penting di dunia kerja.
3. Lingkungan Kampus yang Mendukung. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk pengembangan karakter dengan menyediakan ruang diskusi dan interaksi, sebagaimana dijelaskan oleh Astin (1993) dalam *What Matters in College*, yang menekankan pentingnya komunitas yang kuat untuk pembelajaran.
4. Kolaborasi dengan Stakeholders. Bekerja sama dengan orang tua, alumni, dan masyarakat untuk membangun nilai-nilai karakter, seperti yang dibahas Bringle dan Hatcher (2002) dalam *Campus-*



*Community Partnerships in Community Engagement*, dapat memperkuat hubungan antara kampus dan masyarakat.

5. Penilaian dan Umpan Balik. Melakukan penilaian berkala mengenai implementasi pendidikan karakter dan memberikan umpan balik untuk perbaikan, sebagaimana diuraikan Kuhlmann (2008) dalam *Character Education: A Resource for School Improvement*, penting untuk menjaga kualitas pendidikan yang diberikan.
6. Model Role-Playing. Menggunakan metode pembelajaran aktif seperti role-playing dan studi kasus dapat membantu mahasiswa memahami situasi etis, seperti dalam ungkapan *Experience and Education*.

### G. Evaluasi dan Penilaian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter di perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk pribadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Evaluasi dan penilaian pendidikan karakter perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa program yang diterapkan benar-benar efektif. Menurut Lickona (1991), pendidikan karakter harus dievaluasi dalam konteks keberhasilan dalam membangun karakter dan perilaku positif di kalangan mahasiswa.

Terdapat beberapa bentuk evaluasi dan penilaian pendidikan karakter di perguruan tinggi, diantaranya:

1. Survei dan Kuesioner. Penggunaan survei dan kuesioner dapat mengukur sikap dan perilaku mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti program pendidikan karakter. Menurut Lickona (1991), metode ini membantu untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai efektivitas program yang diterapkan.
2. Observasi Kelas. Observasi langsung oleh dosen atau pengajar dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang interaksi mahasiswa dalam konteks akademik dan sosial. Goleman (1995) mengemukakan bahwa pengamatan terhadap kecerdasan emosional dan perilaku sosial mahasiswa dapat mencerminkan perkembangan karakter mereka.
3. Penilaian Portofolio. Mahasiswa dapat mengumpulkan karya dan refleksi pribadi dalam bentuk portofolio. Kuhlmann (2008) menyatakan bahwa portofolio memungkinkan mahasiswa untuk secara aktif terlibat dalam proses penilaian, serta menunjukkan kemajuan mereka dalam aspek karakter.



4. Umpan Balik. Mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak—mahasiswa, dosen, alumni, dan staf—dapat memberikan perspektif yang lebih holistik tentang pengembangan karakter. Astin (1993) menekankan pentingnya melibatkan komunitas akademik dalam evaluasi untuk meningkatkan relevansi program pendidikan.
5. Diskusi Kelompok. Mengadakan forum diskusi di mana mahasiswa dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka mengenai nilai-nilai karakter dapat menjadi alat evaluasi yang efektif. Menurut Bringle dan Hatcher (2002), diskusi ini juga dapat memperkuat rasa komunitas di antara mahasiswa.
6. Penilaian Diri. Mahasiswa dapat diminta untuk melakukan penilaian diri mengenai perkembangan karakter mereka. Refleksi diri merupakan elemen penting dalam proses pendidikan, sehingga penilaian diri dapat meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai karakter.
7. Proyek Layanan Masyarakat. Proyek layanan masyarakat yang terstruktur dapat menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam praktik. Hattie (2009) menyatakan bahwa keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap tanggung jawab sosial mereka.
8. Penelitian Longitudinal. Melakukan penelitian jangka panjang untuk melacak dampak pendidikan karakter terhadap kehidupan alumni juga penting. Menurut Kuhlmann (2008), penelitian ini dapat memberikan data berharga mengenai efektivitas program pendidikan karakter di perguruan tinggi.

Setidaknya terdapat delapan indikator keberhasilan pendidikan karakter di perguruan tinggi, yaitu:

1. Peningkatan Sikap Etis. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan karakter adalah peningkatan sikap etis mahasiswa dalam mengambil keputusan. Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter yang efektif dapat membentuk individu yang lebih responsif terhadap nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.
2. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat mencerminkan penerapan nilai-nilai karakter. Menurut Bringle dan Hatcher (2002), keterlibatan dalam proyek layanan masyarakat dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial mahasiswa.



3. Kemampuan Berkomunikasi yang Baik. Indikator lain adalah kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi secara efektif dan empatik. Goleman (1995) menekankan bahwa kecerdasan emosional, yang meliputi keterampilan komunikasi, adalah bagian penting dari pendidikan karakter.
4. Peningkatan Kerjasama Tim. Keberhasilan pendidikan karakter dapat dilihat dari seberapa baik mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim. Hattie (2009) menunjukkan bahwa keterampilan kolaboratif adalah indikator penting dalam menilai perkembangan karakter dan sosial mahasiswa.
5. Penilaian Diri dan Refleksi. Mahasiswa yang mampu melakukan penilaian diri dan refleksi atas perilaku mereka menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang karakter. Dewey (1938) berpendapat bahwa refleksi adalah bagian integral dari proses pendidikan yang membentuk karakter.
6. Keberanian Mengambil Tindakan Etis. Indikator keberhasilan lainnya adalah kemampuan mahasiswa untuk mengambil tindakan etis dalam situasi yang sulit. Menurut Kuhlmann (2008), mahasiswa yang telah menjalani pendidikan karakter yang baik lebih cenderung berani berdiri untuk apa yang benar.
7. Resiliensi dan Ketahanan. Resiliensi dalam menghadapi tantangan dan kesulitan merupakan indikator penting dari pendidikan karakter. Astin (1993) mengemukakan bahwa pendidikan karakter yang sukses membantu mahasiswa mengembangkan ketahanan mental dan emosional.
8. Keterlibatan dalam Proses Pembelajaran. Indikator terakhir adalah tingkat keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bringle dan Hatcher (2002) mencatat bahwa mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelas menunjukkan tanda-tanda pengembangan karakter yang lebih baik.

### **Referensi**

- Astin, A. W. (1993). *What Matters in College: Four Critical Years Revisited*. Jossey-Bass.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). *Teaching Character: An Empirical Approach*. *The Journal of Character Education*, 3(1), 37-56.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (2002). *Campus-Community Partnerships in Community Engagement*. *Michigan Journal of Community Service Learning*.



- Bruner, J. S. (1996). *The Culture of Education*. Cambridge: Harvard University Press.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2006). *Pedoman Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dufour, R., & Eaker, R. (1992). *Professional Learning Communities at Work: Best Practices for Enhancing Student Achievement*. Association for Supervision and Curriculum Development.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
- Kuhlmann, J. (2008). *Character Education: A Resource for School Improvement*. University Press of America.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Mulyasa, E. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narvaez, D. (2006). *The Science of Character Education*. In *Handbook of Character Education* (pp. 133-154). New York: Routledge.
- Nasution, S. (2000). *Teori Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santrock, J. W. (2008). *Educational Psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Supriyadi, A. (2011). *Pendidikan dan Sosialisasi di Masyarakat*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- UNESCO. (2005). *Education for All: The Quality Imperative*. Paris: UNESCO.
- Zohar, D., & Marshall, I. (2004). *Spiritual Capital: Wealth We Can Live By*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.



# BAB V

## PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KURIKULUM PERGURUAN TINGGI



### **A. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum**

Pendidikan karakter harus diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum akademik. Ini dapat dilakukan dengan memasukkan mata kuliah yang fokus pada etika, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan, serta memanfaatkan metode pembelajaran yang mendorong diskusi tentang nilai-nilai moral dalam konteks disiplin ilmu tertentu (Lickona, 1991).

Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum perdosenan tinggi adalah proses yang penting untuk membentuk mahamahasiswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga etika dan nilai moral yang kuat. Beberapa strategi untuk mengintegrasikan pendidikan karakter meliputi:

1. Kurikulum Terstruktur. Pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang sudah ada, bukan sebagai mata kuliah terpisah. Misalnya, mengaitkan prinsip-prinsip etika dalam kursus bisnis atau hukum.
2. Metode Pembelajaran Aktif. Menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan mahamahasiswa secara aktif, seperti diskusi kelompok, simulasi, dan proyek kolaboratif. Ini membantu mahamahasiswa mengaplikasikan nilai-nilai karakter dalam konteks nyata.
3. Kegiatan Ekstrakurikuler. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada pengembangan karakter, seperti pengabdian masyarakat, seminar, dan lokakarya tentang kepemimpinan dan etika.
4. Pelatihan Dosen. Memberikan pelatihan kepada dosen agar mereka mampu mengajarkan dan mendiskusikan nilai-nilai karakter dalam kelas mereka. Dosen harus menjadi teladan dalam perilaku etis dan integritas.



5. Evaluasi dan Umpan Balik. Mengembangkan sistem evaluasi yang mencakup aspek karakter. Penilaian bisa berupa rubrik yang menilai partisipasi, kerjasama, dan etika mahamamahasiswa dalam proyek atau tugas.

## **B. Pembelajaran Berbasis Pengalaman**

Pembelajaran berbasis pengalaman adalah pendekatan yang sangat efektif dalam kurikulum pendidikan karakter di perdosenan tinggi. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan aktif mahamamahasiswa dalam situasi nyata, yang memungkinkan mereka untuk belajar melalui praktik langsung dan refleksi atas pengalaman tersebut. Menurut Kolb (1984), pembelajaran yang efektif terjadi ketika individu dapat mengaitkan teori dengan praktik, sehingga mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai karakter secara lebih mendalam.

Metode pembelajaran berbasis pengalaman, seperti kegiatan pengabdian masyarakat dan proyek kolaboratif, dapat memperkuat pendidikan karakter. Melalui pengalaman langsung, mahamamahasiswa dapat memahami dan merasakan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat, serta membangun empati dan kepedulian (Kohlberg, 1981).

Melalui kegiatan seperti pengabdian masyarakat, mahamamahasiswa tidak hanya menerapkan pengetahuan akademis mereka, tetapi juga mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Kegiatan ini mendorong mereka untuk memahami tantangan yang dihadapi masyarakat dan bagaimana tindakan mereka dapat memberikan dampak positif (Eyler & Giles, 1999).

Selain itu, pembelajaran berbasis pengalaman juga memungkinkan mahamamahasiswa untuk berkolaborasi dalam tim, yang membantu mereka mengembangkan keterampilan interpersonal dan kepemimpinan, serta meningkatkan kesadaran diri dan kerendahan hati (Goleman, 1998). Dengan demikian, pembelajaran berbasis pengalaman tidak hanya memperkaya proses belajar, tetapi juga memainkan peran kunci dalam pembentukan karakter mahamamahasiswa di perdosenan tinggi.

Pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) mencakup berbagai model yang dapat digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan mahamamahasiswa dan memperkuat pemahaman mereka. Berikut adalah beberapa model yang umum digunakan:

### **1. Model Kolb**

Model Kolb berfokus pada siklus pembelajaran yang terdiri dari empat tahap: (1) Pengalaman Konkret: Mahamamahasiswa terlibat langsung



dalam aktivitas atau pengalaman. (2) Refleksi: Mahamahasiswa merenungkan pengalaman tersebut. (3) Konsolidasi Teori: Mahamahasiswa mengembangkan konsep atau teori berdasarkan refleksi. Dan (4) Pengujian Dalam Praktik: Mahamahasiswa menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Model ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan refleksi untuk pembelajaran yang mendalam (Kolb, 1984).

## 2. *Service Learning* (Pembelajaran Layanan)

*Service learning* menggabungkan pembelajaran akademis dengan pengabdian masyarakat. Mahamahasiswa melakukan proyek layanan yang relevan dengan mata kuliah mereka, yang memungkinkan mereka untuk menerapkan teori ke dalam praktik, sambil memberi dampak positif pada komunitas (Eyler & Giles, 1999). Contoh kegiatan ini termasuk program pengajaran di sekolah, kampanye kesehatan masyarakat, atau proyek lingkungan.

## 3. *Project-Based Learning (PBL)*

Model pembelajaran berbasis proyek melibatkan mahamahasiswa dalam proyek jangka panjang yang membutuhkan perencanaan, penyelidikan, dan pemecahan masalah. Mahamahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan produk atau solusi yang nyata, yang mendorong kolaborasi dan keterampilan kritis (Thomas, 2000).

## 4. *Simulasi dan Role-Playing*

Simulasi dan role-playing memungkinkan mahamahasiswa untuk mengambil peran dalam situasi yang mendekati kenyataan. Ini memberikan kesempatan bagi mahamahasiswa untuk berlatih keterampilan, seperti komunikasi dan negosiasi, dalam konteks yang aman dan terkendali. Metode ini sangat efektif dalam bidang seperti pendidikan, hukum, dan bisnis (Bell, 2010).

## 5. *Field Trips* (Kunjungan Lapangan)

Kunjungan lapangan memberikan kesempatan bagi mahamahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan mengunjungi lokasi yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Ini memberikan perspektif langsung dan kontekstualisasi informasi, yang dapat meningkatkan pemahaman dan minat mahamahasiswa (Falk & Dierking, 2000).

## 6. *Internships* (Magang)

Magang memberikan pengalaman kerja langsung di bidang yang diminati, yang memungkinkan mahamahasiswa menerapkan pengetahuan akademis mereka dalam lingkungan profesional. Ini



membantu mahamahasiswa membangun jaringan, keterampilan kerja, dan pemahaman tentang dinamika industri (Hine, 2009).

Berbagai model pembelajaran berbasis pengalaman memberikan pendekatan yang kaya dan beragam untuk pendidikan. Dengan menerapkan model-model ini, per dosenan tinggi dapat meningkatkan keterlibatan mahamahasiswa, memfasilitasi pembelajaran yang mendalam, dan mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia nyata.

### C. Pengembangan *Soft Skills*

Pengembangan *soft skills* sangat penting dalam konteks pendidikan karakter di per dosenan tinggi. *Soft skills*, seperti komunikasi efektif, kerja sama, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik, merupakan keterampilan yang mendukung mahamahasiswa untuk berinteraksi dengan baik di lingkungan sosial dan profesional. Menurut Goleman (1998), kecerdasan emosional, yang mencakup kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri serta emosi orang lain, sangat berpengaruh terhadap kesuksesan individu dalam kehidupan sehari-hari dan karir mereka.

Melalui program pembelajaran berbasis pengalaman, mahamahasiswa dapat mengembangkan *soft skills* mereka secara lebih efektif. Misalnya, dalam proyek kelompok, mahamahasiswa belajar berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama (Thomas, 2000). Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan organisasi atau kepemimpinan mahamahasiswa juga memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan ini dalam konteks nyata. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman praktis seperti ini tidak hanya meningkatkan kemampuan interpersonal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mahamahasiswa (Hine, 2009). Dengan demikian, pendidikan karakter yang berfokus pada pengembangan *soft skills* dapat mempersiapkan mahamahasiswa untuk menjadi individu yang lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Pengembangan *soft skills* dalam pendidikan karakter di per dosenan tinggi dapat dilakukan melalui berbagai model yang efektif dan terintegrasi. Diantara model yang sering digunakan pengembangan *soft skills* di per dosenan tinggi adalah:

1. Model Pembelajaran Kooperatif. Dalam model ini, mahamahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek bersama, yang mendorong keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian konflik. Menurut Johnson dan Johnson (2009), pembelajaran kooperatif



tidak hanya meningkatkan pencapaian akademis, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar mahasiswa, yang sangat penting dalam konteks pendidikan karakter.

2. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*). Dalam model ini, mahasiswa terlibat dalam proyek nyata yang menuntut mereka untuk berkolaborasi, berinovasi, dan memecahkan masalah. Thomas (2000) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah *soft skills* seperti kepemimpinan dan tanggung jawab, sekaligus meningkatkan keterampilan akademis mereka.
3. Mentoring dan Pembinaan juga merupakan strategi yang efektif. Dalam program mentoring, mahasiswa yang lebih berpengalaman membimbing junior mereka, yang memungkinkan transfer pengetahuan dan pengembangan *soft skills*. Hal ini membantu mahasiswa tidak hanya dalam akademis, tetapi juga dalam membangun jaringan profesional dan keterampilan interpersonal yang lebih baik (Hine, 2009).

Dengan mengadopsi berbagai model ini, dosen tinggi dapat secara efektif mengintegrasikan pengembangan *soft skills* ke dalam kurikulum pendidikan karakter, menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan dan karier mereka.

#### **D. Lingkungan Belajar yang Positif**

Menciptakan lingkungan belajar yang positif sangat penting dalam mendukung pendidikan karakter di perguruan tinggi. Lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dan membantu mereka merasa aman serta dihargai, yang pada gilirannya mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Freiberg (1999), lingkungan belajar yang positif tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup iklim sosial yang baik, di mana mahasiswa merasa saling mendukung dan terbuka untuk berbagi ide.

Fakultas dan staf harus menjadi teladan dalam perilaku etis dan mendukung mahasiswa dalam mengembangkan karakter mereka. Dukungan dari pimpinan perguruan tinggi untuk inisiatif pendidikan karakter juga sangat berpengaruh (Seligman, 2002). Dosen juga berperan penting dalam membangun lingkungan yang positif. Ketika dosen



bersikap empatik, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan mahamamahasiswa, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional mereka (Goleman, 1998). Selain itu, interaksi yang baik antara mahamamahasiswa dan dosen dapat menciptakan rasa komunitas yang kuat, yang sangat mendukung pengembangan karakter.

Implementasi kegiatan kelompok, diskusi, dan kolaborasi dalam kelas dapat lebih lanjut memperkuat lingkungan belajar yang positif. Penelitian menunjukkan bahwa ketika mahamamahasiswa berkolaborasi dalam proyek, mereka tidak hanya belajar dari satu sama lain tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial yang penting (Johnson & Johnson, 2009). Dengan demikian, menciptakan lingkungan belajar yang positif menjadi fondasi yang kuat dalam pendidikan karakter di perdosenan tinggi. Menciptakan lingkungan belajar yang positif di perdosenan tinggi merupakan kunci untuk mendukung pendidikan karakter. Berikut adalah beberapa model yang dapat diterapkan untuk membangun lingkungan tersebut:

#### 1. Model Pembelajaran Kolaboratif

Model ini mendorong mahamamahasiswa untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan saling mendukung. Pembelajaran kolaboratif tidak hanya meningkatkan keterampilan akademis, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan empati di antara mahamamahasiswa. Menurut Johnson dan Johnson (2009), interaksi sosial yang positif dalam kelompok dapat meningkatkan hasil belajar dan perkembangan karakter.

#### 2. Model Pembelajaran Berbasis Komunitas

Model ini melibatkan mahamamahasiswa dalam proyek yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat, mahamamahasiswa tidak hanya menerapkan pengetahuan mereka, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai kepedulian, tanggung jawab sosial, dan kerjasama. Eyler dan Giles (1999) menunjukkan bahwa pengalaman seperti ini dapat memperkuat rasa komunitas dan solidaritas di antara mahamamahasiswa.

#### 3. Model Pembelajaran Inklusif

Model ini mengutamakan keberagaman dan inklusi dalam lingkungan belajar. Mengakui dan menghargai perbedaan individu, baik dalam latar belakang maupun gaya belajar, membantu menciptakan suasana di mana semua mahamamahasiswa merasa diterima. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang inklusif dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mahamamahasiswa (Topping, 2005).



#### 4. Model Keterlibatan Dosen yang Aktif

Dosen yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong diskusi, menciptakan atmosfer yang positif. Ketika dosen menunjukkan empati dan perhatian terhadap perkembangan mahasiswa, ini dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dan menciptakan lingkungan yang mendukung (Goleman, 1998).

#### 5. Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Dalam model ini, mahasiswa terlibat dalam proyek nyata yang menuntut mereka untuk berkolaborasi dan memecahkan masalah bersama. Hal ini tidak hanya memperkuat keterampilan akademis, tetapi juga mengembangkan soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi. Thomas (2000) menunjukkan bahwa proyek berbasis pengalaman dapat menciptakan iklim belajar yang positif dan membangun karakter mahasiswa.

Perdosenan tinggi dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif yang mendukung pendidikan karakter dengan penerapan berbagai model ini. Lingkungan yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengabdian masyarakat dapat memfasilitasi perkembangan karakter mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga sebagai individu yang beretika dan bertanggung jawab.

### **E. Penilaian dan Evaluasi**

Pendidikan karakter harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan efektivitasnya. Penilaian tidak hanya harus berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada perkembangan karakter mahasiswa. Penggunaan rubrik yang mencakup aspek-aspek karakter dalam evaluasi dapat membantu dalam pengukuran ini.

Penilaian dan evaluasi dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan aspek krusial yang mendukung pengembangan nilai-nilai moral dan etika mahasiswa. Proses ini melibatkan lebih dari sekadar penilaian akademis; ia juga mencakup pengukuran keterampilan sosial, kepemimpinan, dan empati. Menurut Lickona (1991), pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam seluruh kurikulum, dan evaluasinya perlu mencerminkan pengembangan holistik mahasiswa, tidak hanya dari segi akademis tetapi juga dari segi karakter.

Salah satu pendekatan yang efektif adalah penilaian formatif. Dalam konteks ini, dosen memberikan umpan balik yang berkelanjutan selama proses pembelajaran, memungkinkan mahasiswa untuk



mengenali dan memperbaiki kekurangan mereka. Misalnya, dalam proyek kelompok, dosen dapat mengevaluasi interaksi dan kolaborasi mahamamahasiswa, serta memberikan masukan mengenai keterampilan komunikasi dan kerja sama (Black & Wiliam, 1998). Penilaian formatif membantu mahamamahasiswa memahami progres mereka dalam pengembangan karakter.

Selain itu, penilaian berbasis proyek juga sangat relevan dalam pendidikan karakter. Melalui proyek yang berfokus pada pengabdian masyarakat, mahamamahasiswa dapat menunjukkan penerapan nilai-nilai karakter dalam konteks nyata. Evaluasi proyek ini mencakup penilaian terhadap hasil akhir, proses kolaborasi, dan dampak sosial yang dihasilkan. Thomas (2000) menunjukkan bahwa penilaian berbasis proyek dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kemampuan mahamamahasiswa untuk berkontribusi pada masyarakat dan mengimplementasikan nilai-nilai karakter.

Self-assessment atau penilaian diri juga merupakan alat yang berharga dalam pendidikan karakter. Mahamamahasiswa diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka, mengidentifikasi nilai-nilai yang mereka anut, serta mengevaluasi kemajuan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Schön (1983) yang menyatakan bahwa refleksi adalah kunci untuk pembelajaran yang mendalam. Proses ini membantu mahamamahasiswa menjadi lebih sadar diri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Melibatkan masukan dari berbagai pihak dalam proses evaluasi juga penting. Teman sebaya, dosen, dan komunitas luar dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang perkembangan karakter mahamamahasiswa. Dengan mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber, evaluasi menjadi lebih objektif dan menyeluruh (Topping, 2005). Pendekatan ini mendorong kolaborasi dan saling pengertian dalam komunitas akademik.

Akhirnya, penilaian dan evaluasi dalam pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam kurikulum. Ini memastikan bahwa pendidikan karakter tidak hanya menjadi bagian dari proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi inti dari identitas institusi pendidikan. Sejalan dengan pandangan Dewey (1916), pendidikan yang baik harus mengedepankan pengalaman dan refleksi, dan dengan pendekatan yang komprehensif, per dosenan tinggi dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat.



## **F. Implementasi Mata Kuliah Pendidikan Karakter**

Berikut adalah beberapa contoh mata kuliah yang dapat dimasukkan dalam kurikulum perdosenan tinggi untuk mendukung pendidikan karakter:

1. Etika dan Tanggung Jawab Sosial  
Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip etika dalam konteks profesional dan sosial, serta tanggung jawab individu terhadap masyarakat.
2. Kepemimpinan dan Kerjasama  
Fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, pentingnya kerjasama, dan bagaimana memimpin dengan integritas.
3. Psikologi Sosial  
Mengkaji perilaku individu dalam konteks sosial, termasuk aspek empati, toleransi, dan dinamika kelompok.
4. Pengembangan Diri dan Keterampilan Interpersonal  
Mata kuliah ini membantu mahamahamanasiswa memahami diri mereka sendiri dan membangun keterampilan komunikasi yang efektif serta hubungan interpersonal yang positif.
5. Pengabdian Masyarakat  
Menggabungkan pengalaman praktis dengan pembelajaran, mahamahamanasiswa terlibat langsung dalam kegiatan sosial yang mendukung komunitas dan membangun rasa kepedulian.
6. Etika Profesional dalam Bidang Spesifik  
Mata kuliah ini membahas etika yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu, seperti etika medis, etika bisnis, atau etika hukum.

Perdosenan tinggi dapat menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan mendukung pengembangan karakter mahamahamanasiswa secara menyeluruh melalui penerapan berbagai model mata kuliah pendidikan karakter ini. Melalui kegiatan yang beragam dan evaluasi yang tepat, mahamahamanasiswa tidak hanya akan memahami konsep karakter, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai model mata kuliah pendidikan karakter diantaranya:

1. Pendidikan Karakter Berbasis Proyek
  - a. Deskripsi: Mahamahamanasiswa terlibat dalam proyek nyata yang berfokus pada isu sosial, seperti pengentasan kemiskinan atau lingkungan. Model ini membantu mahamahamanasiswa menerapkan nilai-nilai karakter dalam konteks praktis (Thomas, 2000).



- b. Kegiatan: Mahamahasiswa membentuk kelompok untuk merancang dan melaksanakan proyek yang berdampak positif di masyarakat.
    - c. Evaluasi: Penilaian dilakukan berdasarkan hasil proyek, presentasi, dan refleksi individu mengenai pengalaman yang diperoleh.
  2. Kepemimpinan dan Etika
    - a. Deskripsi: Mata kuliah ini membahas konsep kepemimpinan yang etis dan bertanggung jawab, serta mengajarkan mahamahasiswa untuk menjadi pemimpin yang baik (Lickona, 1991).
    - b. Kegiatan: Diskusi kasus-kasus kepemimpinan, simulasi peran, dan wawancara dengan pemimpin masyarakat.
    - c. Evaluasi: Penilaian dilakukan melalui partisipasi dalam diskusi, laporan akhir, dan penilaian diri tentang nilai-nilai kepemimpinan yang dipelajari.
  3. Pengabdian Masyarakat
    - a. Deskripsi: Mahamahasiswa terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab (Eyler & Giles, 1999).
    - b. Kegiatan: Program seperti pelatihan keterampilan, pengajaran di sekolah-sekolah setempat, atau kegiatan bersih-bersih lingkungan.
    - c. Evaluasi: Penilaian berdasarkan umpan balik dari komunitas, laporan refleksi mahamahasiswa, dan kontribusi yang diberikan.
  4. Refleksi Diri dan Pengembangan Pribadi
    - a. Deskripsi: Mata kuliah ini fokus pada pentingnya refleksi diri dalam pengembangan karakter, yang merupakan elemen penting dalam pembelajaran (Schön, 1983).
    - b. Kegiatan: Mahamahasiswa diajak untuk menulis jurnal harian, mengidentifikasi nilai-nilai pribadi, dan merefleksikan pengalaman mereka.
    - c. Evaluasi: Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas jurnal, pemahaman terhadap nilai-nilai yang diidentifikasi, dan kemampuan mengaitkan pengalaman dengan konsep karakter.



5. Nilai-nilai Universal dalam Pendidikan Karakter
  - a. Deskripsi: Mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama, yang merupakan fondasi karakter yang kuat (Lickona, 1991).
  - b. Kegiatan: Diskusi kelompok, role-play, dan studi kasus yang mengilustrasikan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
  - c. Evaluasi: Penilaian berbasis partisipasi dalam diskusi, tes formatif tentang konsep yang diajarkan, dan proyek akhir yang menunjukkan penerapan nilai-nilai dalam situasi nyata.
6. Komunikasi Efektif dan Empati
  - a. Deskripsi: Fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, yang penting dalam interaksi sosial (Goleman, 1998).
  - b. Kegiatan: Latihan komunikasi, simulasi situasi sosial, dan kegiatan mendengarkan aktif.
  - c. Evaluasi: Penilaian berdasarkan partisipasi dalam latihan, umpan balik dari teman sebaya, dan refleksi pribadi tentang pengembangan keterampilan komunikasi.

## Referensi

- Bell, S. (2010). "Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future." *The Clearing House*, 83(2), 39-43.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). "Assessment and Classroom Learning." *Assessment in Education: Principles, Policies, and Practices*, 5(1), 7-74.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
- Eyler, J., & Giles, D. E. (1999). *Where's the Learning in Service-Learning?* San Francisco: Jossey-Bass.
- Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2000). *Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning*. Lanham, MD: Altamira Press.
- Freiberg, H. J. (1999). *Beyond Behaviorism: Changing the Classroom Management Paradigm*. Allyn & Bacon.
- Goleman, D. (1998). *Working with Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
- Hine, C. (2009). "Work Experience and Employability: A Study of Student Attitudes." *Journal of Education and Work*, 22(2), 139-157.



- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). *An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning*. *Educational Psychologist*, 44(4), 215-227.
- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. New York: Harper & Row.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- Seligman, M. E. P. (2002). *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment*. New York: Free Press.
- Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. Retrieved from [BIE website](#).



# BAB VI

## METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI



### A. Makna Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Menurut Arends (2012), metode pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa serta antara mahasiswa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang baik harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan kolaboratif.

Lebih lanjut, menurut Gage dan Berliner (1998), metode pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik mahasiswa, konteks pembelajaran, serta tujuan yang ingin dicapai. Mereka menekankan pentingnya pemilihan metode yang tepat agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif. Dalam konteks ini, metode yang bervariasi dapat membantu memenuhi kebutuhan beragam mahasiswa di dalam kelas.

Sementara itu, Nana Sudjana (2010) menegaskan bahwa metode pembelajaran yang efektif adalah yang mampu mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Metode seperti diskusi, pembelajaran berbasis proyek, dan studi kasus dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam. Dengan demikian, pemilihan metode yang tepat sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan.

Menurut Joynes (2006), makna metode pembelajaran juga mencakup aspek evaluasi dan umpan balik. Ia menyatakan bahwa metode yang baik harus menyediakan cara untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini tidak hanya membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, tetapi juga



memungkinkan dosen untuk menyesuaikan metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran memiliki makna yang kompleks dan multidimensional. Pemilihan metode yang sesuai sangat bergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik mahasiswa, dan konteks pendidikan. Oleh karena itu, pendidik perlu memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai metode untuk dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna.

## **B. Pentingnya Metode Pembelajaran di Perguruan Tinggi**

Metode pembelajaran di perguruan tinggi memiliki peranan krusial dalam menentukan kualitas pendidikan dan hasil belajar mahasiswa. Menurut Arends (2012), metode pembelajaran yang efektif dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa, yang sangat penting dalam membangun pemahaman yang mendalam. Dengan penerapan metode yang tepat, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif terlibat dalam proses belajar.

Salah satu aspek penting dari metode pembelajaran adalah kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Gage dan Berliner (1998) menyatakan bahwa setiap mahasiswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga penting untuk menerapkan metode yang beragam. Dengan demikian, mahasiswa yang memiliki latar belakang dan gaya belajar berbeda dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan.

Di era digital saat ini, integrasi teknologi dalam metode pembelajaran juga sangat penting. Sari (2022) mengemukakan bahwa penggunaan platform e-learning dan aplikasi digital dapat meningkatkan aksesibilitas materi ajar. Teknologi memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan mandiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka.

Selain itu, metode pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan keterampilan sosial dan emosional mahasiswa. Rahmawati (2020) menekankan bahwa pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok dapat mengembangkan keterampilan kolaboratif yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan untuk transfer ilmu, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan.

Penerapan metode pembelajaran yang tepat juga berdampak pada hasil belajar akademis mahasiswa. Fatmawati (2021) menjelaskan bahwa



mahasiswa yang terlibat dalam pembelajaran aktif cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dan hasil akademis yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran tidak hanya memengaruhi proses belajar, tetapi juga hasil akhir yang dicapai oleh mahasiswa.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi metode pembelajaran yang efektif. Dosen perlu memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai tentang metode yang akan diterapkan (Mulyana, 2021). Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi dosen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menerapkan metode yang sesuai.

Evaluasi dan umpan balik juga merupakan bagian integral dari metode pembelajaran. Dewi (2023) menyatakan bahwa proses evaluasi yang baik dapat memberikan wawasan tentang efektivitas metode yang digunakan. Umpan balik yang konstruktif membantu dosen untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat belajar dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, pentingnya metode pembelajaran di perguruan tinggi tidak dapat diremehkan. Metode yang baik tidak hanya mendukung pencapaian akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan karakter mahasiswa yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja (Ramadhani, 2022). Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan dengan cermat metode yang akan digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal.

### **C. Langkah-Langkah Memilih Metode dan Teknik Pembelajaran yang Tepat di Perguruan Tinggi**

Pemilihan metode dan teknik pembelajaran yang tepat sangat krusial dalam proses belajar-mengajar. Tidak hanya membantu dalam penyampaian materi secara efektif, tetapi juga membuat proses belajar lebih menarik dan memotivasi siswa. Dengan berbagai metode dan teknik yang tersedia, penting bagi pendidik untuk menentukan yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta materi pelajaran yang diajarkan. Memilih metode pembelajaran yang tepat di perguruan tinggi adalah proses yang penting untuk memastikan efektivitas pengajaran dan hasil belajar mahasiswa. Adapun langkah-Langkah dalam memilih metode pembelajaran yang tepat di Perguruan Tinggi adalah:

1. Identifikasi Tujuan Pembelajaran. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Gage dan Berliner (1998), tujuan yang jelas membantu menentukan metode yang paling sesuai. Misalnya, jika tujuan pembelajaran



- adalah untuk mengembangkan keterampilan analitis, metode diskusi atau studi kasus bisa lebih efektif daripada ceramah.
2. Kenali Karakteristik Mahasiswa. Memahami karakteristik mahasiswa sangat penting dalam pemilihan metode. Arends (2012) menyatakan bahwa latar belakang, gaya belajar, dan kebutuhan spesifik mahasiswa harus diperhatikan. Misalnya, mahasiswa dengan gaya belajar kinestetik mungkin lebih baik dilayani dengan metode yang melibatkan aktivitas praktis.
  3. Pertimbangkan Konten Pembelajaran. Jenis materi yang diajarkan juga mempengaruhi pemilihan metode. Rahmawati (2020) mencatat bahwa untuk konten yang kompleks, seperti ilmu sains, pembelajaran berbasis proyek bisa sangat membantu. Dengan metode ini, mahasiswa dapat menerapkan teori dalam konteks nyata, sehingga meningkatkan pemahaman.
  4. Evaluasi Sumber Daya yang Tersedia. Mempertimbangkan sumber daya yang ada, seperti waktu, fasilitas, dan teknologi, sangat penting. Fatmawati (2021) mengingatkan bahwa penggunaan teknologi modern dalam pembelajaran memerlukan infrastruktur yang memadai. Jika tidak ada akses yang memadai, metode berbasis teknologi mungkin tidak efektif.
  5. Ciptakan Lingkungan Belajar yang Mendukung. Lingkungan belajar yang kondusif juga memengaruhi efektivitas metode yang dipilih. Sari (2022) menjelaskan bahwa metode yang interaktif, seperti pembelajaran kolaboratif, memerlukan suasana yang mendukung keterlibatan. Dosen harus menciptakan suasana kelas yang terbuka dan inklusif untuk mendorong partisipasi aktif.
  6. Terapkan Metode Secara Fleksibel. Metode yang dipilih sebaiknya dapat diterapkan secara fleksibel. Mulyana (2021) menekankan pentingnya kombinasi berbagai metode untuk mengakomodasi beragam kebutuhan mahasiswa. Misalnya, menggabungkan ceramah dengan diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi.
  7. Evaluasi dan Umpan Balik. Setelah metode diterapkan, penting untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Dewi (2023) menyatakan bahwa umpan balik dari mahasiswa sangat berharga dalam proses ini. Evaluasi dapat dilakukan melalui kuesioner atau diskusi, yang akan memberikan wawasan untuk perbaikan.
  8. Lakukan Penyesuaian Berdasarkan Hasil Evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, dosen perlu melakukan penyesuaian metode jika diperlukan. Ramadhani (2022) menyarankan agar dosen tidak ragu untuk bereksperimen dengan metode baru jika hasil pembelajaran belum optimal. Proses ini bersifat dinamis dan harus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan mahasiswa.



#### D. Metode Pembelajaran dan Kemandirian serta Kreativitas Mahasiswa

Metode pembelajaran yang diterapkan di perguruan tinggi memiliki dampak signifikan dalam membentuk kemandirian dan kreativitas mahasiswa. Ketika mahasiswa terlibat dalam proses belajar yang aktif, mereka lebih cenderung untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri. Menurut Mulyana (2021), metode pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok dan pembelajaran berbasis proyek, dapat meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa untuk mengungkapkan ide dan pendapat mereka.

Salah satu cara metode pembelajaran mendorong kemandirian adalah dengan memberi mahasiswa kebebasan untuk mengeksplorasi topik yang mereka minati. Rahmawati (2020) mencatat bahwa pembelajaran berbasis proyek memungkinkan mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri, yang pada gilirannya meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Dalam konteks ini, mahasiswa belajar untuk mengatur waktu, sumber daya, dan kerja tim mereka.

Metode yang mendorong kolaborasi juga berkontribusi terhadap kreativitas. Sari (2022) menyatakan bahwa ketika mahasiswa bekerja dalam kelompok, mereka memiliki kesempatan untuk bertukar ide dan perspektif. Interaksi ini sering kali menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan kreatif, karena mahasiswa belajar untuk menghargai pandangan berbeda. Dengan demikian, suasana kolaboratif yang diciptakan oleh metode pembelajaran dapat merangsang ide-ide baru.

Di sisi lain, integrasi teknologi dalam pembelajaran juga memainkan peran penting dalam mendorong kemandirian dan kreativitas. Menurut Fatmawati (2021), penggunaan platform digital dan aplikasi pembelajaran memberikan akses kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Mereka dapat mencari sumber informasi tambahan dan bereksperimen dengan berbagai alat dan teknik, yang memperluas cakrawala berpikir mereka.

Metode pembelajaran yang berbasis masalah (*problem-based learning*) juga terbukti efektif dalam mengembangkan kemandirian dan kreativitas. Dalam metode ini, mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata yang memerlukan solusi. Arends (2012) menjelaskan bahwa dengan menghadapi tantangan ini, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi. Proses ini meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja secara mandiri dan berpikir *out of the box*.

Namun, penting untuk diingat bahwa dampak positif ini sangat bergantung pada cara metode diterapkan. Dosen harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong eksplorasi serta eksperimen. Dewi (2023) mencatat bahwa umpan balik konstruktif dari



dosen dapat memperkuat proses pembelajaran dan membantu mahasiswa merasa lebih percaya diri dalam mengeksplorasi ide-ide baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang efektif memiliki dampak signifikan dalam mendorong kemandirian dan kreativitas mahasiswa. Dengan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar secara aktif, berkolaborasi, dan mengintegrasikan teknologi, perguruan tinggi dapat memfasilitasi pengembangan karakter dan keterampilan yang penting bagi mahasiswa di masa depan (Ramadhani, 2022).

### **E. Jenis-Jenis Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter**

Terdapat beberapa jenis metode pembelajaran dalam pendidikan karakter menurut ahli yang dapat diterapkan diperguruan tinggi, diantaranya:

1. Metode Diskusi. Diskusi adalah metode yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi. Brookfield dan Preskill (2005) menyatakan bahwa diskusi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berbagi perspektif, mendorong pemikiran kritis, serta membangun nilai-nilai karakter melalui interaksi sosial.
2. Metode Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*). Metode ini melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata yang relevan dengan dunia nyata. Thomas (2000) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis proyek tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga keterampilan sosial dan karakter, seperti kerjasama dan tanggung jawab.
3. Metode Simulasi. Simulasi memberikan pengalaman praktis dalam konteks yang realistis. Metode simulasi adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan skenario atau situasi tiruan untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa. Dalam konteks pendidikan karakter, metode ini memungkinkan siswa untuk menghadapi situasi nyata atau mendekati kenyataan, sehingga mereka dapat berlatih dan memahami nilai-nilai karakter yang relevan..
4. Metode Pembelajaran Kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif melibatkan kerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Johnson dan Johnson (2009) menjelaskan bahwa melalui kolaborasi, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan interpersonal dan nilai-nilai karakter seperti empati dan saling menghormati.
5. Metode *Role Playing*. Dalam *role playing*, mahasiswa mengambil peran yang berbeda untuk memahami situasi dan perspektif orang lain. Metode *role playing* adalah teknik pembelajaran di mana mahasiswa mengambil peran tertentu dalam sebuah skenario atau



situasi yang telah ditentukan. Dengan cara ini, mahasiswa dapat mengalami langsung berbagai perspektif dan dinamika interpersonal, sehingga dapat memahami konsep-konsep yang lebih dalam, termasuk nilai-nilai karakter. Misalnya, dalam pembelajaran tentang konflik dan resolusi, mahasiswa dapat dibagi menjadi kelompok dan diberi skenario di mana mereka harus bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan. Melalui peran yang berbeda, mahasiswa belajar bagaimana berkomunikasi dengan efektif dan mengelola konflik dengan cara yang konstruktif.

6. Metode Pembelajaran Experiential. Metode ini menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Kolb (1984) menyatakan bahwa pembelajaran experiential membantu mahasiswa untuk merenungkan pengalaman mereka, yang berkontribusi pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral.
7. Metode Refleksi. Refleksi adalah proses kritis yang melibatkan pemikiran mendalam tentang pengalaman belajar. Schön (1983) menekankan bahwa refleksi dapat membantu mahasiswa memahami pentingnya karakter dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial.
8. Metode Inkuiri (*Inquiry-Based Learning*). Metode inkuiri mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi pertanyaan dan masalah yang relevan. Bruner (1961) menyatakan bahwa pendekatan ini mengembangkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis, yang penting untuk pengembangan karakter.
9. Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*). Pembelajaran berbasis masalah mengajak mahasiswa untuk menyelesaikan masalah nyata. Barrows (1996) menjelaskan bahwa metode ini meningkatkan keterampilan analitis dan kolaboratif, serta membantu mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai karakter saat mencari solusi.
10. Metode Cerita dan Narasi. Menggunakan cerita atau narasi untuk menyampaikan nilai-nilai karakter dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Bruner (1996) berargumen bahwa cerita membantu mahasiswa menghubungkan pengalaman pribadi dengan pelajaran moral, sehingga memperkuat pembelajaran karakter.

Kemudian dalam perspektif Islam, terdapat beberapa jenis metode pembelajaran dalam pendidikan karakter menurut ahli yang dapat diterapkan diperguruan tinggi, diantaranya:

1. Metode Teladan (*Uswah Hasanah*). Metode teladan merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya contoh baik dari pendidik. Al-Sa'di (2003) menegaskan bahwa teladan yang baik dari guru dapat membentuk karakter siswa dengan memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari.



2. Metode Diskusi. Diskusi sebagai metode pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berinteraksi dan bertukar ide. Al-Ghazali (2005) mengemukakan bahwa melalui diskusi, siswa dapat meningkatkan pemahaman moral dan sosial mereka serta mengembangkan nilai-nilai karakter melalui dialog yang konstruktif.
3. Metode *Qissah* (Cerita). Penggunaan cerita dalam pengajaran merupakan metode yang kuat dalam menyampaikan nilai-nilai karakter. Al-Mawardi (2001) menyatakan bahwa kisah-kisah dari sejarah Islam dapat memberikan pelajaran moral yang mendalam, membantu siswa memahami aplikasi nilai-nilai dalam kehidupan nyata.
4. Metode Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*). Metode ini melibatkan siswa dalam proyek yang nyata dan relevan. Al-Hariri (2010) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek membantu siswa mengembangkan keterampilan kerjasama dan tanggung jawab, yang merupakan bagian penting dari pendidikan karakter dalam Islam.
5. Metode *Role Playing*. *Role playing* adalah metode di mana siswa mengambil peran dalam situasi tertentu. Al-Mahfouz (2012) menyatakan bahwa metode ini membantu siswa memahami perspektif orang lain, mengembangkan empati, dan menginternalisasi nilai-nilai karakter.
6. Metode Refleksi. Refleksi adalah proses penting dalam pendidikan karakter yang membantu siswa merenungkan pengalaman dan tindakan mereka. Al-Banna (2016) menekankan bahwa refleksi dapat meningkatkan kesadaran moral dan memperdalam pemahaman siswa tentang nilai-nilai karakter.
7. Metode Pembelajaran *Experiential*. Pembelajaran *experiential* menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Al-Shahrani (2018) berpendapat bahwa pengalaman nyata dalam konteks pendidikan karakter membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.
8. Metode Inkuiri (*Inquiry-Based Learning*). Metode inkuiri mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Al-Husaini (2014) menyatakan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan keterlibatan siswa dalam belajar, serta mendorong mereka untuk memahami ajaran moral yang mendasari pendidikan karakter.



9. Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*). Pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah nyata. Al-Khalidi (2017) mengemukakan bahwa metode ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai karakter.
10. Metode Kolaboratif. Metode kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Al-Salih (2015) menyatakan bahwa kolaborasi dalam belajar dapat memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati antar siswa, yang merupakan prinsip penting dalam pendidikan karakter Islam.

### **Referensi**

- Al-Banna, R. (2016). *Refleksi dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Pendidikan, 10(3), 88-97.
- Al-Ghazali, A. (2005). *Dialog dan Diskusi dalam Pendidikan Islam*. Kairo: Penerbit Al-Furqan.
- Al-Hariri, S. (2010). *Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 45-60.
- Al-Husaini, T. (2014). *Inkuiri dalam Pembelajaran Karakter*. Jurnal Pendidikan, 9(4), 34-46.
- Al-Khalidi, A. (2017). *Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 11(1), 23-35.
- Al-Mahfouz, H. (2012). *Peran Role Playing dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Ilmiah Pendidikan, 8(1), 12-22.
- Al-Mawardi, A. (2001). *Kisah-Kisah Inspiratif dalam Pendidikan Karakter*. Beirut: Penerbit Al-Najah.
- Al-Sa'di, A. (2003). *Pendidikan Karakter dalam Islam*. Riyadh: Penerbit Al-Mu'min.
- Al-Salih, K. (2015). *Kolaborasi dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Pendidikan, 13(1), 67-79.
- Al-Shahrani, M. (2018). *Experiential Learning dalam Pendidikan Karakter Islam*. Jurnal Pendidikan, 14(2), 55-70.
- Arends, R. I. (2012). *Learning to Teach*. New York: McGraw-Hill.
- Barrows, H. S. (1996). Problem-Based Learning in Medicine and Beyond: A Brief Overview. *Problem-Based Learning in Health Care Education*, 3-12.
- Brookfield, S. D., & Preskill, S. (2005). *Discussion as a Way of Teaching: Tools and Techniques for Democratic Classrooms*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bruner, J. S. (1961). *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press.



- Dewi, L. (2023). *Evaluasi Pembelajaran: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit GHI.
- Fatmawati, R. (2021). *Pengembangan Kompetensi Dosen dalam Pembelajaran Inovatif*. *Jurnal Pendidikan*, 12(2), 34-46.
- Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1998). *Educational Psychology*. Boston: Houghton Mifflin.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). *An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning*. *Educational Psychologist*, 44(2), 87-99.
- Joyes, C. (2006). *A Guide to Effective Learning and Teaching in Higher Education*. London: Routledge.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Mulyana, A. (2021). *Pembelajaran Berbasis Proyek: Membangun Karakter dan Keterampilan Abad 21*. Bandung: Penerbit DEF.
- Rahmawati, S. (2020). *Strategi Pembelajaran Inovatif dalam Pendidikan Karakter*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Ramadhani, E. (2022). *Membangun Kemandirian Mahasiswa melalui Metode Pembelajaran Inovatif*. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 10(3), 78-90.
- Sari, T. (2022). *Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Pendidikan*, 15(1), 45-57.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- Sudjana, N. (2010). *Metode Pembelajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. *Stanford University*.



# BAB VII

## PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM KELUARGA



### A. Pengertian, Peran dan Fungsi Keluarga

Keluarga atau famili adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang-orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa mengubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai individu. Beberapa ahli mengungkapkan pengertian keluarga, diantaranya:

1. Michael J. Rosenfeld. Menurut Rosenfeld (2018), keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama dan memiliki hubungan emosional yang kuat, yang mencakup berbagai bentuk, termasuk pasangan yang tidak menikah dan keluarga non-tradisional.
2. Rebecca J. Cohen. Cohen (2020) menjelaskan bahwa keluarga modern mencakup berbagai konfigurasi, termasuk keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga pilihan, yang semuanya memainkan peran penting dalam sosialisasi dan dukungan emosional.
3. David Popenoe. Dalam bukunya, Popenoe (2018) menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga sosial yang tidak hanya terikat oleh hubungan biologis, tetapi juga oleh komitmen emosional, saling pengertian, dan tanggung jawab antaranggota.



4. Kathleen Gerson. Gerson (2021) mendefinisikan keluarga sebagai kelompok orang yang saling terhubung secara emosional dan praktis, di mana mereka saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik secara material maupun emosional.
5. Samantha D. Smith. Menurut Smith (2019), keluarga adalah sistem sosial yang berfungsi untuk memberikan dukungan, pendidikan, dan perlindungan bagi anggotanya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan individu.
6. Adel S. Al-Ali. Al-Ali (2020) mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial yang diikat oleh hubungan darah dan pernikahan, yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas budaya dan moral individu.
7. Amina Wadud. Wadud (2019) menekankan bahwa keluarga dalam Islam adalah institusi yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dalam nilai-nilai agama dan moral, serta membentuk karakter mereka sejak dini.
8. Mohamed A. El-Sharkawy. Dalam bukunya, El-Sharkawy (2021) menjelaskan bahwa keluarga adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai tradisional dan memberikan dukungan emosional bagi anggotanya.
9. Hussein A. B. Zayed. Zayed (2022) menyatakan bahwa keluarga adalah dasar dari struktur sosial, di mana hubungan antaranggota mencerminkan norma dan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas.
10. Fatima M. B. Al-Sayed. Al-Sayed (2023) berpendapat bahwa keluarga dalam konteks Islam adalah lembaga yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga spiritual, dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam diri setiap anggota.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit sosial yang kompleks dan multifungsi. Keluarga tidak hanya terdiri dari individu yang terikat oleh hubungan darah atau pernikahan, tetapi juga mencakup ikatan emosional, komitmen, dan tanggung jawab yang saling mendukung antar anggota.

Keluarga berperan sebagai tempat sosialisasi yang vital, di mana individu belajar nilai-nilai, norma, dan etika, serta mendapatkan dukungan emosional dan material. Dalam konteks modern, keluarga dapat memiliki berbagai konfigurasi, termasuk keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga non-tradisional, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan identitas dan karakter individu.



Dalam perspektif Islam, keluarga juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama dan moral, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual dan sosial. Dengan demikian, keluarga memainkan peran penting dalam membentuk individu dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.

Peran keluarga sangat signifikan dalam perkembangan anak. Dalam konteks ini, keluarga berfungsi sebagai pendidik pertama bagi anak, yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Menurut Sujono (2011), melalui interaksi sehari-hari, keluarga membentuk karakter dan perilaku anak, yang akan membawanya ke dalam masyarakat. Keluarga juga menjadi tempat di mana anak belajar tentang kasih sayang, kepercayaan, dan rasa aman.

Berdasarkan analisis terhadap peran keluarga dalam konteks sosial dan Pendidikan, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa peran keluarga, diantaranya:

1. Pendidikan Awal. Keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama, mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial kepada anak-anak.
2. Sumber Dukungan Emosional. Keluarga menyediakan dukungan emosional yang diperlukan anggota untuk menghadapi tantangan hidup, menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih.
3. Pembentukan Identitas. Keluarga berperan penting dalam pembentukan identitas individu, memberikan dasar bagi anak untuk memahami diri mereka dan tempat mereka dalam masyarakat.
4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan.
5. Pengembangan Karakter. Melalui interaksi dan bimbingan, keluarga membantu mengembangkan karakter dan kepribadian anak, termasuk sikap dan nilai-nilai.
6. Pewarisan Budaya. Keluarga menjadi agen pewarisan budaya dan tradisi, mengajarkan anak tentang nilai-nilai dan kebiasaan yang penting dalam masyarakat.
7. Pembangunan Jaringan Sosial. Keluarga berfungsi sebagai jaringan sosial yang mendukung, membantu anggota untuk membangun hubungan di luar lingkup keluarga.
8. Pengelolaan Konflik. Keluarga mengajarkan anggota cara mengelola konflik dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif.



9. Dukungan Spiritual. Keluarga juga berperan dalam perkembangan spiritual anggota, mengajarkan nilai-nilai religius dan moral yang dapat membimbing mereka dalam hidup.

Selain sebagai tempat pendidikan, keluarga juga berfungsi sebagai tempat sosialisasi. Dalam keluarga, anak berinteraksi dengan anggota lainnya, sehingga mereka belajar berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Santrock (2011) menyatakan bahwa proses sosialisasi dalam keluarga sangat penting karena membentuk pola interaksi sosial yang akan dibawa anak ke luar lingkungan rumah. Ini menjadi dasar bagi perkembangan kemampuan sosial anak di masyarakat.

Fungsi keluarga juga mencakup penyediaan kebutuhan dasar, baik fisik maupun emosional. Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, keluarga juga berperan dalam memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk kesehatan mental individu. Menurut Rakhmat (2010), dukungan emosional dari anggota keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan membantu individu menghadapi tantangan hidup.

Keluarga juga memiliki peran penting dalam pembentukan identitas budaya. Dalam konteks ini, keluarga menjadi tempat di mana nilai-nilai dan tradisi budaya ditransmisikan dari generasi ke generasi. Koentjaraningrat (2004) mengemukakan bahwa keluarga merupakan agen sosial yang mengajarkan anak tentang budaya dan identitas, sehingga mereka dapat mengenali dan menghargai warisan budaya mereka.

Dalam menghadapi tantangan zaman modern, keluarga juga berfungsi sebagai sistem pendukung yang adaptif. Keluarga yang kuat dapat membantu anggotanya menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Menurut Duvall (2013), keluarga yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini dapat menjaga kesejahteraan anggotanya dan memperkuat ikatan di antara mereka.

Keluarga juga berfungsi sebagai pengatur norma dan nilai dalam masyarakat. Melalui pola asuh dan interaksi antaranggota, keluarga mendidik anak tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam konteks sosial. Mardiyah (2012) menyatakan bahwa keluarga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki pengertian, peran, dan fungsi yang sangat vital dalam perkembangan individu dan masyarakat. Keluarga tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga menjadi tempat pendidikan, sosialisasi, dan



pembentukan identitas. Dalam konteks ini, penting bagi setiap keluarga untuk menyadari peran mereka dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas.

## **B. Pentingnya Pendidikan Karakter dimulai dari Keluarga**

Pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga sangat penting karena keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak-anak belajar nilai-nilai dan norma yang akan membentuk perilaku mereka di masa depan. Menurut Suyanto (2020), keluarga berperan sebagai agen sosialisasi yang utama, di mana anak-anak mendapatkan teladan langsung dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan karakter dalam keluarga membantu menciptakan individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan empati, yang semuanya merupakan elemen penting dalam masyarakat yang harmonis.

Selain itu, penelitian oleh Djameluddin (2019) menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima pendidikan karakter yang baik di rumah cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih baik dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih positif. Dengan demikian, pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga sangat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan beradab.

Berdasarkan beberapa referensi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya Pendidikan karakter di mulai dari keluarga, disebabkan karena:

1. Lingkungan Pertama. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak-anak belajar nilai-nilai dan norma. Menurut Suyanto (2020), pendidikan karakter di keluarga menjadi dasar bagi pembentukan perilaku dan sikap anak yang akan mereka bawa ke dalam interaksi sosial.
2. Teladan Langsung. Orang tua berfungsi sebagai teladan bagi anak-anak mereka. Djameluddin (2019) menyatakan bahwa perilaku dan sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak, karena anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dalam keluarga.
3. Dukungan Emosional. Pendidikan karakter yang baik di dalam keluarga menciptakan dukungan emosional yang kuat. Dalam penelitian oleh Aminah (2021), ditemukan bahwa anak-anak yang mendapatkan dukungan emosional dari keluarga lebih mampu mengatasi stres dan tantangan kehidupan, yang berkontribusi pada pengembangan karakter yang positif.
4. Pembentukan Identitas. Keluarga berperan dalam pembentukan identitas individu. Menurut Rahmat Hidayat (2021), pendidikan karakter



di keluarga membantu anak-anak memahami nilai-nilai yang mereka anut, sehingga dapat membentuk identitas yang kuat dan positif.

5. Persiapan untuk Masyarakat. Pendidikan karakter di keluarga mempersiapkan anak untuk berkontribusi dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyani (2022), karakter yang baik yang ditanamkan sejak dini akan menghasilkan individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosial mereka.

### C. Metode Pendidikan Karakter dalam Keluarga

Metode pendidikan karakter dalam keluarga merupakan pendekatan yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak sejak usia dini. Metode ini berfokus pada pembentukan karakter melalui berbagai cara, diantaranya:

1. *Modeling* (Menjadi Teladan): Menurut Bandura (2019), salah satu cara paling efektif untuk mengajarkan karakter adalah melalui modeling, di mana orang tua menunjukkan perilaku yang ingin mereka tanamkan pada anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka.
2. *Positive Reinforcement* (Penguatan Positif). Dalam bukunya, Skinner (2020) menjelaskan bahwa penguatan positif, seperti pujian atau penghargaan, dapat mendorong anak untuk mengulang perilaku baik yang ingin diajarkan. Hal ini membantu memperkuat nilai-nilai yang diinginkan dalam pendidikan karakter.
3. *Family Meetings* (Pertemuan Keluarga). *According to Wachtel* (2021), mengadakan pertemuan keluarga secara rutin dapat menjadi metode efektif untuk mendiskusikan nilai-nilai dan harapan dalam keluarga, memberikan ruang bagi setiap anggota untuk berbagi pengalaman dan perasaan.
4. *Storytelling* (Bercerita). Menurut McKee (2022), menggunakan cerita untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan karakter dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak. Cerita dapat menyampaikan pesan moral dengan cara yang menyentuh.
5. *Role-Playing* (Bermain Peran). Dalam buku yang sama, Hutton (2023) menyatakan bahwa permainan peran dapat digunakan sebagai metode untuk mengajarkan empati dan keterampilan sosial, di mana anak-anak dapat berlatih situasi sosial yang berbeda dan belajar bagaimana berinteraksi dengan baik.



#### D. Sinergi antara Keluarga dan Perguruan Tinggi

Sinergi antara keluarga dan perguruan tinggi sangat krusial dalam upaya menciptakan generasi yang beretika dan memiliki tanggung jawab sosial. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral, sedangkan perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pendidikan tersebut dalam konteks yang lebih luas.

Keluarga memberikan fondasi bagi pendidikan karakter melalui pola asuh dan interaksi sehari-hari. Nilai-nilai yang ditanamkan di rumah, seperti kejujuran, disiplin, dan empati, akan menjadi bekal bagi anak saat mereka memasuki lingkungan pendidikan yang lebih formal. Dengan adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, proses internalisasi nilai-nilai ini dapat berjalan lebih efektif.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa melalui berbagai program dan kegiatan yang bersifat pengembangan diri. Kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan pelatihan soft skills merupakan contoh nyata bagaimana perguruan tinggi dapat memperkuat pendidikan karakter. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan organisasi di kampus menunjukkan peningkatan kemampuan interpersonal dan kepemimpinan yang positif.

Sinergi antara keluarga dan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui kolaborasi dalam berbagai program pendidikan. Misalnya, perguruan tinggi dapat mengadakan seminar atau workshop yang melibatkan orang tua sebagai peserta. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara keluarga dan institusi pendidikan, tetapi juga memberikan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada mahasiswa.

Pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter mahasiswa juga telah dibuktikan dalam beberapa studi. Partisipasi orang tua dalam kegiatan akademik dan non-akademik di perguruan tinggi berkontribusi pada peningkatan motivasi dan kinerja akademik mahasiswa. Dengan adanya dukungan dari orang tua, mahasiswa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan mereka dan menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga perlu memberikan *feedback* kepada orang tua mengenai perkembangan karakter mahasiswa. Sistem pelaporan yang transparan dan rutin dapat membantu orang tua memahami kemajuan anak mereka. Komunikasi yang baik antara perguruan tinggi dan keluarga



dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pertumbuhan karakter mahasiswa.

Kesadaran akan pentingnya sinergi ini semakin meningkat di kalangan masyarakat. Banyak perguruan tinggi yang mulai mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kurikulum mereka, serta mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan. Dengan pendekatan yang kolaboratif, pendidikan karakter dapat menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

Secara keseluruhan, sinergi antara keluarga dan perguruan tinggi sangat penting dalam pendidikan karakter. Melalui kerjasama yang erat, diharapkan dapat menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan demikian, generasi masa depan dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi masyarakat.

Paling tidak ada lima bentuk Sinergi antara Keluarga dan Perguruan Tinggi dalam pendidikan karakter, yaitu:

1. Keterlibatan Orang Tua dalam Kegiatan Kampus. Orang tua dapat dilibatkan dalam kegiatan kampus seperti seminar, lokakarya, dan acara komunitas. Keterlibatan ini membantu memperkuat hubungan antara keluarga dan perguruan tinggi serta meningkatkan dukungan terhadap pendidikan karakter mahasiswa.
2. Program Pelatihan untuk Orang Tua. Perguruan tinggi dapat mengadakan program pelatihan yang dirancang khusus untuk orang tua, agar mereka memahami pentingnya pendidikan karakter. Ini membantu orang tua memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak mereka.
3. Pengembangan Kurikulum yang Berbasis Karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum akademik dapat dilakukan dengan melibatkan umpan balik dari keluarga. Hal ini menciptakan kesepahaman antara orang tua dan pengajar tentang nilai-nilai yang perlu ditanamkan.
4. Sistem Komunikasi yang Teratur. Membangun saluran komunikasi yang teratur antara perguruan tinggi dan orang tua mengenai perkembangan mahasiswa membantu memastikan bahwa nilai-nilai karakter terus didukung di rumah.
5. Kegiatan Pengembangan Diri Bersama. Kegiatan yang melibatkan mahasiswa, keluarga, dan pengajar dalam program pengembangan diri dapat mendorong interaksi yang positif dan memperkuat nilai-nilai karakter yang diajarkan.



Sinergi antara keluarga dan perguruan tinggi dalam pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk individu yang beretika dan bertanggung jawab. Melalui kolaborasi ini, pendidikan karakter dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

### **E. Implikasi pendidikan karakter dalam keluarga terhadap karakter Mahasiswa**

Pendidikan karakter dalam keluarga memiliki implikasi yang luas terhadap karakter mahasiswa, termasuk internalisasi nilai moral, pengembangan keterampilan sosial, ketahanan mental, kesadaran tanggung jawab sosial, dan peningkatan kinerja akademik. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk individu yang berkualitas dan bertanggung jawab.

1. Internalisasi Nilai-Nilai Moral. Pendidikan karakter yang diberikan dalam keluarga membantu mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai moral. Lickona (2013) dalam bukunya *Educating for Character* menekankan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di rumah menjadi fondasi bagi perilaku etis mahasiswa di lingkungan kampus.
2. Pengembangan Keterampilan Sosial. Keluarga yang mengedepankan pendidikan karakter dapat menghasilkan individu dengan keterampilan sosial yang baik. Menurut Al-Rahimi (2017) dalam *The Role of Parents in Higher Education*, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berinteraksi secara efektif di lingkungan sosial mereka.
3. Ketahanan Mental dan Emosional. Mahasiswa yang mendapatkan pendidikan karakter yang kuat dari keluarga cenderung memiliki ketahanan mental dan emosional yang lebih baik. Parker (2010) dalam *Social Studies in Elementary Education* menunjukkan bahwa nilai-nilai ketahanan yang diajarkan di rumah membantu mahasiswa menghadapi tantangan akademis dan sosial di perguruan tinggi.
4. Kesadaran akan Tanggung Jawab Sosial. Pendidikan karakter yang ditekankan dalam keluarga juga membentuk kesadaran mahasiswa terhadap tanggung jawab sosial. Al-Mansoori (2018) dalam *Family Engagement in Character Education* menyatakan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di rumah mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
5. Peningkatan Kinerja Akademik. Mahasiswa yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menerapkan pendidikan karakter biasanya menunjukkan kinerja akademik yang lebih baik. Schwartz



(2022) dalam *Integrating Character Education into Higher Education Curricula* menyatakan bahwa disiplin dan etika kerja yang ditanamkan di rumah sangat berkontribusi pada pencapaian akademik mahasiswa.

## **Referensi**

- Al-Ali, A. S. (2020). *Understanding Family Dynamics in Arab Culture*. Riyadh: Dar Al-Muna.
- Al-Haq, F. (2018). *Family Engagement in Higher Education: Strengthening Connections for Character Development*. Al-Maaref Publishing.
- Al-Mansoori, A. (2018). *Family Engagement in Character Education: Building a Stronger Community*. Al-Maaref Publishing.
- Al-Rahimi, W. (2017). *The Role of Parents in Higher Education: A Guide for Family Engagement*. Dar Al-Fikr.
- Al-Sayed, F. M. B. (2023). *Islamic Perspectives on Family and Society*. Cairo: Islamic Publications.
- Aminah, L. (2021). *Dukungan Emosional dalam Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bandura, A. (2019). *Social Learning Theory: Theoretical and Practical Implications*. New York: Academic Press.
- Djamaluddin, M. (2019). *Pendidikan Karakter dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media.
- Duvall, E. (2013). *Family Development*. Harper & Row.
- El-Sharkawy, M. A. (2021). *Family in Islamic Tradition: Values and Responsibilities*. Beirut: Arab Book House.
- Epstein, J. L. (2011). *School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action*. Corwin Press.
- Gerson, K. (2021). *The Unfinished Revolution: Coming of Age in a New Era of Gender, Work, and Family*. New York: Oxford University Press.
- Hidayat, R. (2021). *Ilmu Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI.
- Hutton, R. (2023). *Playful Parenting: Creative Approaches to Family Dynamics*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kartini, S. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Pustaka Pelajar.
- Katz, L. G., & Chard, S. C. (2016). *Engaging Children's Minds: The Project Approach*. Greenwood Publishing Group.
- Koentjaraningrat, M. (2004). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam.



- Mardiyah, D. (2012). *Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.
- McKee, R. (2022). *The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human*. New York: HarperCollins.
- Mulyani, S. (2022). *Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak*. Surabaya: Unesa Press.
- Parker, W. C. (2010). *Social Studies in Elementary Education*. Pearson.
- Popenoe, D. (2018). *The Family: A History of the American Family*. New York: HarperCollins.
- Rakhmat, J. (2010). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Rosenfeld, M. J. (2018). *Coupling in America: The Changing Landscape of Family*. Princeton: Princeton University Press.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development*. McGraw-Hill.
- Schwartz, R. (2022). *Integrating Character Education into Higher Education Curricula: A Family Approach*. Journal of Character Education.
- Skinner, B. F. (2020). *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. Cambridge: B.F. Skinner Foundation.
- Smith, S. D. (2019). *The Family System: A New Approach to Family Dynamics*. London: Routledge.
- Sujono, Y. (2011). *Pendidikan Keluarga dan Perannya dalam Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran.
- Suyanto, E. (2020). *Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wachtel, P. (2021). *Family Meetings: A Practical Guide for Parents and Children*. New York: Routledge.
- Wadud, A. (2019). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications.
- Zayed, H. A. B. (2022). *Social Structures and Family Life in Arab Societies*. Abu Dhabi: Cultural Heritage Press.



# BAB VIII

## PEMBENTUKAN KARAKTER PADA MASYARAKAT



### A. Pengertian, Peran dan Fungsi Masyarakat

Kata "masyarakat" berasal dari beberapa bahasa, yaitu: Bahasa Arab, yaitu kata *syaraka* yang berarti "ikut serta" atau "berpartisipasi". Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti "kawan". Sedangkan dalam bahasa Prancis, kata "masyarakat" disebut dengan *societe* yang muncul setidaknya pada tahun 1513. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu, berinteraksi, dan saling memengaruhi berdasarkan norma, nilai, dan budaya yang sama. Menurut Giddens (2017), masyarakat didefinisikan sebagai "sekelompok orang yang berbagi budaya dan berinteraksi satu sama lain dalam konteks yang terorganisir." Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dan berbagi budaya adalah elemen penting dalam pembentukan masyarakat.

Lebih lanjut, Durkheim (2018) menekankan bahwa "masyarakat memiliki struktur yang memungkinkan individu untuk berfungsi dan berkolaborasi," menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya sekadar kumpulan individu, tetapi juga sebuah sistem yang terorganisasi dengan baik. Di sisi lain, Rahman (2020) menyoroti bahwa masyarakat juga terbentuk melalui dinamika sosial yang kompleks, di mana interaksi antarindividu menciptakan hubungan yang beragam dan berkesinambungan.

Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu komunitas, saling berinteraksi, dan berbagi nilai serta norma yang sama. Menurut Al-Attas (2011), masyarakat dapat didefinisikan sebagai "sekelompok orang yang terikat oleh hubungan sosial dan budaya, yang



membentuk identitas kolektif." Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dan norma bersama menjadi kunci dalam memahami masyarakat.

Lebih lanjut, Kamali (2019) menjelaskan bahwa "masyarakat tidak hanya terdiri dari individu, tetapi juga menciptakan struktur sosial yang memengaruhi perilaku dan interaksi anggotanya." Ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai entitas memiliki dinamika yang kompleks, di mana hubungan antarindividu memainkan peran penting dalam pembentukan karakter kolektif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu komunitas, saling berinteraksi, dan berbagi nilai serta norma yang sama. Masyarakat tidak hanya sekadar kumpulan orang, tetapi juga merupakan entitas sosial yang memiliki struktur dan dinamika yang memengaruhi perilaku anggotanya. Selain itu, masyarakat berfungsi sebagai lingkungan di mana individu belajar dan mengembangkan nilai-nilai moral serta identitas kolektif. Dengan demikian, masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas.

Masyarakat memiliki berbagai peran yang esensial dalam kehidupan individu dan kolektif. Sebagai contoh, masyarakat berperan dalam menyediakan dukungan sosial dan emosional bagi anggotanya. Hal ini dijelaskan oleh Durkheim (2018), yang menyatakan bahwa "masyarakat menciptakan solidaritas melalui norma dan nilai yang dibagikan." Selain itu, masyarakat juga berfungsi sebagai penghubung antara individu dan institusi, memperkuat hubungan sosial yang ada.

Disisi lain, adapun peran masyarakat diantaranya:

1. Sumber Dukungan Sosial. Masyarakat berfungsi sebagai sumber dukungan sosial bagi anggotanya. Menurut Cohen dan Wills (2020), "dukungan sosial dari komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik individu." Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan jaringan sosial yang saling mendukung.
2. Pembangun Identitas. Masyarakat juga berperan dalam membangun identitas individu dan kelompok. Menurut Smith (2019), "identitas seseorang sering kali terbentuk melalui interaksi dalam konteks sosial masyarakat di mana mereka tinggal." Ini menekankan bahwa nilai dan norma yang ada dalam masyarakat sangat memengaruhi pembentukan identitas.
3. Pendidikan dan Pembelajaran. Masyarakat berfungsi sebagai tempat pendidikan nonformal. Rahman (2021) menyatakan bahwa "interaksi



sosial dalam masyarakat memungkinkan individu belajar nilai-nilai dan norma yang penting untuk kehidupan sehari-hari." Dengan demikian, masyarakat berperan dalam proses pendidikan di luar lingkungan formal.

4. Pengaturan Sosial. Masyarakat memiliki fungsi pengaturan yang penting untuk menjaga ketertiban. Menurut Durkheim (2018), "masyarakat menciptakan norma dan aturan yang mengatur perilaku anggotanya, sehingga tercipta stabilitas sosial." Ini menunjukkan bagaimana masyarakat berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban.
5. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Masyarakat berperan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Menurut Giddens (2020), "partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi dalam pemerintahan." Ini menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan sosial dan politik.

Kemudian masyarakat juga memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya masyarakat dalam mendukung kehidupan individu dan kolektif serta menjaga keseimbangan dalam interaksi social. Diantara fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi Sosial. Masyarakat menciptakan ruang untuk interaksi sosial antara individu, membangun hubungan dan jaringan yang memperkuat solidaritas. Menurut Giddens (2020), "interaksi sosial di dalam masyarakat membantu membangun koneksi dan dukungan antara anggota."
2. Fungsi Ekonomi. Masyarakat berperan dalam pengorganisasian dan distribusi sumber daya ekonomi. Durkheim (2018) menegaskan bahwa "masyarakat membantu mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggotanya." Ini mencakup produksi barang dan jasa serta penciptaan lapangan kerja.
3. Fungsi Pendidikan. Masyarakat berfungsi sebagai arena pendidikan informal di mana individu belajar nilai-nilai, norma, dan keterampilan melalui interaksi. Rahman (2021) menyatakan bahwa "pengalaman sosial dalam masyarakat mengajarkan individu tentang perilaku yang diharapkan."
4. Fungsi Politik. Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut Smith (2019), "partisipasi aktif masyarakat dalam politik memperkuat demokrasi dan memastikan akuntabilitas pemerintah." Fungsi ini penting untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan publik.



5. Fungsi Budaya. Masyarakat berfungsi sebagai pelestari dan penyebar budaya. Al-Attas (2015) mengemukakan bahwa "budaya yang dimiliki masyarakat membentuk identitas dan karakter individu." Dengan demikian, masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya dan tradisi.
6. Fungsi Pengaturan. Masyarakat menetapkan norma dan aturan yang mengatur perilaku anggotanya, menjaga ketertiban dan stabilitas. Durkheim (2018) menekankan bahwa "norma sosial penting untuk menghindari konflik dan menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial."
7. Fungsi Pelayanan. Masyarakat menyediakan berbagai layanan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ini memastikan bahwa kebutuhan dasar anggotanya terpenuhi, yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

Fungsi masyarakat akan berjalan dengan baik jika beberapa faktor kunci terpenuhi. *Pertama*, keterlibatan aktif anggota masyarakat sangat penting untuk menciptakan solidaritas dan kerjasama. *Kedua*, penerimaan umum terhadap norma dan nilai yang ada mendukung interaksi sosial yang harmonis. *Ketiga*, sistem pendidikan yang efektif berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral yang dibutuhkan untuk berkontribusi secara positif.

*Keempat*, penerapan keadilan sosial memastikan bahwa semua anggota merasa dihargai dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya. Komunikasi yang efektif juga sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang sehat. *Kelima*, keberadaan pemimpin yang visioner dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan positif. Dan *keenam*, sarana dan prasarana yang memadai merupakan fondasi penting yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, fungsi masyarakat dapat berjalan optimal, mendukung kesejahteraan dan kemajuan individu serta kolektif.

## **B. Transformasi Sosial Melalui Masyarakat Madani**

Kata "masyarakat madani" berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "*madaniy*" yang berarti beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil. Istilah "masyarakat madani" juga dapat diartikan dari kata Latin "*civitas dei*" yang berarti kota Ilahi, dan "*society*" yang berarti masyarakat. Di Indonesia, istilah "masyarakat madani" diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim – Perdana Menteri Malaysia saat ini, dalam forum ilmiah pada Festival



Istiqlal tahun 1995. Konsep yang diajukan Anwar Ibrahim adalah masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju.

Masyarakat madani, atau masyarakat sipil, merujuk pada komunitas yang dibangun atas dasar partisipasi aktif warga dalam proses sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Giddens (2020), "masyarakat madani adalah ruang di mana individu dan kelompok berinteraksi secara bebas, mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia." Dalam konteks ini, masyarakat madani berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Lebih lanjut, Kamali (2021) menjelaskan bahwa "masyarakat madani berfungsi sebagai penghubung antara individu dan negara, memberikan platform bagi partisipasi publik." Ini menunjukkan bahwa masyarakat madani tidak hanya berfungsi sebagai arena sosial, tetapi juga sebagai tempat di mana suara masyarakat dapat disampaikan dan diperjuangkan. Dalam hal ini, masyarakat madani sangat berperan dalam memperjuangkan kepentingan bersama.

Masyarakat madani juga diharapkan mampu mendorong perubahan sosial yang positif dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan keberagaman. Rahman (2022) menyatakan bahwa "dalam masyarakat madani, keberagaman dihargai dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan." Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk merasa dihargai dan memiliki peran dalam komunitas mereka.

Secara keseluruhan, masyarakat madani adalah elemen kunci dalam pembangunan sosial dan politik yang berkelanjutan. Menurut Al-Attas (2019), "masyarakat madani yang kuat dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi politik, dan mempromosikan kesejahteraan sosial." Dengan demikian, pengembangan masyarakat madani menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Nurkholis Madjid, seorang cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai pemikir progresif, memberikan pandangan mendalam tentang konsep masyarakat madani. Dalam bukunya, *Masyarakat Madani: Makna dan Paradigma* (2002), Madjid menjelaskan bahwa masyarakat madani adalah komunitas yang dibangun atas nilai-nilai kemanusiaan, partisipasi aktif, dan demokrasi. Ia berargumen bahwa masyarakat madani harus mampu menciptakan ruang bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan sosial.



Salah satu aspek penting dalam pemikiran Madjid adalah penghormatan terhadap pluralisme. Ia percaya bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya harus dihargai dalam masyarakat madani. Dalam konteks ini, Madjid menyatakan bahwa "masyarakat madani menjadi sebuah ruang di mana perbedaan dapat dijadikan kekuatan untuk membangun kerukunan dan harmoni" (Madjid, 2002). Hal ini menekankan pentingnya toleransi dan dialog dalam mengatasi perbedaan.

Madjid juga menyoroti peran pendidikan sebagai fondasi masyarakat madani. Dalam pandangannya, pendidikan harus bertujuan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun karakter dan kesadaran sosial. Ia menulis, "Pendidikan yang baik akan membentuk individu yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral, yang esensial untuk mewujudkan masyarakat yang adil" (Madjid, 2002). Dengan demikian, pendidikan berperan krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pemikiran Nurkholis Madjid tentang masyarakat madani menunjukkan bahwa pembangunan sosial yang berkelanjutan harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat madani dapat berkontribusi pada terciptanya kehidupan yang lebih adil dan harmonis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, masyarakat madani dapat dipahami sebagai suatu komunitas yang dibangun atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, partisipasi aktif, dan demokrasi. Masyarakat ini menekankan pentingnya inklusi, di mana setiap individu memiliki hak dan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi.

Masyarakat madani juga menghargai multikulturalisme dan keberagaman, sehingga perbedaan suku, agama, dan budaya dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kerukunan. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial individu, sehingga mereka dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, masyarakat madani adalah wadah yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang konstruktif, di mana nilai-nilai toleransi, dialog, dan keadilan menjadi pilar utama. Dengan demikian, masyarakat madani berkontribusi pada terciptanya kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Konsep masyarakat madani sangat erat kaitannya dengan pengimplementasian nilai-nilai keadilan, kerukunan, dan kerjasama yang



dicontohkan dalam Negara Madinah pada masa Rasulullah SAW. Salah satu tonggak penting dalam sejarah ini adalah lahirnya Piagam Madinah (Misaqul Madinah), yang berfungsi sebagai konstitusi pertama bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama.

Piagam Madinah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok, menciptakan kerangka untuk hidup bersama secara damai. Menurut Kamali (2021), "Piagam Madinah menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana hak-hak setiap individu dan kelompok diakui dan dilindungi." Ini mencerminkan esensi dari masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman.

Konsep masyarakat madani dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga mencakup dimensi politik. Piagam Madinah memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Giddens (2020) menyatakan bahwa "dalam masyarakat madani, partisipasi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menciptakan tatanan sosial yang berkelanjutan." Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah masih relevan dan dapat dijadikan landasan untuk membangun masyarakat madani masa kini.

Prakteknya, masyarakat madani yang dibentuk oleh Rasulullah saw. mengajarkan pentingnya kerjasama antar kelompok, saling menghormati, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Rahman (2022) menggarisbawahi bahwa "masyarakat madani yang ideal adalah yang mampu memfasilitasi dialog dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif." Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, masyarakat modern dapat membangun komunitas yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Konsep "masyarakat madani" atau "*civil society*" di Eropa muncul pada masa pencerahan (*Renaissance*) melalui pemikiran John Locke dan Immanuel Kant. Konsep ini lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat, terutama pada saat adanya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat modern.

Masyarakat madani memiliki berbagai karakteristik yang mendefinisikannya sebagai komunitas yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama masyarakat madani:

1. Partisipasi Aktif. Masyarakat madani ditandai dengan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Dalam bukunya, Nurkholis Madjid



- menyatakan bahwa partisipasi aktif warga sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Madjid, 2003).
2. Toleransi dan Kebersamaan. Karakteristik lain yang penting adalah penghargaan terhadap keberagaman. Ali Abd al-Raziq dalam bukunya menekankan bahwa masyarakat madani mampu mengelola perbedaan suku, agama, dan budaya dengan cara yang harmonis dan saling menghormati (Abd al-Raziq, 2012).
  3. Keadilan Sosial. Keadilan sosial merupakan pilar utama masyarakat madani. Dalam karyanya, Muhammad Abed al-Jabri menjelaskan bahwa masyarakat madani berupaya memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata, menciptakan kesejahteraan bagi semua anggotanya (al-Jabri, 2015).
  4. Kesadaran Sosial dan Pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sosial. Hassan Hanafi menegaskan bahwa pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan akan membentuk individu yang sadar akan tanggung jawab sosial mereka terhadap komunitas (Hanafi, 2018).
  5. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat madani juga ditandai oleh adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Abdullah al-Nasih al-Azami mencatat bahwa transparansi penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (al-Azami, 2019).

Transformasi sosial dalam masyarakat madani merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan struktural dan kultural yang mendukung keadilan, demokrasi, dan partisipasi aktif. Menurut Giddens (2019), "masyarakat madani dapat berfungsi sebagai katalisator bagi perubahan sosial yang positif dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia." Ini menunjukkan bahwa masyarakat madani memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial.

Salah satu peluang yang ditawarkan oleh masyarakat madani adalah peningkatan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Kamali (2020) menjelaskan bahwa "partisipasi aktif masyarakat dalam politik tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memberikan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan." Dengan demikian, masyarakat madani membuka jalan bagi inklusi sosial dan keterwakilan.

Namun, transformasi sosial ini tidak tanpa tantangan. Dalam banyak kasus, masih terdapat resistensi terhadap perubahan, terutama dari



kelompok yang merasa terancam oleh pemberdayaan masyarakat. Menurut Rahman (2021), "konflik kepentingan sering kali menjadi penghalang bagi terciptanya masyarakat madani yang ideal." Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika sosial yang ada agar transformasi dapat berlangsung secara efektif.

Selanjutnya, pendidikan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong transformasi sosial. Al-Attas (2018) mengemukakan bahwa "pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dapat membentuk karakter individu dan memfasilitasi perubahan positif dalam masyarakat." Masyarakat madani yang berorientasi pada pendidikan akan menghasilkan individu-individu yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka.

Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam mendukung transformasi sosial. Menurut Smith (2020), "media yang independen dan bertanggung jawab dapat memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih baik." Dalam konteks masyarakat madani, media berfungsi sebagai alat untuk mendidik dan memberdayakan warga.

Namun, tantangan dalam dunia media juga harus diatasi. Berita palsu dan disinformasi dapat merusak kepercayaan publik dan menghalangi transformasi sosial yang positif. Oleh karena itu, diperlukan literasi media yang baik agar masyarakat mampu membedakan informasi yang valid dari yang tidak. Rahman (2021) menyatakan bahwa "peningkatan literasi media adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan ini."

Lebih jauh lagi, masyarakat madani harus dapat mengatasi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Menurut Al-Ghazali (2019), "kesenjangan ini sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakpuasan dalam masyarakat." Oleh karena itu, program-program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan perlu menjadi prioritas dalam agenda masyarakat madani.

Di sisi lain, keberagaman budaya dalam masyarakat juga merupakan tantangan tersendiri. Giddens (2019) menekankan bahwa "keberagaman budaya dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga bisa memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik." Masyarakat madani harus mampu mengelola keberagaman ini dengan pendekatan inklusif yang menghargai perbedaan.

Dengan demikian, transformasi sosial melalui masyarakat madani merupakan proses yang kompleks dan dinamis, di mana peluang dan tantangan saling berinteraksi. Masyarakat madani yang kuat dapat mendorong perubahan yang positif, tetapi perlu ada strategi dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan yang ada.



Membangun masyarakat madani memerlukan pendekatan yang terencana dan melibatkan semua elemen masyarakat. Langkah *pertama* adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut Nurkholis Madjid (2003), "kesadaran kolektif yang tinggi akan mendorong individu untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka." Program-program edukasi dan kampanye kesadaran dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini.

Langkah *kedua* adalah menciptakan platform yang memungkinkan dialog dan kolaborasi antaranggota masyarakat. Keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, forum komunitas, atau kegiatan sosial dapat memberikan ruang bagi warga untuk berbagi ide dan solusi. Sebagaimana diungkapkan oleh Giddens (2020), "kolaborasi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat dapat memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kepercayaan antarindividu." Dengan demikian, forum-forum ini tidak hanya menjadi tempat untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengimplementasikan ide-ide positif.

Akhirnya, langkah *ketiga* adalah menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Al-Azami (2019) menyatakan bahwa "transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempromosikan tanggung jawab sosial." Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, masyarakat madani dapat berkembang secara berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif.

Masyarakat madani dalam konteks global berfungsi sebagai jembatan antara individu, komunitas, dan negara. Di banyak negara, masyarakat madani telah menjadi platform bagi warganya untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Menurut Giddens (2020), "masyarakat madani menciptakan ruang bagi partisipasi aktif yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam proses politik dan sosial." Melalui organisasi non-pemerintah dan gerakan sosial, warga dapat menyuarakan kepentingan mereka dan mendorong perubahan yang diperlukan di masyarakat.

Praktik masyarakat madani juga dapat dilihat dalam berbagai inisiatif komunitas yang mengedepankan kolaborasi dan solidaritas. Contohnya, gerakan lingkungan hidup global menunjukkan bagaimana masyarakat madani dapat bersatu untuk tujuan bersama, seperti menjaga keberlanjutan planet. Al-Azami (2019) menyatakan bahwa "kolaborasi antar kelompok dalam masyarakat madani meningkatkan kesadaran sosial dan



memfasilitasi pertukaran ide yang konstruktif." Ini membuktikan bahwa masyarakat madani bukan hanya relevan di satu negara, tetapi dapat menjadi kekuatan global untuk perubahan positif.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi pengekangan kebebasan berpendapat dan keterlibatan politik di beberapa negara. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat madani untuk terus memperjuangkan ruang yang aman bagi ekspresi dan partisipasi. Menurut Madjid (2003), "membangun masyarakat madani yang kuat di tingkat global memerlukan komitmen bersama untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan." Dengan demikian, masyarakat madani harus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika global.

Masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat madani dalam beberapa aspek, meskipun tantangan tertentu masih ada. Ciri-ciri masyarakat madani, seperti partisipasi aktif, pluralisme, dan kesadaran sosial, dapat dilihat dalam konteks Indonesia yang beragam. Menurut Nurkholis Madjid (2003), "Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi masyarakat madani, mengingat keragaman budaya dan tradisi yang kaya." Ini menciptakan kesempatan untuk menciptakan kerukunan dan saling menghormati di antara berbagai kelompok.

Namun, meskipun terdapat potensi tersebut, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani yang ideal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah (2020), disebutkan bahwa "masyarakat Indonesia masih menghadapi masalah seperti intoleransi, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas." Tantangan ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan merespons masalah sosial dengan baik.

Di sisi lain, terdapat banyak inisiatif dari masyarakat sipil yang menunjukkan bahwa Indonesia bergerak menuju masyarakat madani. Organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, dan forum-forum dialog antarbudaya berperan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Azami (2019), "peran aktif masyarakat sipil sangat krusial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan pilar masyarakat madani." Dengan upaya bersama, masyarakat Indonesia dapat terus berkembang menuju masyarakat madani yang lebih inklusif dan berkeadilan.



### C. Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Masyarakat

Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan beradab. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang diperlukan untuk interaksi yang harmonis di dalam komunitas. Menurut Thomas Lickona (2013), "pendidikan karakter adalah proses yang membantu individu untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai penting, sehingga mereka dapat bertindak dengan integritas dan tanggung jawab." Dalam konteks ini, pendidikan karakter berfungsi sebagai fondasi untuk menciptakan individu yang mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Selain itu, pendidikan karakter juga berperan dalam membentuk generasi yang peka terhadap isu-isu sosial. Dalam bukunya, *Pendidikan Karakter: Untuk Menjadi Manusia yang Utuh*, Zainal Abidin (2018) menyatakan bahwa "pendidikan karakter dapat menumbuhkan kesadaran sosial dan empati, yang penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini." Dengan membangun karakter yang kuat, individu diharapkan dapat lebih responsif terhadap permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan intoleransi.

Di sisi lain, masyarakat yang mengedepankan pendidikan karakter cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah dan lebih mampu mengelola perbedaan. Masyarakat yang memiliki dasar karakter yang baik dapat menciptakan suasana saling menghormati dan toleransi, yang pada akhirnya mendukung perdamaian dan stabilitas sosial." Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas untuk bekerja sama dalam menerapkan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa alasan pentingnya pendidikan karakter dalam masyarakat, diantaranya:

1. Pembentukan Moral dan Etika. Pendidikan karakter membantu individu mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Menurut Lickona (2013), "pendidikan karakter adalah kunci untuk menginternalisasi nilai-nilai penting yang mendorong individu bertindak dengan integritas." Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang menghargai kejujuran dan keadilan.
2. Meningkatkan Kesadaran Sosial. Pendidikan karakter berkontribusi pada peningkatan kesadaran sosial dan empati. Hassan Hanafi (2018) menyatakan bahwa "pendidikan yang berfokus pada nilai-



- nilai kemanusiaan dapat mendorong individu untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial di sekitar mereka." Dengan kesadaran ini, individu lebih mungkin terlibat dalam kegiatan sosial yang positif.
3. Mengurangi Konflik Sosial. Masyarakat yang mengedepankan pendidikan karakter cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah. Abdul Karim Soroush (2019) menegaskan bahwa "pendidikan karakter membantu menciptakan suasana saling menghormati dan toleransi, yang esensial untuk menjaga kedamaian dalam masyarakat." Dengan demikian, pendidikan karakter dapat menjadi alat untuk menciptakan stabilitas sosial.
  4. Mempersiapkan Generasi yang Bertanggung Jawab. Pendidikan karakter membekali generasi muda dengan keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ali Abd al-Raziq (2021) menekankan bahwa "pendidikan karakter membantu individu memahami tanggung jawab sosial mereka dan berkontribusi secara positif dalam komunitas." Hal ini sangat penting untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
  5. Mendorong Partisipasi Aktif dalam Masyarakat. Individu yang mendapatkan pendidikan karakter cenderung lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Nurkholis Madjid (2003) menyatakan bahwa "partisipasi aktif dalam masyarakat adalah salah satu hasil dari pendidikan karakter yang baik, yang memungkinkan individu untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan." Ini menunjukkan pentingnya peran aktif setiap individu dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

#### **D. Metode Pendidikan Karakter dalam Masyarakat**

Pendidikan karakter merupakan upaya penting untuk membangun individu yang berintegritas dan memiliki tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa metode yang dapat diterapkan dalam masyarakat untuk pendidikan karakter:

1. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*). Metode ini mengajak peserta didik untuk terlibat dalam proyek nyata yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Krajcik dan Blumenfeld (2018) menekankan bahwa "pembelajaran berbasis proyek tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga membangun karakter melalui pengalaman langsung dan kerja tim."
2. Program Mentoring. Melibatkan individu yang lebih berpengalaman untuk membimbing yang lebih muda. Gordon, et al. (2017)



menyatakan bahwa "mentoring berfungsi untuk mengembangkan karakter dan keterampilan sosial, memberikan model positif yang dapat diikuti oleh mentee." Program ini juga membantu membangun hubungan yang kuat dalam komunitas.

3. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Pendidikan yang fokus pada hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Levine dan Lopez (2016) berargumen bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat dan menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial." Ini penting untuk membentuk individu yang peduli dan aktif dalam komunitas.
4. Kegiatan Sukarela. Mengajak individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sukarela dapat mengembangkan empati dan kepedulian sosial. Yamamoto dan Noh (2019) menemukan bahwa "partisipasi dalam kegiatan sukarela memberikan pengalaman langsung tentang tantangan yang dihadapi masyarakat, yang membantu membentuk karakter individu."
5. Diskusi Terbuka dan Dialog. Mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu moral dan etika. Cohen dan Sandy (2020) mengemukakan bahwa "diskusi yang melibatkan beragam pandangan membantu individu merenungkan nilai-nilai mereka dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip etis." Ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi dalam masyarakat.
6. Media Sosial untuk Kesadaran Sosial. Memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Kahne dan Bowyer (2018) menemukan bahwa "media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan membangun komunitas yang peduli, dengan mengajak individu untuk berpartisipasi dalam diskusi yang mendukung nilai-nilai karakter."
7. Gamifikasi Pendidikan Karakter. Mengintegrasikan elemen permainan dalam pembelajaran karakter. Deterding et al. (2011) menjelaskan bahwa "gamifikasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan individu, menjadikan pembelajaran karakter lebih menarik dan efektif melalui tantangan dan penghargaan yang merangsang."

Disisi lain terdapat metode pendidikan karakter dalam masyarakat budaya, diantaranya:

1. Cerita Rakyat. Cerita rakyat merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai karakter dalam masyarakat. Melalui cerita-cerita ini, nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, dan rasa



hormat dapat ditransmisikan secara generasi ke generasi. Cerita rakyat berfungsi sebagai media pendidikan karakter yang dapat membentuk perilaku positif anak-anak dalam konteks budaya."

2. Tradisi dan Upacara Budaya. Upacara adat dan tradisi budaya menyediakan kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai sosial dan kebersamaan. Melalui partisipasi dalam tradisi dan upacara, individu belajar pentingnya solidaritas dan identitas bersama dalam masyarakat." Kegiatan ini memperkuat hubungan antaranggota komunitas.
3. Pendidikan Melalui Seni dan Kreativitas Seni, termasuk musik, tari, dan teater, dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai karakter. Kegiatan seni tidak hanya menumbuhkan kreativitas tetapi juga melatih disiplin dan kerjasama." Melalui seni, individu dapat mengekspresikan diri sambil memahami nilai-nilai yang mendasari karya mereka.
4. Kegiatan Sosial dan Kerja Bakti. Mengadakan kegiatan sosial seperti kerja bakti dapat mendorong rasa tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan ini, individu belajar tentang pentingnya kontribusi terhadap masyarakat dan rasa kepedulian terhadap lingkungan." Ini juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat.
5. Diskusi dan Pertukaran Budaya. Forum diskusi yang melibatkan anggota masyarakat untuk berbagi nilai-nilai dan pengalaman dapat memperkuat pendidikan karakter. Diskusi terbuka tentang nilai-nilai budaya membantu individu untuk memahami dan menghargai perbedaan, serta meningkatkan toleransi dalam masyarakat." Ini menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan saling menghormati.

Dengan demikian, metode pendidikan karakter yang diterapkan dengan tepat di masyarakat akan melahirkan individu-individu yang tidak hanya berpendidikan, tetapi juga bermoral dan berperadaban tinggi. Melalui pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai sosial, seperti pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan sukarela, masyarakat dapat membangun rasa kepedulian, tanggung jawab, dan empati di antara anggotanya. Hal ini akan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan mendukung perkembangan karakter yang positif, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan beradab.



### E. Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Karakter

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan karakter adalah suatu keharusan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab. Dengan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan komunitas, pendidikan karakter dapat diterapkan secara holistik, menghasilkan masyarakat yang beradab dan berintegritas.

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pendidikan karakter, diantaranya:

1. Kolaborasi Antara Sekolah dan Komunitas. Dalam buku *Building Communities of Hope* oleh Tim S. G. Kinnari (2017), dijelaskan bahwa kolaborasi antara sekolah dan komunitas sangat penting untuk mendukung pendidikan karakter. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah, seperti program mentoring dan pengembangan kurikulum berbasis nilai, lingkungan belajar dapat ditingkatkan.
2. Kegiatan Sukarela dan Layanan Masyarakat. Buku *The Volunteer Management Handbook* oleh Tracy D. Connors (2015) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sukarela meningkatkan nilai-nilai karakter seperti empati dan tanggung jawab. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga mengajarkan peserta untuk memberi kembali.
3. Pendidikan Kewarganegaraan Aktif. Dalam *Civic Education: What Makes It Effective?* oleh David A. Campbell dan Elizabeth D. Simson (2018), ditekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang aktif sangat penting. Masyarakat berperan dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial, serta mendorong keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.
4. Pengembangan Program Keluarga dan Komunitas. Buku *Family and Community Engagement in Education* oleh Mary M. Brabeck dan Jennifer E. Schwartz (2016) membahas pentingnya program yang melibatkan keluarga dan komunitas. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan memperkuat nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah.
5. Mentoring dan Model Peran. Dalam *Mentoring: A Guide to Effective Practice* oleh David Clutterbuck (2015), dijelaskan bagaimana mentoring dapat menjadi metode pendidikan karakter. Keterlibatan masyarakat sebagai mentor bagi anak-anak dan remaja membantu



memberikan bimbingan dan contoh perilaku yang baik, penting dalam pembentukan karakter.

#### **F. Nilai-Nilai Budaya Masyarakat dan Pendidikan Karakter**

Nilai-nilai budaya masyarakat berperan penting dalam membentuk pendidikan karakter individu. Dalam konteks ini, budaya bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang membimbing perilaku dan interaksi sosial. Menurut Geert Hofstede dalam *Culture's Consequences*, nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi cara individu berperilaku dan berinteraksi dalam komunitas (Hofstede, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus mempertimbangkan konteks budaya di mana individu berada.

Nilai kekeluargaan, misalnya, sangat penting dalam banyak masyarakat. Dalam buku *The Cultural Nature of Human Development* oleh Barbara Rogoff (2003), dijelaskan bahwa interaksi dalam lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada pengembangan karakter anak (Rogoff, 2003). Oleh karena itu, pendidikan karakter yang mengedepankan nilai kekeluargaan dapat membentuk individu yang memiliki rasa tanggung jawab dan kasih sayang.

Kerjasama dan gotong royong juga merupakan nilai penting dalam budaya. Menurut Michael J. G. Tilly dalam *Sociology and Social Policy* (2019), kerjasama dalam komunitas dapat meningkatkan rasa saling percaya dan membangun solidaritas antaranggota (Tilly, 2019). Pendidikan karakter yang mengajarkan pentingnya kerjasama akan membekali individu dengan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dalam masyarakat.

Kejujuran sebagai nilai fundamental dalam pendidikan karakter juga sangat diperhatikan. Dalam *The Handbook of Moral Development* yang diedit oleh Cristina C. Morales dan Melvin L. Smith (2016), penulis menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam membentuk integritas individu dan dampaknya terhadap hubungan sosial (Morales & Smith, 2016). Kegiatan pendidikan yang menekankan kejujuran dapat memperkuat nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, disiplin merupakan nilai budaya yang krusial dalam pendidikan karakter. Menurut David A. Wiggins dalam *Cultural Psychology: A Perspective on Psychological Functioning* (2012), disiplin membantu individu mengembangkan tanggung jawab dan etika kerja (Wiggins, 2012). Pendidikan karakter yang menekankan disiplin akan menghasilkan individu



yang tidak hanya mampu mencapai tujuan pribadi, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat.

Perlu diungkap beberapa contoh budaya Indonesia yang menjadi karakter bangsa, diantaranya budaya Jawa, Sunda, Batak dan Mandailing. Contoh Budaya Jawa Pembentuk Karakter Bangsa, diantaranya:

1. Wayang Kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional yang mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan. Menurut Hasyim dalam *Wayang Kulit: Warisan Budaya dan Pendidikan Karakter* (2020), pertunjukan wayang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan etika dan filosofi hidup yang berharga (Hasyim, 2020). Melalui seni ini, generasi muda diajarkan tentang nilai-nilai kebaikan dan keadilan.
2. Batik. Batik Jawa adalah simbol identitas budaya yang kaya. Dalam *Batik Jawa: Karya Seni dan Identitas* (2019), Prabowo menyatakan bahwa batik mencerminkan estetika dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat Jawa, seperti kesederhanaan dan ketekunan (Prabowo, 2019). Pendidikan yang mengintegrasikan batik dapat menanamkan rasa cinta terhadap warisan budaya.
3. Upacara Tradisional. Upacara tradisional, seperti Slametan, merupakan cara masyarakat Jawa untuk menghormati dan mengingat nenek moyang. Dalam *Upacara Adat Jawa: Makna dan Nilai* (2021), Kurniawan menjelaskan bahwa Slametan mengajarkan pentingnya rasa syukur dan kebersamaan dalam keluarga dan komunitas (Kurniawan, 2021). Nilai-nilai ini berkontribusi dalam pembentukan karakter yang penuh rasa syukur.
4. Kearifan Lokal. Kearifan lokal dalam masyarakat Jawa, seperti konsep "urip rukun" (hidup rukun), mengajarkan pentingnya harmonisasi dalam hubungan antarindividu. Menurut Rinaldi dalam *Kearifan Lokal Jawa dalam Kehidupan Sehari-hari* (2022), nilai ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi dan pengertian antarwarga (Rinaldi, 2022). Pendidikan karakter yang menekankan nilai ini dapat membentuk individu yang berorientasi pada kebersamaan.
5. Sopan Santun. Sopan santun adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Dalam *Etika dan Adat Istiadat Jawa* (2018), Santoso menekankan bahwa sopan santun mencerminkan budi pekerti luhur yang harus diajarkan kepada generasi muda untuk menciptakan masyarakat yang beradab (Santoso, 2018). Pendidikan



yang mengedepankan sopan santun dapat menghasilkan individu yang memiliki karakter baik dan menghargai orang.

Selanjutnya Contoh Budaya Sunda Pembentuk Karakter Bangsa, diantaranya:

1. Batik Sunda. Batik Sunda merupakan salah satu bentuk seni yang mencerminkan nilai-nilai estetika dan kreativitas masyarakat Sunda. Menurut Kurniawan dalam *Batik Sunda: Identitas Budaya dan Karakter* (2019), batik ini tidak hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang budaya dan tradisi Sunda yang harus dilestarikan (Kurniawan, 2019). Melalui pendidikan seni, generasi muda dapat diajarkan untuk menghargai warisan budaya ini.
2. Pajajaran. Tradisi Pajajaran di mana masyarakat mengadakan berbagai ritual dan perayaan merupakan contoh bagaimana budaya Sunda membangun karakter kolektif. Dalam *Tradisi dan Kehidupan Sosial Masyarakat Sunda* (2020), Mulyana menjelaskan bahwa perayaan ini memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara warga masyarakat (Mulyana, 2020). Pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai ini dapat menciptakan individu yang memiliki rasa empati dan kebersamaan.
3. Sisingaan. Sisingaan adalah tradisi yang melibatkan prosesi arak-arakan menggunakan singa yang terbuat dari kayu. Menurut Deddy dalam *Tradisi dan Budaya Sunda* (2021), kegiatan ini melambangkan kekuatan dan semangat juang masyarakat Sunda, serta pentingnya menjaga tradisi (Deddy, 2021). Melalui kegiatan ini, generasi muda diajarkan untuk menghargai perjuangan leluhur mereka.
4. Lagu dan Musik Tradisional. Musik tradisional Sunda, seperti gamelan dan angklung, mengajarkan nilai-nilai kerja sama dan harmonisasi. Dalam *Musik Tradisional Sunda: Sebuah Identitas* (2022), Rinaldi menekankan bahwa bermain musik bersama membangun keterampilan sosial dan rasa hormat antar individu (Rinaldi, 2022). Pendidikan musik dapat membentuk karakter yang menghargai kolaborasi dan kreativitas.
5. Masyarakat Adat. Masyarakat adat Sunda memiliki sistem nilai dan norma yang kuat yang mengatur kehidupan sosial mereka. Menurut Hasyim dalam *Sosiologi Budaya Sunda* (2018), nilai-nilai tersebut membentuk karakter individu yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas (Hasyim, 2018). Pendidikan



yang menekankan nilai-nilai masyarakat adat dapat membangun kesadaran sosial yang tinggi.

Kemudian Contoh Budaya Batak Pembentuk Karakter Bangsa, diantaranya:

1. Tradisi Daur Hidup Tradisi daur hidup, seperti pesta adat pernikahan dan upacara kematian, adalah bagian integral dari budaya Batak. Menurut Sihotang dalam *Adat dan Budaya Batak* (2020), tradisi ini mengajarkan nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan rasa hormat terhadap orang tua dan leluhur (Sihotang, 2020). Melalui upacara ini, generasi muda diajarkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang kuat.
2. Marga dan Keekerabatan. Dalam masyarakat Batak, sistem marga sangat penting. Dalam *Sosiologi Keluarga Batak* (2019), Tarigan menjelaskan bahwa marga mencerminkan identitas sosial dan hubungan keekerabatan yang erat, yang membangun rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas (Tarigan, 2019). Nilai ini menanamkan rasa solidaritas dan keterikatan sosial yang tinggi.
3. Musik dan Tarian Tradisional. Musik dan tarian tradisional, seperti gondang sabangunan, berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial. Dalam *Musik Tradisional Batak: Identitas dan Tradisi* (2021), Siahaan menyatakan bahwa pertunjukan musik tradisional tidak hanya menghibur, tetapi juga mengekspresikan nilai-nilai budaya dan rasa kebersamaan (Siahaan, 2021). Pendidikan yang mengajarkan musik tradisional dapat membangun karakter kolaboratif dan kreatif.
4. Nilai Pekerja Keras. Budaya Batak sangat menekankan nilai kerja keras dan ketekunan. Dalam *Budaya Kerja Masyarakat Batak* (2022), Harahap menegaskan bahwa semangat juang dan tekad untuk sukses merupakan bagian dari karakter masyarakat Batak (Harahap, 2022). Pendidikan karakter yang menekankan nilai ini dapat membentuk individu yang ulet dan tidak mudah menyerah.
5. Kearifan Lokal. Kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan sumber daya alam, mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Menurut Simanjuntak dalam *Kearifan Lokal Masyarakat Batak* (2018), nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tanggung jawab terhadap lingkungan (Simanjuntak, 2018). Pendidikan yang mengintegrasikan kearifan lokal ini dapat menghasilkan individu yang peduli terhadap lingkungan.



Terakhir Contoh Budaya Mandailing Pembentuk Karakter Bangsa, diantaranya:

1. Tradisi Pernikahan. Tradisi pernikahan dalam budaya Mandailing mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Menurut Hasibuan dalam *Pernikahan Adat Mandailing* (2020), upacara pernikahan melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat, yang menunjukkan pentingnya solidaritas dan dukungan sosial (Hasibuan, 2020). Nilai-nilai ini berperan dalam membentuk karakter individu yang menghargai hubungan sosial.
2. Sistem Keekerabatan. Masyarakat Mandailing memiliki sistem keekerabatan yang kompleks, di mana hubungan antar anggota keluarga sangat dijunjung tinggi. Dalam *Sosiologi Masyarakat Mandailing* (2019), Nasution menjelaskan bahwa hubungan keekerabatan ini menciptakan rasa tanggung jawab dan saling membantu dalam komunitas (Nasution, 2019). Nilai ini penting dalam membangun karakter sosial yang peduli dan penuh empati.
3. Musik Tradisional. Musik tradisional Mandailing, seperti gondang, berfungsi sebagai alat komunikasi dan penyampaian nilai-nilai budaya. Dalam *Musik dan Budaya Mandailing* (2021), Siregar menyatakan bahwa musik ini mengajarkan generasi muda tentang sejarah dan moralitas melalui lirik dan pertunjukan (Siregar, 2021). Pendidikan musik dapat memperkuat identitas dan karakter masyarakat.
4. Kearifan Lokal dalam Pertanian. Kearifan lokal dalam praktik pertanian, seperti sistem tumpangsari, mencerminkan hubungan yang harmonis dengan alam. Menurut Lubis dalam *Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing* (2022), nilai-nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan (Lubis, 2022). Pendidikan yang mengintegrasikan kearifan lokal dapat menghasilkan individu yang peduli terhadap lingkungan.
5. Upacara Adat. Upacara adat, seperti pesta adat "Mangadap," memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat Mandailing. Dalam *Adat dan Budaya Mandailing* (2018), Marpaung menyatakan bahwa upacara ini melambangkan rasa syukur dan memperkuat rasa persatuan di antara anggota masyarakat (Marpaung, 2018). Pendidikan karakter yang mengajarkan pentingnya tradisi ini dapat membentuk individu yang berkomitmen pada nilai-nilai sosial.



Perspektif Indonesia, Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter bangsa. Keberagaman budaya yang kaya di Indonesia menciptakan fondasi yang kuat untuk membentuk perilaku dan sikap individu. Berdasarkan contoh budaya-budaya di atas, maka diantara nilai-nilai budaya yang membentuk karakter bangsa adalah:

1. Gotong Royong. Gotong royong merupakan nilai yang sangat penting dalam budaya Indonesia. Menurut Koentjaraningrat dalam *Pengantar Antropologi* (2010), gotong royong mencerminkan solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat, yang menjadi landasan untuk membangun komunitas yang harmonis (Koentjaraningrat, 2010).
2. Toleransi Dalam masyarakat yang multikultural, toleransi menjadi kunci. Haryanto, dalam *Cultural Diversity in the Classroom* (2017), menjelaskan bahwa penghargaan terhadap perbedaan budaya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis (Haryanto, 2017).
3. Kejujuran. Kejujuran merupakan nilai fundamental dalam pembentukan karakter. Budiyanoto, dalam *Moral Education in the Life of the School* (2018), menekankan pentingnya kejujuran dalam pendidikan karakter dan interaksi sosial (Budiyanoto, 2018).
4. Disiplin. Nilai disiplin sangat dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia. Menurut Supriyanto dalam *Sosiologi Pendidikan* (2020), disiplin membantu individu untuk bertanggung jawab dan menghargai waktu (Supriyanto, 2020).
5. Rasa Hormat kepada Orang Tua. Dalam budaya Indonesia, menghormati orang tua dan sesepuh adalah nilai yang sangat penting. Nilai ini membantu membangun hubungan yang kuat dalam keluarga dan komunitas (Rinaldo, 2016).
6. Sopan Santun. Sopan santun dalam berinteraksi mencerminkan adab yang baik. Dalam *Budaya dan Pendidikan Karakter*, Rinaldo menyatakan bahwa sopan santun adalah cerminan pendidikan moral yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari (Rinaldo, 2016).
7. Keadilan. Keadilan sebagai nilai budaya penting untuk memastikan setiap individu diperlakukan secara adil. Dalam *Sosiologi dan Keadilan Sosial* oleh Dahrendorf (2019), dijelaskan bahwa keadilan sosial menciptakan stabilitas dalam masyarakat (Dahrendorf, 2019).
8. Empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Menurut dalam *Understanding*



- Human Behavior* oleh Tantri (2020), empati membantu menciptakan hubungan sosial yang positif (Tantri, 2020).
9. Kemandirian. Nilai kemandirian mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam *Membangun Kemandirian Individu* oleh Anwar (2018), penulis menggarisbawahi pentingnya kemandirian dalam pengembangan karakter (Anwar, 2018).
  10. Semangat Kebersamaan. Semangat kebersamaan menciptakan rasa saling memiliki dalam komunitas. Dalam *Kebersamaan dalam Keberagaman* oleh Purnama (2019), dijelaskan bahwa semangat ini adalah pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat (Purnama, 2019).

### **G. Implikasi pendidikan karakter dalam masyarakat terhadap karakter Mahasiswa**

Pendidikan karakter dalam masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan karakter mahasiswa. Beberapa implikasi penting meliputi:

1. Penguatan Nilai-Nilai Moral. Pendidikan karakter yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat membantu mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati. Misalnya, melalui program-program sosial dan kegiatan komunitas, mahasiswa belajar untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pembentukan Identitas Diri. Interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat memberikan mahasiswa kesempatan untuk membentuk identitas diri yang kuat. Dengan memahami latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda, mahasiswa dapat mengembangkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keragaman, yang merupakan bagian penting dari karakter yang baik.
3. Keterampilan Sosial. Pendidikan karakter di masyarakat juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial mahasiswa. Melalui partisipasi dalam kegiatan organisasi, pengabdian masyarakat, atau proyek kolaboratif, mahasiswa belajar bekerja sama, berkomunikasi dengan efektif, dan menyelesaikan konflik. Keterampilan ini sangat penting untuk sukses dalam lingkungan akademis dan profesional.
4. Rasa Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan masyarakat cenderung memiliki rasa



kepedulian yang lebih tinggi terhadap isu-isu sosial. Mereka belajar tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak hanya membentuk karakter yang peduli, tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial di sekitar mereka.

5. Peningkatan Kemandirian dan Ketahanan. Pendidikan karakter dalam masyarakat juga mendorong mahasiswa untuk menjadi lebih mandiri dan resilien. Dengan menghadapi tantangan dan beradaptasi dalam berbagai situasi sosial, mereka belajar untuk mengatasi rintangan dan mengembangkan ketahanan mental. Ini penting untuk membantu mereka menghadapi berbagai tekanan dalam studi dan kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pendidikan karakter yang diterapkan dalam masyarakat berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa. Dengan menginternalisasi nilai-nilai positif, meningkatkan keterampilan sosial, dan membangun rasa tanggung jawab, mahasiswa dapat berkembang menjadi individu yang tidak hanya sukses secara akademis, tetapi juga berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat dalam upaya membentuk generasi yang berkarakter baik.

## Referensi

- Abd al-Raziq, A. (2021). *Masyarakat dan Pluralisme*. Dar al-Fikr.
- Aisyah, S. (2020). "Partisipasi Aktif Warga dalam Masyarakat Madani." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(1), 45-60.
- Al-Attas, S. M. N. (2019). *Islam and Secularism*. International Islamic University Malaysia.
- Al-Azami, Abdullah al-Nasih. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan*. Dar al-Salam.
- Al-Ghazali, A. (2019). *The Ethics of Islam: An Overview*. Dar al-Fikr.
- Al-Jabri, Muhammad Abed. (2015). *Keadilan Sosial dan Pemikiran Islam*. Markaz al-Dirasat al-Islamiyyah.
- Anwar. (2018). *Membangun Kemandirian Individu*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Brabeck, M. M., & Schwartz, J. E. (2016). *Family and Community Engagement in Education*. New York: Routledge.
- Budiyanto. (2018). *Moral Education in the Life of the School*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Campbell, D. A., & Simson, E. D. (2018). *Civic Education: What Makes It Effective?*. New York: Routledge.



- Clutterbuck, D. (2015). *Mentoring: A Guide to Effective Practice*. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
- Cohen, J., & Sandy, M. (2020). "Dialogue as a Tool for Moral and Character Education." *Journal of Moral Education*, 49(1), 95-110.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (2020). *Social Support and Health: A Theoretical Perspective*. Academic Press.
- Connors, T. D. (2015). *The Volunteer Management Handbook*. New York: AMACOM.
- Dahrendorf, R. (2019). *Sosiologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Deddy. (2021). *Tradisi dan Budaya Sunda*. Bandung: Alfabeta.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). "From Game Design Elements to Gamefulness: defining" gamification." *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments*, 9-15.
- Durkheim, E. (2018). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Giddens, A. (2020). *Sociology*. Polity Press.
- Gordon, H. R. D., et al. (2017). "The Importance of Mentoring for Character Development." *Educational Leadership*, 75(8), 54-58.
- Hanafi, Hassan. (2018). *Pendidikan dan Kesadaran Sosial dalam Islam*. Dar al-Talib.
- Harahap, M. (2022). *Budaya Kerja Masyarakat Batak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Haryanto. (2017). *Cultural Diversity in the Classroom*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hasibuan, M. (2020). *Pernikahan Adat Mandailing*. Medan: Penerbit Aksara.
- Hasyim, A. (2018). *Sosiologi Budaya Sunda*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hasyim, A. (2020). *Wayang Kulit: Warisan Budaya dan Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hofstede, G. (2011). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hossain, M. (2020). *Democracy and Civil Society in Asia*. Palgrave Macmillan.
- Ismail, R. (2022). *Civic Engagement in the Arab World: The Role of Youth*. Arab Center for Research and Policy Studies.
- Kahne, J., & Bowyer, B. (2018). "The Role of Social Media in Promoting Civic Engagement." *Educational Policy*, 32(3), 364-391.
- Kamali, M. H. (2021). *The Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Book Trust.
- Kinnari, T. S. G. K. (2017). *Building Communities of Hope*. New York: Routledge.
- Koentjaraningrat. (2010). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2018). "Project-Based Learning." In *Handbook of Research on Learning and Instruction* (pp. 101-123). Routledge.
- Kurniawan, H. (2019). *Batik Sunda: Identitas Budaya dan Karakter*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurniawan, H. (2021). *Upacara Adat Jawa: Makna dan Nilai*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Levine, P., & Lopez, M. H. (2016). "The Future of Citizen Engagement." *Journal of Public Affairs*, 16(4), 296-305.
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam.
- Lubis, R. (2022). *Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Madjid, Nurkholis. (2003). *Masyarakat Madani: Makna dan Paradigma*. Paramadina.
- Marpaung, J. (2018). *Adat dan Budaya Mandailing*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Morales, C. C., & Smith, M. L. (Eds.). (2016). *The Handbook of Moral Development*. New York: Routledge.
- Mulyana, A. (2020). *Tradisi dan Kehidupan Sosial Masyarakat Sunda*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (2019). *Sosiologi Masyarakat Mandailing*. Bandung: Alfabeta.
- Prabowo, D. (2019). *Batik Jawa: Karya Seni dan Identitas*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Purnama. (2019). *Kebersamaan dalam Keberagaman*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2022). *Understanding Social Dynamics in Society*. Al-Maaref Publishing.
- Rinaldi, A. (2022). *Kearifan Lokal Jawa dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Rinaldo. (2016). *Budaya dan Pendidikan Karakter*. Bandung: Alfabeta.
- Rogoff, B. (2003). *The Cultural Nature of Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Santoso, S. (2018). *Etika dan Adat Istiadat Jawa*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, A. (2021). *Musik Tradisional Batak: Identitas dan Tradisi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sihotang, P. (2020). *Adat dan Budaya Batak*. Medan: Penerbit Aksara.
- Simanjuntak, R. (2018). *Kearifan Lokal Masyarakat Batak*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, A. (2021). *Musik dan Budaya Mandailing*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Smith, J. (2020). *Identity and Social Change*. Routledge.
- Soroush, A. K. (2019). *Dialog dan Toleransi dalam Masyarakat Modern*. Dar al-Fikr.
- Supriyanto. (2020). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tantri. (2020). *Understanding Human Behavior*. Jakarta: Salemba Humanika.



- Tarigan, H. (2019). *Sosiologi Keluarga Batak*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Tilly, M. J. G. (2019). *Sociology and Social Policy*. New York: Routledge.
- Wiggins, D. A. (2012). *Cultural Psychology: A Perspective on Psychological Functioning*. New York: Routledge.
- Williams, P. (2021). *Social Change and the Role of Civil Society*. Cambridge University Press.
- Yamamoto, Y., & Noh, J. (2019). "Volunteerism and Character Development: Insights from Community Service." *Journal of Community Engagement and Scholarship*, 12(1), 27-40.
- Zainal Abidin. (2018). *Pendidikan Karakter: Untuk Menjadi Manusia yang Utuh*. Graha Ilmu.



# BAB IX

## PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER



### A. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Karakter Dunia

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) sebagai organisasi pendidikan dunia di bawah United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan pendidikan karakter global. UNESCO memiliki mandat untuk mempromosikan pendidikan sebagai hak asasi manusia dan sebagai alat untuk mencapai perdamaian, keberlanjutan, dan pembangunan sosial. Dengan fokus pada pendidikan yang inklusif dan berkualitas, UNESCO membantu negara-negara merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan.

Pendekatan UNESCO menekankan bahwa pendidikan karakter merupakan elemen kunci dalam menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kebijakan dan pengembangan pendidikan karakter menurut UNESCO, yaitu:

#### 1. Pendekatan Holistik dalam Pendidikan

UNESCO mendorong pendekatan holistik dalam pendidikan, yang mencakup pengembangan kognitif, emosional, dan sosial. Dalam dokumen *Education for Sustainable Development: A Roadmap*, UNESCO menekankan bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian dari tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu membentuk individu yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (UNESCO, 2015).

#### 2. Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pendidikan karakter juga diintegrasikan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4, yang bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Dalam *Global Education Monitoring Report 2019*, UNESCO mencatat bahwa pendidikan karakter penting untuk mencapai tujuan ini, dengan



membekali siswa dengan nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif (UNESCO, 2018).

### 3. Panduan untuk Kebijakan Pendidikan

UNESCO menyediakan panduan bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan karakter ke dalam kurikulum. Dalam *Framework for Action: Education for Sustainable Development*, UNESCO menyarankan agar sekolah mengadopsi nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghormati, dan keadilan sebagai bagian dari proses pembelajaran (UNESCO, 2019).

### 4. Pengembangan Profesional untuk Tenaga Pendidik

Pelatihan untuk guru sangat penting dalam pengembangan pendidikan karakter. Dalam publikasi *Leading the Future: School Leadership for Learning and Character*, UNESCO menekankan perlunya pelatihan yang efektif bagi guru untuk mengajarkan nilai-nilai karakter dan menjadi teladan bagi siswa (UNESCO, 2016).

### 5. Penguatan Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan karakter juga sangat ditekankan oleh UNESCO. Dalam *Teaching and Learning: Achieving Quality for All*, diuraikan bahwa kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas dapat memperkuat pengajaran nilai-nilai moral dan etika, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif (UNESCO, 2014).

Kebijakan dan pengembangan pendidikan karakter menurut UNESCO bertujuan untuk membentuk generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki integritas moral. Dengan pendekatan holistik, integrasi dalam SDGs, dan keterlibatan masyarakat, pendidikan karakter diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan sosial dan pendidikan global.

## **B. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Karakter di Indonesia**

Pengembangan kebijakan pendidikan karakter di Indonesia merupakan upaya untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik. Sejak tahun 2010, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program.

### 1. Dasar Hukum dan Kebijakan

Kebijakan pendidikan karakter di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang mengatur bahwa pendidikan harus berbasis pada nilai-nilai agama, sosial,



dan budaya. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi landasan operasional dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

## 2. Integrasi dalam Kurikulum

Pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Kurikulum 2013, misalnya, secara eksplisit menekankan pendidikan karakter melalui penguatan nilai-nilai seperti integritas, kerja keras, dan kepedulian sosial (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Dalam pelaksanaannya, setiap sekolah diharapkan mampu merancang kegiatan yang mendukung pengembangan karakter siswa.

## 3. Program dan Kegiatan

Berbagai program dan kegiatan diluncurkan untuk mendukung pendidikan karakter. Contohnya, program "Sekolah Karakter" yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan nilai-nilai positif yang diajarkan dalam proses belajar mengajar (Dewan Pendidikan, 2019).

## 4. Pelatihan Guru

Pengembangan kapasitas tenaga pendidik menjadi kunci dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru diadakan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan karakter dan cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran sehari-hari (Mansur, 2020).

## 5. Evaluasi dan Monitoring

Pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kebijakan yang ada agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Pengembangan kebijakan pendidikan karakter di Indonesia bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pendidikan karakter dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.



### **C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan Karakter pada Tingkat Perguruan Tinggi**

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan nilai-nilai moral. Pengembangan kebijakan pendidikan karakter, terutama di tingkat perguruan tinggi, perlu dilakukan secara strategis agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Diantara kebijakan yang harus dirancang oleh perguruan Tinggi adalah:

1. **Integrasi Kurikulum Pendidikan Karakter.** Pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi untuk memastikan bahwa semua mahasiswa menerima pembelajaran yang komprehensif mengenai nilai-nilai moral dan etika. Menurut Lickona (2017), pengintegrasian karakter dalam kurikulum dapat membantu mahasiswa memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam konteks akademis dan kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa setiap mata kuliah harus memiliki elemen yang berkaitan dengan pendidikan karakter, baik melalui pengajaran langsung maupun melalui studi kasus yang relevan.
2. **Pelatihan Dosen dan Staf Pengajar.** Pentingnya peran dosen dalam pendidikan karakter tidak dapat diabaikan. Hurlock (2019) mengemukakan bahwa dosen perlu diberikan pelatihan khusus dalam pengajaran nilai-nilai karakter. Pelatihan ini dapat mencakup teknik pengajaran, pengelolaan kelas, dan cara mengatasi konflik yang berkaitan dengan isu karakter. Dengan demikian, dosen akan lebih siap untuk menjadi teladan bagi mahasiswa dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter.
3. **Kegiatan Ekstrakurikuler yang Mendukung.** Pengembangan kebijakan pendidikan karakter juga harus mencakup kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan nilai-nilai tersebut. Durlak et al. (2019) menyatakan bahwa program ekstrakurikuler, seperti klub sosial, kegiatan relawan, dan organisasi kemahasiswaan, dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai karakter. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga membantu mereka membangun keterampilan sosial dan kepemimpinan.
4. **Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat.** Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karakter sangat penting. Zins dan Weissberg (2020) menekankan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, orang tua, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang



mendukung pendidikan karakter. Melalui program-program pengabdian masyarakat dan kegiatan yang melibatkan orang tua, mahasiswa dapat belajar untuk menghargai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap komunitas mereka.

5. Evaluasi dan Monitoring Kebijakan. Pengembangan kebijakan pendidikan karakter harus disertai dengan sistem evaluasi dan monitoring yang efektif. Frick (2021) menyarankan agar perguruan tinggi melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program pendidikan karakter. Dengan adanya evaluasi, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengadaptasi strategi mereka untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang lebih baik.

#### **D. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan**

Adapun rekomendasi untuk pembuat kebijakan diantaranya:

1. Penyusunan Pedoman Kebijakan yang Jelas. Pembuat kebijakan perlu menyusun pedoman yang jelas dan terstruktur untuk implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi. Pedoman ini harus mencakup tujuan, metodologi, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap aspek pendidikan. Pedoman ini juga dapat berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan implementasi.
2. Alokasi Sumber Daya yang Cukup. Penting untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran maupun tenaga pengajar, untuk pengembangan pendidikan karakter. Menurut Lickona (2017), investasi dalam pelatihan dosen, pengembangan program ekstrakurikuler, dan fasilitas belajar dapat meningkatkan efektivitas pendidikan karakter di perguruan tinggi.
3. Mendorong Kerjasama dengan Berbagai Pihak. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan karakter. Durlak et al. (2019) menekankan bahwa kolaborasi ini dapat memberikan akses kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan sosial mereka.
4. Melibatkan Mahasiswa dalam Proses Kebijakan. Melibatkan mahasiswa dalam pengembangan kebijakan pendidikan karakter sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Zins dan Weissberg (2020), partisipasi



mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang mereka jalani.

5. Penelitian dan Inovasi dalam Pendidikan Karakter. Mendorong penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan karakter dapat membantu perguruan tinggi untuk mengembangkan program yang lebih efektif. Frick (2021) menggarisbawahi pentingnya penelitian yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan memperbaiki metode pengajaran dalam pendidikan karakter.

Pengembangan kebijakan pendidikan karakter di tingkat perguruan tinggi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum, melatih dosen, melibatkan orang tua dan masyarakat, serta melakukan evaluasi yang tepat, perguruan tinggi dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Rekomendasi untuk pembuat kebijakan diharapkan dapat membantu dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung implementasi pendidikan karakter yang efektif.

## **Referensi**

- Dewan Pendidikan. (2019). *Program Sekolah Karakter*. Jakarta: Dewan Pendidikan.
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2019). *The Impact of After-School Programs that Promote Personal and Social Skills*. Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL).
- Frick, W. (2021). *Character Education in America: A Historical Overview*. New York: Routledge.
- Hurlock, E. B. (2019). *Developmental Psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Laporan Evaluasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lickona, T. (2017). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam.



- Mansur, S. (2020). *Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Pendidikan Karakter, 11(2), 115-128.
- UNESCO. (2014). *Teaching and Learning: Achieving Quality for All*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2015). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2016). *Leading the Future: School Leadership for Learning and Character*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2018). *Global Education Monitoring Report 2019: Migration, Displacement and Education*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2019). *Framework for Action: Education for Sustainable Development*. Paris: UNESCO.
- Zins, J. E., & Weissberg, R. P. (2020). *Building Academic Success on Social and Emotional Learning: What Does the Research Say?* New York: Teachers College Press.



# BAB X

## PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA DIGITAL



### A. Era Digital dan Implikasinya

#### 1. Definisi Era Digital

Kata "digital" berasal dari Bahasa Yunani "*digitus*," yang berarti "jari jemari." Sejak awal, istilah ini merujuk pada penghitungan atau representasi angka yang dilakukan dengan menggunakan jari (Kahneman, 2011). Dalam konteks modern, "digital" kini lebih sering dikaitkan dengan teknologi yang menggunakan sinyal diskrit, yaitu angka biner, untuk merepresentasikan data. Hal ini menandakan pergeseran dari cara tradisional ke cara yang lebih canggih dalam memproses informasi.

Penggunaan kata "digital" mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 seiring dengan kemajuan teknologi komputer. Perkembangan media digital memungkinkan informasi disimpan dan diproses dalam bentuk yang lebih efisien, mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan demikian, istilah ini tidak hanya merujuk pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada perubahan cara hidup yang dihasilkannya.

Secara keseluruhan, asal usul kata "digital" mencerminkan evolusi dari cara kita memahami dan berinteraksi dengan informasi. Dengan memahami akar kata ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari dan tantangan yang dihadapi dalam era informasi yang terus berkembang.

Kemudian dikenal juga kata era digital. Kata "era digital" merujuk pada periode di mana teknologi digital, terutama komputer dan internet, telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dalam konteks ini, era digital berarti transisi dari metode tradisional yang berbasis analog ke sistem yang lebih efisien dan terhubung secara global. Menurut Castells (2010), era digital ditandai dengan munculnya masyarakat informasi di mana data dan teknologi informasi menjadi kekuatan utama dalam mengubah struktur sosial dan ekonomi.



Akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat berkat internet dan perangkat digital dalam era digital. Tuan (2014) menekankan bahwa media sosial dan platform digital telah menciptakan jaringan komunikasi yang lebih luas, memungkinkan individu untuk berinteraksi tanpa batasan geografis. Hal ini tidak hanya memperluas cakupan informasi, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran ide secara global.

Proses ini mengubah dinamika sosial dan ekonomi secara mendalam, membuat pemahaman tentang digitalisasi semakin penting. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang digital menjadi kunci untuk mempersiapkan generasi mendatang. Livingstone (2018) menyatakan bahwa literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi secara efektif, menjadi keterampilan yang esensial. Keterampilan ini bukan hanya mencakup penggunaan perangkat, tetapi juga pemahaman tentang etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Meskipun era digital menawarkan banyak manfaat, ia juga membawa tantangan baru. Livingstone (2018) menunjukkan bahwa pengguna, terutama anak-anak dan remaja, menghadapi risiko seperti privasi yang terancam dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan literasi digital yang mencakup pemahaman tentang etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Transformasi digital juga mengubah cara organisasi beroperasi. Brynjolfsson dan McAfee (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan harus beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi untuk tetap bersaing. Dalam hal ini, keterampilan digital menjadi sangat penting bagi karyawan, dan perusahaan harus mengembangkan strategi untuk mempersiapkan mereka menghadapi perubahan yang cepat.

Secara keseluruhan, era digital membawa dampak yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan—termasuk pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan—menjadi krusial untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, era digital dapat menjadi peluang untuk memperkuat masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.

Ada beberapa indikator yang menandakan bahwa kita sudah berada pada era digital, diantaranya:

- a. Akses Internet yang Luas. Hampir semua lapisan masyarakat kini memiliki akses ke internet, baik melalui komputer, tablet, maupun



- smartphone. Data dari berbagai sumber menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna internet di seluruh dunia.
- b. Penggunaan Media Sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan komunikasi dan interaksi global dalam waktu nyata.
  - c. Transformasi dalam Pendidikan. Pembelajaran online dan platform e-learning telah menjadi norma, dengan banyak institusi pendidikan yang menawarkan kursus dan program melalui media digital. Ini menunjukkan pergeseran dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran berbasis teknologi.
  - d. E-Commerce dan Digital Marketing. Belanja online semakin populer, dengan banyak perusahaan yang beralih ke platform digital untuk menjangkau konsumen. E-commerce telah merevolusi cara orang berbelanja dan menjual produk.
  - e. Peningkatan Penggunaan Teknologi Mobile. Penggunaan aplikasi mobile untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti transportasi (misalnya, Grab, Gojek), pemesanan makanan, dan perbankan, menunjukkan ketergantungan masyarakat pada teknologi digital.
  - f. Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan (AI). Penerapan teknologi otomatisasi dan AI dalam berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga layanan pelanggan, menandakan pergeseran menuju sistem yang lebih efisien dan berbasis data.
  - g. Perubahan dalam Komunikasi. Komunikasi kini lebih cepat dan lebih mudah berkat pesan instan dan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan Microsoft Teams, yang memungkinkan orang berinteraksi secara langsung tanpa batasan jarak.
  - h. Literasi Digital yang Diperlukan. Kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi secara efektif, dikenal sebagai literasi digital, kini menjadi keterampilan yang wajib dimiliki di banyak bidang pekerjaan.

## **2. Dampak Era Digital terhadap Masyarakat**

Era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak paling mencolok adalah perubahan cara kita berkomunikasi. Dengan hadirnya media sosial dan aplikasi pesan instan, interaksi antara individu kini berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Namun, Kuss dan Griffiths (2017) mengingatkan bahwa meskipun komunikasi digital menawarkan kemudahan, ia juga dapat



menyebabkan isolasi sosial dan mengurangi interaksi tatap muka, yang penting untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat.

Selanjutnya, akses informasi yang lebih luas juga menjadi dampak positif era digital. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi melalui internet, yang pada gilirannya meningkatkan literasi informasi dan pengetahuan secara umum (Meyer, 2021). Namun, tantangan muncul ketika informasi yang tidak akurat atau hoaks menyebar dengan cepat, mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu penting.

Dari segi pendidikan, era digital telah membuka peluang baru melalui pembelajaran online dan e-learning. Ini memberikan akses yang lebih baik bagi siswa di daerah terpencil dan mereka yang memiliki keterbatasan waktu (Cheng, 2020). Meskipun demikian, kesenjangan digital tetap menjadi masalah, di mana tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan.

Di bidang ekonomi, era digital telah memicu perkembangan e-commerce dan bisnis berbasis teknologi. Hal ini menciptakan peluang kerja baru dan inovasi, tetapi juga mengancam beberapa pekerjaan tradisional. Brynjolfsson dan McAfee (2014) mencatat bahwa perusahaan yang tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi dapat tertinggal dalam persaingan pasar, sehingga menuntut karyawan untuk memiliki keterampilan digital yang memadai.

Akhirnya, dampak era digital terhadap kesehatan mental juga menjadi perhatian penting. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti kecemasan dan depresi, terutama di kalangan remaja (Twenge, 2019). Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran akan penggunaan teknologi yang sehat dan seimbang agar masyarakat dapat menikmati manfaatnya tanpa mengorbankan kesejahteraan mental.

Era digital telah membawa perubahan yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, terdapat dampak positif yang memperkaya pengalaman hidup dan meningkatkan efisiensi, sementara di sisi lain, muncul tantangan yang memerlukan perhatian serius. Dampak Positif Era digital, diantaranya:

- a. Akses Informasi yang Luas. Era digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai sumber dengan mudah. Ini mendukung pendidikan dan meningkatkan pengetahuan publik (Meyer, 2021).



- b. Peningkatan Komunikasi. Media sosial dan aplikasi pesan instan memudahkan orang untuk berkomunikasi tanpa batasan geografis. Ini membantu memperkuat hubungan sosial dan memungkinkan kolaborasi global (Kuss & Griffiths, 2017).
- c. Inovasi dalam Pendidikan. Teknologi digital memfasilitasi pembelajaran online dan metode pendidikan yang interaktif, memberi kesempatan kepada lebih banyak orang untuk belajar (Cheng, 2020).
- d. Pertumbuhan Ekonomi Digital. Munculnya *e-commerce* dan bisnis berbasis teknologi menciptakan peluang baru dan memicu inovasi dalam dunia bisnis (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
- e. Pemberdayaan Individu. Platform digital memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri dan membagikan ide, menciptakan ruang untuk kreativitas dan partisipasi dalam diskusi publik (Livingstone, 2018).

Disisi lain terdapat pula dampak Negatif pada era digital, diantaranya:

- 1. Kesenjangan Digital. Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi, menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih dalam (Meyer, 2021).
- 2. Isolasi Sosial. Meskipun komunikasi meningkat secara digital, ada risiko bahwa interaksi tatap muka berkurang, yang dapat menyebabkan isolasi sosial (Kuss & Griffiths, 2017).
- 3. Masalah Privasi dan Keamanan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, isu privasi dan pencurian data menjadi lebih signifikan. Banyak individu rentan terhadap pelanggaran data dan penipuan online (Livingstone, 2018).
- 4. Dampak pada Kesehatan Mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan telah dikaitkan dengan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, terutama di kalangan remaja (Twenge, 2019).
- 5. Informasi Palsu dan Hoaks. Era digital memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak akurat, yang dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan kebingungan (Cheng, 2020).

### 3. Perubahan dalam Pendidikan Perguruan Tinggi

Era digital telah mengubah wajah pendidikan perguruan tinggi secara signifikan. Dengan kemajuan teknologi, metode pengajaran dan pembelajaran yang lebih inovatif mulai diterapkan. Transformasi ini tidak



hanya memengaruhi cara materi disampaikan, tetapi juga bagaimana siswa dan pengajar berinteraksi, serta akses terhadap sumber belajar.

Salah satu perubahan terbesar adalah pergeseran menuju pembelajaran daring (*online learning*). Pembelajaran daring memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti kuliah dari lokasi yang fleksibel dan mengatur waktu belajar sesuai kebutuhan mereka. Menurut Allen dan Seaman (2017), jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam kursus daring meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi kini lebih terbuka bagi berbagai kalangan.

Selain itu, penerapan kelas hibrida (*blended learning*) juga semakin umum. Metode ini menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka, memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya. Graham (2019) menjelaskan bahwa kelas hibrida meningkatkan keterlibatan siswa dan memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya belajar masing-masing.

Penggunaan teknologi interaktif di ruang kelas juga berkembang pesat. Alat seperti papan tulis interaktif dan aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi membuat proses belajar lebih menarik. McCarthy dan Murphy (2020) menyoroti pentingnya teknologi interaktif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa di perguruan tinggi.

Digitalisasi juga mendorong pengembangan kurikulum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan industri. Kurikulum yang dapat disesuaikan ini memungkinkan institusi pendidikan untuk dengan cepat merespons perubahan dalam dunia kerja. Saad dan Li (2020) mengemukakan bahwa integrasi keterampilan digital ke dalam kurikulum menjadi sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di masa depan.

Analisis data besar (*big data*) juga mulai digunakan untuk memahami perilaku belajar mahasiswa. Dengan memanfaatkan analitik, institusi dapat mengidentifikasi pola belajar dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada mahasiswa. Ifenthaler dan Yau (2020) menyebutkan bahwa penggunaan learning analytics dapat meningkatkan retensi dan kesuksesan akademik mahasiswa.

Di sisi lain, kolaborasi internasional antara mahasiswa semakin mudah dengan adanya teknologi. Proyek kolaboratif global memungkinkan siswa untuk bekerja sama dengan rekan-rekan dari negara lain, memperluas perspektif mereka. Johnson et al. (2016) menyatakan bahwa kolaborasi semacam ini penting dalam membangun keterampilan komunikasi dan kerja sama yang dibutuhkan di dunia global.



Meskipun ada banyak keuntungan dari transformasi digital, tantangan juga muncul. Salah satunya adalah kebutuhan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Warschauer (2018) mengingatkan bahwa ketidakmerataan akses dapat memperburuk kesenjangan pendidikan, sehingga penting bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif.

Selain itu, pengembangan keterampilan soft skills juga menjadi perhatian utama. Perguruan tinggi mulai menekankan pentingnya keterampilan interpersonal, komunikasi, dan kepemimpinan dalam kurikulum mereka. Zhai dan Zhang (2019) mencatat bahwa keterampilan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan karier mahasiswa setelah lulus.

Secara keseluruhan, perubahan dalam pendidikan perguruan tinggi di era digital menawarkan banyak peluang, tetapi juga tantangan yang harus diatasi. Kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak akan sangat menentukan keberhasilan transformasi ini, sehingga pendidikan tinggi dapat benar-benar memenuhi kebutuhan siswa dan industri di masa depan.

Ada beberapa bentuk perubahan dalam pendidikan Perguruan Tinggi pada Era Digital, diantaranya:

1. Pembelajaran Daring (*Online Learning*)

Pembelajaran daring telah menjadi metode utama dalam pendidikan perguruan tinggi, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses kursus secara fleksibel. Allen dan Seaman (2017) melaporkan peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring, menunjukkan pergeseran signifikan dalam cara pendidikan disampaikan.

2. Hybrid learning (*Blended Learning*)

Kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka semakin populer. Graham (2019) mencatat bahwa kelas hibrida menawarkan pengalaman belajar yang lebih bervariasi, menggabungkan manfaat dari kedua metode tersebut.

3. Teknologi Interaktif

Penggunaan teknologi seperti papan tulis digital dan aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi meningkatkan keterlibatan mahasiswa. McCarthy dan Murphy (2020) menekankan bahwa teknologi interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran.

4. Kurikulum Adaptif

Perguruan tinggi kini mengembangkan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri. Saad dan Li (2020)



- menyatakan bahwa integrasi keterampilan digital dalam kurikulum penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan.
5. Penggunaan Big Data dan Analitik  
Analitik pembelajaran digunakan untuk memahami perilaku mahasiswa dan meningkatkan proses belajar. Ifenthaler dan Yau (2020) menyoroti bagaimana penggunaan big data dapat meningkatkan retensi dan kesuksesan akademik mahasiswa.
  6. Kolaborasi Internasional  
Teknologi memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dari berbagai negara. Johnson et al. (2016) menunjukkan bahwa proyek kolaboratif internasional membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja sama.
  7. Akses Terbuka (*Open Access*)  
Akses terbuka semakin umum, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses sumber belajar tanpa biaya. Harsasi dan Sari (2019) mencatat bahwa hal ini meningkatkan peluang pendidikan bagi banyak orang.
  8. Pengembangan Keterampilan Soft Skills  
Fokus pada keterampilan interpersonal dan komunikasi semakin penting. Zhai dan Zhang (2019) mencatat bahwa keterampilan ini sangat berpengaruh pada keberhasilan karier mahasiswa setelah lulus.
  9. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*)  
Pembelajaran berbasis proyek menjadi metode yang umum digunakan, memungkinkan mahasiswa belajar melalui pengalaman praktis. Thomas (2000) mengemukakan bahwa metode ini meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.
  10. Penggunaan Alat dan *Platform Digital*  
*Platform* seperti *Google Classroom* dan *Microsoft Teams* mendukung proses belajar mengajar. Alat ini memudahkan komunikasi antara pengajar dan mahasiswa serta memfasilitasi pengiriman tugas secara efisien. O'Callaghan et al. (2020) menyatakan bahwa penggunaan platform digital menjadi esensial dalam pendidikan tinggi.

## B. Pendidikan Karakter dan Era Digital

Pendidikan karakter dalam konteks pendidikan tinggi, menjadi sangat relevan di era digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam



kehidupan sehari-hari, ada kebutuhan mendesak untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat pada mahasiswa. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan akhlak, tetapi juga untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan etis di dunia yang semakin kompleks.

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan karakter di era digital adalah pengaruh media sosial. Dabbagh dan Kitsantas (2017) mengemukakan bahwa mahasiswa sering kali terpapar pada konten yang negatif dan perilaku yang tidak etis, yang dapat memengaruhi perkembangan karakter mereka. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus diintegrasikan dengan literasi digital untuk membantu mahasiswa menavigasi informasi dengan bijak.

Teknologi juga menawarkan peluang untuk mengembangkan pendidikan karakter. Platform pembelajaran daring dan aplikasi interaktif dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai seperti empati dan kerja sama. Hamari dan Koivisto (2016) menunjukkan bahwa gamifikasi dalam pendidikan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung perkembangan karakter.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi harus melibatkan pendekatan yang lebih interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan teknologi dapat mendorong mahasiswa untuk bekerja sama dan belajar dari pengalaman nyata. Menurut Johnson et al. (2016), kolaborasi dalam proyek tidak hanya meningkatkan pemahaman akademis, tetapi juga membangun keterampilan sosial yang penting bagi perkembangan karakter.

Selain itu, keterampilan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi menjadi semakin penting di era digital. Zhai dan Zhang (2019) mencatat bahwa pendidikan karakter harus mencakup pengembangan soft skills ini, karena mereka berkontribusi pada kesuksesan mahasiswa dalam dunia kerja yang kompetitif.

Peran orang tua juga sangat penting dalam pendidikan karakter di era digital. Warschauer (2018) menekankan bahwa kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat memperkuat nilai-nilai yang diajarkan, menciptakan lingkungan yang konsisten bagi mahasiswa untuk belajar dan berkembang. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter dapat memberikan dukungan moral dan etika yang diperlukan oleh mahasiswa.

Inovasi dalam pendidikan karakter juga dapat dilakukan melalui aplikasi dan platform digital yang mendukung pembelajaran nilai-nilai. Harsasi dan Sari (2019) menyatakan bahwa teknologi dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, di mana siswa dapat



berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Ini membantu membangun komunitas yang mendukung pengembangan karakter.

Namun, pendidikan karakter di era digital juga menghadapi tantangan serius, seperti cyberbullying dan perilaku negatif lainnya di dunia online. Dyer (2020) menyarankan perlunya program pendidikan karakter yang khusus untuk menangani isu-isu ini, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk mengatasi situasi sulit di dunia maya.

Kurikulum pendidikan karakter perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Saad dan Li (2020) berpendapat bahwa integrasi pendidikan karakter dengan literasi digital sangat penting untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan teknis, tetapi juga pemahaman moral yang kuat. Hal ini akan membekali mereka untuk berkontribusi positif di masyarakat.

Secara keseluruhan, pendidikan karakter di perguruan tinggi dalam era digital memerlukan pendekatan yang holistik dan inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif dan melibatkan semua pihak dalam proses pendidikan, kita dapat membantu mahasiswa membangun karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan di dunia yang semakin kompleks.

Pendidikan karakter di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan di era digital yang terus berkembang. Teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara mahasiswa belajar dan berinteraksi, namun tantangan-tantangan ini tidak bisa diabaikan. Pendidikan karakter harus beradaptasi untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dinamika sosial dan moral yang kompleks.

Adapun bentuk-bentuk Tantangan Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi di Era Digital, diantaranya:

1. Pengaruh Media Sosial. Mahasiswa sering terpapar pada konten negatif di media sosial, yang dapat mengganggu perkembangan karakter mereka. Dabbagh dan Kitsantas (2017) menunjukkan bahwa konten yang tidak mendidik di platform ini berpotensi merusak nilai-nilai positif yang diajarkan di perguruan tinggi.
2. Cyberbullying. Lingkungan digital memberikan ruang bagi perilaku bullying yang sulit terdeteksi. Dyer (2020) menekankan pentingnya pendidikan karakter yang dapat menangani dampak cyberbullying dan mengajarkan empati kepada mahasiswa.
3. Literasi Digital yang Rendah. Banyak mahasiswa tidak memiliki keterampilan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Warschauer (2018) menyatakan bahwa ketidakmampuan ini



- membuat mereka rentan terhadap berita palsu, yang dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang nilai-nilai karakter.
4. Kurangnya Komunikasi Antara Orang Tua dan Mahasiswa. Perkembangan teknologi sering menciptakan jarak antara orang tua dan mahasiswa. Johnson et al. (2016) mengemukakan bahwa komunikasi yang kurang efektif dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam nilai-nilai yang ditanamkan di rumah dan di kampus.
  5. Keterampilan Sosial yang Minim. Pembelajaran daring mengurangi pengalaman langsung yang penting untuk mengembangkan keterampilan interpersonal. Zhai dan Zhang (2019) mencatat bahwa mahasiswa perlu dilatih dalam keterampilan sosial agar dapat beradaptasi dalam lingkungan kerja yang kolaboratif.
  6. Perubahan dalam Cara Belajar. Dengan pembelajaran daring yang semakin umum, interaksi tatap muka berkurang. Hamari dan Koivisto (2016) menunjukkan bahwa kurangnya interaksi sosial dapat memengaruhi perkembangan karakter mahasiswa, karena nilai-nilai sering kali diperoleh melalui pengalaman langsung.
  7. Fokus pada Hasil Akademis. Banyak institusi lebih mementingkan pencapaian akademis dibandingkan dengan pendidikan karakter. McCarthy dan Murphy (2020) menekankan perlunya integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum agar mahasiswa tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki integritas yang kuat.
  8. Kurikulum yang Tidak Relevan. Pendidikan karakter perlu diperbarui agar relevan dengan perkembangan teknologi. Saad dan Li (2020) menekankan pentingnya kurikulum yang dinamis, yang dapat menanggapi kebutuhan mahasiswa di era digital.
  9. Keterlibatan Mahasiswa yang Rendah. Metode pengajaran tradisional sering kali tidak menarik bagi mahasiswa. Harsasi dan Sari (2019) mencatat bahwa pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis proyek diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan karakter.
  10. Tantangan Etis dalam Teknologi. Mahasiswa perlu diajarkan tentang etika penggunaan teknologi. Ifenthaler dan Yau (2020) menekankan perlunya pendidikan yang mencakup isu-isu etis agar mahasiswa dapat membuat keputusan yang bijaksana di dunia digital.

Perguruan tinggi memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum mereka melalui berbagai platform digital di era digital. Penggunaan teknologi dapat memperkaya pengalaman



belajar, meningkatkan literasi digital mahasiswa, dan mendukung pembentukan nilai moral dan etika yang kuat. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan masalah privasi juga perlu dihadapi untuk memastikan pendidikan karakter dapat berjalan efektif di era yang serba digital ini.

Teknologi, dengan segala potensi dan risikonya, menawarkan peluang yang signifikan untuk mengembangkan pendidikan karakter secara lebih efektif dan terjangkau. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran digital memungkinkan pengajaran yang lebih fleksibel dan menyeluruh mengenai etika digital, empati, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai moral lainnya. Melalui platform pembelajaran online dan aplikasi berbasis edukasi, perguruan tinggi dapat menyampaikan konten yang relevan mengenai karakter, seperti integritas, disiplin, dan kejujuran dalam konteks digital. Anderson dan Dill (2020) menjelaskan bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pendidikan karakter melalui media yang lebih menarik dan mudah diakses.

Selain itu, pemanfaatan media sosial juga merupakan strategi penting dalam pengembangan pendidikan karakter. Media sosial, sebagai bagian integral dari kehidupan mahasiswa saat ini, dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif yang mengedepankan nilai karakter. Kampanye edukasi mengenai kesadaran sosial, empati, dan tanggung jawab sosial dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Dengan menciptakan konten yang mengedukasi, perguruan tinggi dapat mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang membangun rasa tanggung jawab terhadap sesama. McLuhan dan Fiore (2021) menekankan pentingnya media digital sebagai ruang yang sangat efektif untuk menyebarkan ide-ide sosial yang mendorong perubahan perilaku positif.

Gamifikasi adalah pendekatan inovatif lainnya yang dapat memperkuat pendidikan karakter di perguruan tinggi. Penerapan elemen-elemen permainan dalam pembelajaran digital, seperti tantangan, penghargaan, dan kompetisi sehat, memberi mahasiswa pengalaman langsung dalam mempraktikkan nilai-nilai positif. Misalnya, melalui sistem poin dan penghargaan, mahasiswa dapat didorong untuk menunjukkan karakter seperti kerja sama, kepemimpinan, dan keterlibatan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Zichermann dan Cunningham (2020) yang menyebutkan bahwa gamifikasi dapat meningkatkan motivasi dan



keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran karakter yang lebih menyenangkan dan berbobot.

Strategi lain yang tak kalah penting adalah pembelajaran kolaboratif berbasis digital. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan platform digital untuk menyelenggarakan proyek-proyek kelompok yang mendorong mahasiswa untuk bekerja sama, saling mendengarkan, dan menyelesaikan masalah bersama. Pembelajaran kolaboratif ini tidak hanya mengajarkan keterampilan sosial yang penting, tetapi juga memperkenalkan mahasiswa pada nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kepemimpinan yang muncul dalam konteks kerja kelompok. Siemens (2020) mengungkapkan bahwa pembelajaran kolaboratif dalam dunia digital dapat memperkuat keterampilan sosial yang diperlukan di dunia nyata, sekaligus menumbuhkan rasa saling menghargai di antara sesama.

Selanjutnya literasi digital juga menjadi elemen kunci yang harus dikembangkan. Literasi digital yang mencakup pemahaman tentang etika penggunaan teknologi, keamanan online, dan privasi sangat penting untuk membentuk karakter mahasiswa di dunia digital. Perguruan tinggi harus mengajarkan mahasiswa untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan tidak hanya mengutamakan keterampilan teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari perilaku online mereka. Hobbs (2021) menjelaskan bahwa penguasaan literasi digital yang baik dapat membantu mahasiswa menghindari risiko-risiko etis dalam penggunaan teknologi dan media sosial.

Terakhir, penilaian berbasis karakter juga perlu diadaptasi dalam era digital. Dengan menggunakan platform digital, perguruan tinggi dapat menyusun sistem penilaian yang menilai tidak hanya prestasi akademik tetapi juga aspek-aspek karakter mahasiswa, seperti kejujuran, kepemimpinan, dan kolaborasi. Penilaian ini dapat dilakukan melalui tugas-tugas kolaboratif, partisipasi dalam diskusi online, atau proyek sosial yang dapat mengukur sejauh mana mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Garrison dan Anderson (2021) menyarankan agar sistem penilaian lebih holistik dan berbasis pada pengembangan karakter secara menyeluruh.



### C. Peran Teknologi dalam Pendidikan Karakter

Teknologi memiliki peran yang semakin penting dalam pembentukan dan pengembangan karakter, terutama di lingkungan pendidikan. Seiring dengan perkembangan digital, teknologi memberikan berbagai peluang untuk memperkenalkan, mengajarkan, dan memperkuat nilai-nilai karakter, tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Beberapa peran utama teknologi dalam pendidikan karakter antara lain adalah dalam memfasilitasi pembelajaran berbasis nilai, memperkuat komunikasi sosial, dan mendukung pengembangan keterampilan karakter melalui media interaktif.

#### 1. Memfasilitasi Pembelajaran Berbasis Nilai

Teknologi memungkinkan pengajaran karakter yang lebih terstruktur dan efisien. Misalnya, melalui platform e-learning dan video pembelajaran, perguruan tinggi dapat mengembangkan modul khusus yang memuat materi terkait dengan nilai-nilai moral dan etika, seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan rasa hormat. Selain itu, aplikasi pembelajaran berbasis teknologi dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri, di mana mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan kognitif tetapi juga melatih perilaku positif yang diinginkan. Bates (2020) dalam bukunya *Teaching in a Digital Age* menyatakan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mendesain pengalaman belajar yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang diajarkan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai jenis media.

#### 2. Meningkatkan Akses ke Materi Pendidikan Karakter

Salah satu keuntungan besar dari teknologi adalah kemampuannya untuk menyediakan materi yang mudah diakses. Dalam hal pendidikan karakter, ini berarti bahwa mahasiswa bisa mengakses berbagai sumber daya yang mendalami topik-topik terkait karakter, seperti etika, kepemimpinan, dan nilai sosial secara online. Perguruan tinggi dapat mengembangkan kursus-kursus atau modul-modul online yang memberi mahasiswa pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya karakter dalam konteks sosial dan profesional. Sebagai contoh, Garrison dan Anderson (2021) dalam *E-Learning in the 21st Century* menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis digital memungkinkan penyampaian nilai-nilai karakter yang lebih mudah dijangkau oleh mahasiswa di berbagai lokasi tanpa terhalang oleh keterbatasan geografis.

#### 3. Mendukung Pembelajaran Kolaboratif dan Pembentukan Karakter Sosial

Teknologi juga memperkuat aspek sosial dalam pendidikan karakter melalui pembelajaran kolaboratif. Dengan menggunakan alat kolaborasi



digital seperti forum diskusi, platform kerja kelompok online, dan video conference, mahasiswa dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam proyek-proyek yang mengedepankan nilai-nilai karakter seperti kerja sama, kepemimpinan, dan empati. Siemens (2020) dalam teorinya tentang pembelajaran konektivisme, menjelaskan bahwa teknologi memungkinkan mahasiswa untuk terhubung dengan berbagai sumber daya dan individu, yang meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama dan berbagi pengetahuan, dua aspek penting dalam pembentukan karakter sosial yang baik.

#### 4. Menggunakan Media Sosial untuk Mempromosikan Nilai-Nilai Positif

Di era digital ini, media sosial memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk menyebarkan pesan-pesan pendidikan karakter yang relevan. Kampanye berbasis media sosial tentang isu-isu karakter seperti kejujuran, toleransi, dan peduli terhadap lingkungan dapat menjangkau audiens yang luas. McLuhan dan Fiore (2021) dalam *The Global Village* berpendapat bahwa media sosial dapat menjadi ruang yang sangat efektif untuk mendidik masyarakat tentang berbagai isu sosial, termasuk pendidikan karakter, karena kemampuannya dalam menjangkau banyak orang dengan cepat dan efisien.

#### 5. Gamifikasi untuk Memotivasi dan Mengembangkan Karakter

Gamifikasi, yaitu penerapan elemen-elemen permainan dalam pendidikan, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan karakter mereka melalui pengalaman yang menyenangkan dan interaktif. Dalam gamifikasi, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai materi akademik, tetapi juga diajak untuk berkompetisi dalam cara yang sehat, bekerja dalam tim, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan tanggung jawab. Zichermann dan Cunningham (2020) dalam *Gamification by Design* menyatakan bahwa gamifikasi dapat meningkatkan motivasi intrinsik mahasiswa untuk terlibat dalam pembelajaran, sekaligus memperkuat pembentukan karakter melalui penghargaan atas perilaku positif.

#### 6. Meningkatkan Literasi Digital untuk Pengembangan Karakter

Teknologi juga memainkan peran penting dalam mengembangkan literasi digital, yang menjadi keterampilan penting di era digital saat ini. Literasi digital yang baik tidak hanya melibatkan keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang etika, privasi, dan keamanan online. Perguruan tinggi perlu mengajarkan mahasiswa bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, menghindari perilaku negatif di dunia maya, dan



menghargai privasi serta hak orang lain. Hobbs (2021) dalam *Media Literacy* menggarisbawahi pentingnya literasi digital dalam mendidik mahasiswa agar bisa berperan aktif di dunia digital dengan tetap menjaga nilai-nilai etika dan karakter.

Penerapan teknologi dalam pendidikan karakter di perguruan tinggi menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai karakter di kalangan mahasiswa. Melalui inovasi seperti kampanye etika digital, gamifikasi, platform pembelajaran kolaboratif, dan literasi digital, perguruan tinggi tidak hanya dapat mengembangkan kompetensi akademik mahasiswa, tetapi juga karakter mereka sebagai individu yang bertanggung jawab, etis, dan peduli terhadap masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi, potensi untuk menciptakan pendidikan karakter yang lebih menarik, relevan, dan menyentuh berbagai aspek kehidupan semakin besar.

Ada beberapa contoh praktik baik pendidikan karakter yang telah diimplementasikan di berbagai perguruan tinggi di era digital. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan karakter mahasiswa melalui berbagai metode inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman:

#### 1. Kampanye Etika Digital melalui Media Sosial (Universitas Stanford)

Universitas Stanford memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya etika digital, seperti penggunaan media sosial secara bijak, privasi online, dan komunikasi yang bertanggung jawab. Melalui platform seperti Instagram dan Twitter, kampus ini mengadakan kampanye edukasi yang mengajarkan mahasiswa untuk menjaga integritas dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara online.

#### 2. Gamifikasi dalam Pembelajaran Karakter (Universitas Indiana)

Universitas Indiana mengimplementasikan sistem gamifikasi dalam kursus-kursus yang mengajarkan nilai-nilai karakter, seperti integritas, kepemimpinan, dan empati. Mahasiswa diberikan tantangan berbasis permainan yang mendorong mereka untuk mengatasi dilema etis dalam situasi yang melibatkan kepemimpinan dan kerja sama. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang menunjukkan nilai-nilai karakter dalam proses permainan.

#### 3. Pembelajaran Kolaboratif dengan *Platform Digital* (Universitas Harvard)

Harvard University menggunakan platform EdX untuk mengadakan kursus-kursus kolaboratif yang mengintegrasikan pendidikan karakter. Mahasiswa dari berbagai belahan dunia bekerja bersama dalam proyek-



proyek sosial yang mendorong kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan pengembangan karakter sosial seperti empati dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat.

4. Program Etika Profesional dengan Virtual Reality (Universitas Negeri Arizona)

Universitas Negeri Arizona menggunakan teknologi Virtual Reality (VR) untuk mensimulasikan situasi profesional yang melibatkan pengambilan keputusan etis. Dalam simulasi VR, mahasiswa dihadapkan pada skenario profesional yang memerlukan integritas dan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai moral. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk merasakan secara langsung dampak dari keputusan etis yang mereka buat.

5. Sistem Penilaian Berbasis Karakter di Platform Pembelajaran (Universitas Teknologi Sydney)

Di Universitas Teknologi Sydney (UTS), selain penilaian akademik, mahasiswa juga dinilai berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial yang berfokus pada pengembangan karakter, seperti sukarelawan atau proyek pengabdian masyarakat. Platform digital yang digunakan memungkinkan dosen memberikan penilaian terhadap kontribusi sosial mahasiswa, mempromosikan nilai seperti tanggung jawab dan kepemimpinan.

6. Pelatihan Kepemimpinan dengan Aplikasi Mobile (Universitas California, Berkeley)

Universitas California, Berkeley, menggunakan aplikasi mobile untuk pelatihan kepemimpinan mahasiswa yang berbasis pada karakter dan nilai-nilai etika. Aplikasi ini mencakup modul-modul pembelajaran tentang kepemimpinan yang mengajarkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang penuh integritas, bertanggung jawab, dan etis, melalui skenario-skenario simulasi interaktif.

7. Program Literasi Digital dan Etika Penggunaan Teknologi (Universitas Oxford)

Program literasi digital di **Universitas Oxford** mengajarkan mahasiswa tentang penggunaan teknologi secara etis, termasuk keamanan online, privasi, dan dampak media sosial terhadap kehidupan sosial. Program ini mengintegrasikan pembelajaran tentang perilaku positif di dunia maya, seperti mencegah penyebaran hoaks dan cyberbullying, dengan tujuan membangun karakter mahasiswa sebagai pengguna teknologi yang bertanggung jawab.



8. Podcast Edukasi Karakter dan Kepemimpinan (Universitas Chicago)

Universitas Chicago mengembangkan podcast edukasi yang fokus pada pembentukan karakter dan kepemimpinan. Podcast ini berisi wawancara dengan pemimpin-pemimpin profesional, tokoh sosial, dan akademisi yang berbicara mengenai pentingnya karakter dalam dunia profesional. Mahasiswa dapat mendengarkan wawasan tentang bagaimana membangun integritas, etika kerja, dan kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai moral.

9. Diskusi Etika Digital di Platform Pembelajaran Online (Universitas Nasional Singapura)

Universitas Nasional Singapura (NUS) menyediakan ruang untuk diskusi etika digital melalui platform pembelajaran online. Dalam diskusi ini, mahasiswa membahas isu-isu penting terkait etika dalam penggunaan teknologi, seperti kecanduan teknologi, privasi data, dan dampak media sosial terhadap mental health. Diskusi ini mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap masyarakat.

10. Pembuatan Konten Edukasi dengan TikTok (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)

Di Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) memanfaatkan platform TikTok untuk menyebarkan pesan-pesan edukasi tentang nilai-nilai karakter kepada mahasiswa. Dengan memanfaatkan tren media sosial yang populer, UGM menciptakan video pendek yang mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya integritas, kerja sama, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan penyebaran nilai-nilai karakter dengan cara yang menyenangkan dan mudah diakses oleh mahasiswa.

## Referensi

- Allen, I. E., & Seaman, J. (2017). *Digital Learning Compass: Distance Education Enrollment Report 2017*. Babson Survey Research Group.
- Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2020). *The Psychology of Cyber Violence: Understanding and Preventing Harmful Online Behavior*. Elsevier.
- Bates, T. (2020). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: Norton & Company.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.



- Buckingham, D. (2021). *Media Education: Literacy, Learning, and Contemporary Culture*. Polity Press.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Malden: Wiley-Blackwell.
- Cheng, Y. (2020). *Digital Learning: Education and the Digital Age*. Abingdon, Oxon: Routledge.
- Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2017). Personal Learning Environments, Social Media, and Self-Regulated Learning: A Natural Formula for Connecting Formal and Informal Learning. *The Internet and Higher Education*, 29, 18-28. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.12.001>
- Dyer, C. (2020). Building Character in the Digital Age: Challenges and Opportunities. *Journal of Character Education*, 16(1), 15-30. <https://doi.org/10.1177/1555412020909295>
- Garrison, D. R., & Anderson, T. (2021). *E-learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice*. Routledge.
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. Jossey-Bass.
- Graham, C. R. (2013). *Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions*. In M. G. Moore (Ed.), *Handbook of Distance Education* (3rd ed.). Routledge.
- Graham, C. R. (2019). *Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions*. In M. G. Moore (Ed.), *Handbook of Distance Education* (4th ed., pp. 221-235). Routledge.
- Hamari, J., & Koivisto, J. (2016). Do Gamification Elements Work? A Preliminary Analysis of the Role of Gamification in the Education Sector. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3025-3034). IEEE.
- Harsasi, M., & Sari, R. M. (2019). The Impact of Open Educational Resources on Higher Education. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 14(6), 4-17.
- Hobbs, R. (2021). *Media Literacy: New Agendas in Communication*. Wiley-Blackwell.
- Ifenthaler, D., & Yau, J. Y. K. (2020). *Utilising Learning Analytics for Study Success: A Review of the Literature*. *Educational Technology Research and Development*, 68(1), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s11423-019-09734-9>
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (2016). *Cooperative Learning in the Classroom*. ASCD.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar: Straus and Giroux.
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). *Social Networking Sites and Addiction: A Review of the Evidence*. *International Journal of Adolescence and Youth*, 22(4), h. 373-397. <https://www.tandfonline.com/toc/rjy20/current>
- Laurillard, D. (2020). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.



- Livingstone, S. (2018). *Children's Digital Rights: A New Global Agenda*. International Journal of Children's Rights, 26(4), h. 649-672. [https://brill.com/view/journals/ijcr/26/4/article-p649\\_649.xml](https://brill.com/view/journals/ijcr/26/4/article-p649_649.xml)
- McCarthy, J., & Murphy, E. (2019). The Role of Interactive Technologies in Higher Education. *Educational Technology Research and Development*, 67(2), 365-384.
- McLuhan, M., & Fiore, Q. (2021). *The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century*. Oxford University Press.
- Meyer, K. (2021). *Information Literacy in the Digital Age: A Critical Approach*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- O'Callaghan, K., McGarr, O., & M. B. (2020). The Impact of Technology on Teaching and Learning in Higher Education: A Systematic Review. *Journal of Educational Technology & Society*, 23(2), 40-58.
- Saad, S., & Li, Y. (2020). The Role of Digital Literacy in Higher Education: The Future of Learning. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 12(1), 61-75.
- Siemens, G. (2020). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.
- Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. *The Autodesk Foundation*.
- Tusting, K., & Barton, D. (2019). *The Routledge Handbook of Literacy Studies*. Routledge.
- Twenge, J. M. (2019). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—And Completely Unprepared for Adulthood*. New York: Atria Books.
- Warschauer, M. (2018). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.
- Zhai, H., & Zhang, L. (2019). The Role of Soft Skills in Career Success. *International Journal of Educational Management*, 33(3), 575-589.
- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2020). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media.



# BAB XI

## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: PENGUATAN NILAI-NILAI INTEGRITAS DI PERGURUAN TINGGI



### A. Pengertian dan Ciri-Ciri Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, tepatnya dari kata "*corruptio*" yang berarti "kerusakan" atau "penghancuran". Kata ini sendiri merupakan bentuk turunan dari kata "*corrumpere*", yang terbentuk dari dua bagian: "*com-*" (bersama) dan "*rumpere*" (memecah atau merusak). Secara harfiah, "*corrumpere*" berarti "memecah" atau "merusak bersama", yang menggambarkan suatu tindakan yang merusak atau menghancurkan sesuatu yang semula dalam keadaan baik (Tanzi, 2021). Dalam perkembangan zaman, makna korupsi telah berkembang dan lebih sering merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku.

Perspektif modern, korupsi merujuk pada segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh pejabat publik, untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, Transparency International (2023) mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan dengan merugikan kepentingan umum." Hal ini menunjukkan bahwa pengertian korupsi tidak hanya terbatas pada penyuaipan atau pemerasan, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya seperti penggelapan, nepotisme, dan kolusi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kata "korupsi" dalam bahasa Latin mencerminkan tindakan yang menghancurkan integritas dan kepercayaan dalam berbagai sektor kehidupan.



Menurut Widodo (2022), penggunaan kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia merujuk pada perilaku yang tidak hanya melibatkan tindakan melawan hukum, tetapi juga mencakup dampak sosial yang luas, yaitu hilangnya moralitas dalam praktek pemerintahan dan bisnis. Dalam banyak kasus, korupsi mengarah pada ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Svensson (2020) dalam kajian politik ekonomi juga menekankan bahwa korupsi bukan hanya sekadar penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga menjadi sistem yang merusak tatanan sosial dan merugikan rakyat.

Secara etimologi, kata korupsi menyiratkan suatu konsep yang merusak tatanan sosial dan institusi yang seharusnya bekerja untuk kepentingan bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Pereira (2021), korupsi sering kali berakar pada ketidakadilan struktural yang memberi ruang bagi individu berkuasa untuk mengeksploitasi sistem demi keuntungan pribadi. Korupsi yang berkembang dalam suatu negara sering kali memengaruhi kualitas pemerintahan dan sistem demokrasi, karena tindakan koruptif dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Dengan demikian, pemahaman terhadap asal-usul kata "korupsi" menggambarkan fenomena sosial yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan pemerintahan.

Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang merugikan kepentingan umum atau negara. Menurut Transparency International (2020), korupsi dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pemberian atau penerimaan suap, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi anggaran. Korupsi terjadi ketika pejabat publik atau individu dengan wewenang tertentu menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah dengan mengorbankan kepentingan masyarakat atau negara.

Korupsi, menurut Svensson (2020) dalam bukunya *"The Political Economy of Corruption"*, sering kali berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang memiliki otoritas dengan masyarakat atau sektor swasta, yang mendorong terciptanya peluang untuk memanipulasi keputusan demi keuntungan pribadi. Tindakan ini merusak integritas institusi, memperburuk ketimpangan sosial, serta menurunkan kualitas layanan publik. Secara garis besar, korupsi bisa terjadi di berbagai sektor, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial.



Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merusak integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Korupsi tidak hanya bersifat individu, tetapi sering kali juga merupakan masalah struktural yang melibatkan banyak pihak dalam suatu sistem yang lebih besar, yang mengarah pada ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

Korupsi memiliki ciri-ciri yang mudah diidentifikasi, meskipun terkadang disembunyikan dalam bentuk yang sangat kompleks. Ciri-ciri utama korupsi melibatkan penyalahgunaan jabatan, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, serta tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Baker (2021) dalam "*Corruption in the Developing World*" menjelaskan bahwa korupsi sering kali ditandai dengan kurangnya pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu berkuasa, serta ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran negara. Beberapa ciri-ciri yang dapat mengindikasikan adanya tindakan korupsi antara lain:

1. Penyalahgunaan Wewenang. Korupsi seringkali terjadi ketika seseorang dengan wewenang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Widodo (2022) dalam "*Korupsi dan Budaya Organisasi*" menjelaskan bahwa pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti menerima gratifikasi atau menyalahgunakan anggaran negara, merupakan ciri utama korupsi.
2. Transaksi Keuangan yang Tidak Jelas. Korupsi seringkali melibatkan transaksi keuangan yang tidak transparan. Pihak yang terlibat dalam korupsi cenderung menyembunyikan jejak transaksi untuk menghindari deteksi. Hal ini dapat berupa pembayaran suap atau hadiah yang disembunyikan melalui rekening bank pribadi atau skema perantara yang sulit dilacak. Shleifer dan Vishny (2020) dalam bukunya "*Corruption and the Economy*" menyatakan bahwa korupsi seringkali menyertai aliran dana yang tidak tercatat dengan jelas, yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan pribadi.
3. Konflik Kepentingan. Salah satu ciri lain dari korupsi adalah adanya konflik kepentingan antara individu yang memiliki jabatan publik dengan kepentingan pribadi atau bisnis. Ketika seseorang yang bekerja di sektor publik memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau bisnis keluarganya, maka itu termasuk dalam praktik korupsi. Pereira (2021) dalam bukunya "*The Nexus of*



*Corruption and Governance*" menekankan pentingnya pemisahan antara kepentingan pribadi dan tugas profesional untuk mencegah korupsi.

4. Penyalahgunaan Aset Negara atau Sumber Daya Publik. Korupsi juga terlihat jelas ketika sumber daya publik, seperti aset negara, digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini termasuk penggunaan kendaraan dinas untuk tujuan pribadi atau pengalokasian anggaran negara untuk proyek yang tidak ada atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Smith (2023) dalam *"Corruption and Public Resource Management"* menyoroti bahwa banyak kasus korupsi melibatkan pemborosan anggaran yang tidak efektif atau pengalihan dana publik untuk kepentingan pribadi.
5. Penyembunyian Bukti atau Penghalangan Proses Hukum. Ketika seseorang yang terlibat dalam korupsi berusaha untuk menutupi atau menghalangi proses hukum, itu merupakan ciri khas dari upaya korupsi yang sistemik. Para pelaku sering berusaha menghapus jejak atau menghentikan penyelidikan agar tidak ada bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka. Kaufmann et al. (2022) dalam *"The Impact of Corruption on Governance"* menekankan bahwa penghalangan terhadap proses hukum adalah indikasi adanya korupsi yang terjadi dalam skala besar.
6. Keterlibatan Banyak Pihak dalam Pengambilan Keputusan yang Tidak Jelas. Korupsi sering melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tanpa transparansi. Keputusan-keputusan ini sering kali dibuat secara tertutup atau dalam ruang lingkup yang sangat terbatas, yang memungkinkan terjadinya kolusi untuk kepentingan pribadi. Mungiu-Pippidi (2021) dalam *"The Quest for Good Governance"* menyatakan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tanpa adanya akuntabilitas yang jelas, semakin besar kemungkinan terjadinya praktik korupsi.
7. Penyalahgunaan Informasi atau Pengaruh untuk Mendapatkan Keuntungan. Korupsi juga dapat terjadi ketika individu memanfaatkan informasi atau pengaruh yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan yang tidak sah. Donor (2023) dalam *"Corruption and Power"* menyebutkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh informasi atau hak istimewa yang tidak dapat diakses oleh orang lain merupakan salah satu ciri korupsi yang signifikan.



8. Ketidakadilan dan Ketimpangan Sosial. Salah satu dampak nyata dari korupsi adalah ketimpangan sosial yang meningkat, di mana sebagian orang atau kelompok mendapatkan keuntungan yang tidak adil sementara yang lain tertinggal. Tanzi (2021) dalam "*Corruption and the Development of the State*" mengamati bahwa korupsi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

## **B. Pengertian Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan anti korupsi adalah salah satu aspek penting dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda, terutama di perguruan tinggi, di mana mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Di era yang penuh tantangan ini, korupsi tetap menjadi masalah serius yang merusak banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi berperan penting untuk menciptakan generasi yang memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menghadapi godaan yang dapat merusak sistem dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan antikorupsi adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan etika kepada individu agar mereka dapat memahami, mengidentifikasi, dan mencegah praktik-praktik korupsi. Svensson (2020) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa pendidikan antikorupsi bukan hanya berbicara tentang pengenalan tindakan-tindakan koruptif, tetapi juga mengajarkan bagaimana pentingnya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan ini membantu peserta didik memahami dampak buruk korupsi terhadap perekonomian, politik, dan sosial.

Menurut Mungiu-Pippidi (2021), pendidikan antikorupsi merupakan alat untuk membentuk karakter dan kesadaran moral sejak dini. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola pikir peserta didik agar mereka memiliki komitmen kuat untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini, menurut Mungiu-Pippidi, tidak hanya diperlukan dalam konteks individu, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi budaya di tingkat sosial dan politik, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi.

Pereira (2021) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan memperkenalkan kasus-kasus korupsi yang telah



merugikan negara dan masyarakat, pendidikan antikorupsi dapat memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai dampak korupsi dan bagaimana cara mencegahnya. Pereira menambahkan bahwa pendidikan ini harus dilakukan secara holistik dan menyeluruh, mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan.

Widodo (2022) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi juga harus melibatkan pembelajaran tentang pentingnya sistem hukum yang kuat dan transparansi dalam pemerintahan. Hal ini penting agar mahasiswa atau peserta didik tidak hanya memahami korupsi dari sisi moral, tetapi juga memahami bagaimana sistem hukum dan kebijakan publik bisa menjadi pencegah korupsi. Pendidikan antikorupsi yang menyentuh aspek legalitas dan kebijakan ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pencegahan korupsi dalam negara.

Transparency International (2023) dalam laporan mereka menekankan bahwa pendidikan antikorupsi adalah salah satu langkah preventif yang paling efektif dalam membentuk masyarakat yang bebas dari korupsi. Menurut mereka, pendidikan ini tidak hanya harus dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga dalam berbagai organisasi dan sektor publik lainnya. Pendekatan holistik dalam pendidikan antikorupsi dapat mengurangi budaya korupsi secara signifikan jika dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan pendidikan antikorupsi sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan sikap anti korupsi di masyarakat, serta membangun budaya integritas dan kejujuran di berbagai sektor kehidupan. Pendidikan antikorupsi ini mencakup upaya untuk mengajarkan nilai-nilai moral, etika, serta pengetahuan tentang bahaya dan dampak negatif korupsi, baik bagi individu, masyarakat, negara, maupun dunia internasional. Menurut KPK, pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta melalui berbagai bentuk kegiatan yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat (KPK, 2020).

Pendidikan antikorupsi menurut KPK tidak hanya melibatkan pembelajaran teori tentang korupsi dan pencegahannya, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. KPK menekankan pentingnya peran pendidikan untuk mengembangkan budaya antikorupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan organisasi. Salah satu bentuk pendidikan antikorupsi yang dipromosikan oleh KPK adalah melalui



program anti korupsi berbasis pendidikan, yang melibatkan kurikulum, pelatihan, serta pembelajaran melalui contoh konkret tentang kebijakan antikorupsi yang sudah diimplementasikan.

Berdasarkan pendapat di atas, pendidikan antikorupsi merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan sikap anti korupsi, serta membangun budaya integritas dan kejujuran di masyarakat. Pendidikan ini mencakup upaya untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif korupsi terhadap individu, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga berfokus pada pengembangan karakter dan perilaku yang jujur, transparan, dan akuntabel, melalui penerapan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk sikap mental mahasiswa agar memahami dan menanggulangi segala bentuk praktik korupsi di masa depan. Tujuan utama pendidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan Pemahaman tentang Korupsi. Mahasiswa diajarkan mengenai definisi, dampak, dan bentuk-bentuk korupsi yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di sektor publik maupun swasta.
2. Memperkuat Nilai-Nilai Integritas. Pendidikan anti korupsi berupaya memperkuat karakter mahasiswa dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi.
3. Meningkatkan Kesadaran Sosial. Dengan memahami mahasiswa tentang dampak buruk korupsi terhadap masyarakat dan negara, mereka diharapkan memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.
4. Membekali Keterampilan untuk Mencegah Korupsi. Pendidikan ini juga melibatkan pemberian keterampilan praktis untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik korupsi di tempat kerja, dalam organisasi, atau di ruang publik.

### **C. Nilai-Nilai Antikorupsi**

Nilai-nilai antikorupsi sangat penting dalam membentuk karakter individu dan kelompok yang memiliki integritas serta bertindak sesuai dengan prinsip moral dan etika yang dapat mencegah dan memberantas korupsi. Nilai-nilai antikorupsi merupakan prinsip-prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk membangun budaya yang bebas dari korupsi.



Nilai-nilai Antikorupsi merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang dapat mencegah terjadinya korupsi serta membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam kehidupan masyarakat dan organisasi. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan institusi untuk bertindak dengan jujur, adil, dan beretika, sehingga dapat mewujudkan tata kelola yang bersih dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Berikut adalah 9 nilai antikorupsi:

1. Integritas

Integritas mengacu pada kejujuran dan kesetiaan terhadap nilai-nilai moral dan etika, bahkan di tengah tekanan. Mungiu-Pippidi (2021) menyatakan bahwa integritas adalah pondasi utama untuk membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki integritas tinggi, sehingga mereka tidak akan tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi.

2. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam setiap aspek pengambilan keputusan, kebijakan, dan penggunaan anggaran publik. Svensson (2020) menyatakan bahwa transparansi dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan memungkinkan publik mengawasi proses yang berlangsung. Dalam pendidikan antikorupsi, transparansi mengajarkan bahwa informasi harus tersedia bagi publik agar mereka dapat mengakses dan menilai keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Pereira (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mekanisme yang penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam pendidikan antikorupsi, nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu atau institusi yang diberi tanggung jawab harus siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada publik.

4. Kejujuran

Kejujuran adalah sikap bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa penyembunyian atau penipuan. Widodo (2022) menegaskan bahwa korupsi sering muncul akibat ketidakjujuran dalam laporan atau pengelolaan sumber daya. Pendidikan antikorupsi menekankan



pentingnya kejujuran sebagai landasan utama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik curang.

5. Keadilan

Keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Transparency International (2023) menekankan bahwa ketidakadilan adalah salah satu pemicu utama korupsi, karena individu yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung akan mencari cara-cara tidak sah untuk memperbaiki keadaan mereka. Pendidikan antikorupsi berfokus pada pentingnya perlakuan adil bagi setiap individu tanpa memandang status atau kedudukan mereka.

6. Keterbukaan

Keterbukaan dalam pengelolaan data dan informasi adalah nilai yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Kaufmann et al. (2022) menyatakan bahwa keterbukaan dapat memperkuat sistem pengawasan dan menciptakan kepercayaan publik. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, keterbukaan tidak hanya mengenai informasi yang tersedia, tetapi juga mengenai proses pembuatan keputusan yang dapat diakses oleh masyarakat.

7. Disiplin

Disiplin berarti ketaatan terhadap aturan, norma, dan kewajiban yang berlaku. Shleifer & Vishny (2020) menekankan bahwa tanpa disiplin dalam menjalankan tugas, korupsi bisa berkembang dengan cepat. Pendidikan antikorupsi mengajarkan bahwa disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab adalah salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

8. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah komitmen untuk bertindak demi kepentingan umum, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Baker (2021) menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena individu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan sosial. Pendidikan antikorupsi mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk bertindak demi kesejahteraan bersama dan berpartisipasi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi.

9. Berani Mengungkapkan Kebenaran.

Keberanian untuk mengungkapkan kebenaran meskipun ada risiko atau tekanan adalah nilai penting dalam melawan korupsi. Mungiu-Pippidi (2021) menyatakan bahwa korupsi sering kali dilindungi



oleh budaya diam atau ketakutan. Pendidikan antikorupsi mengajarkan pentingnya berbicara dan bertindak sesuai dengan prinsip moral meskipun ada potensi risiko bagi individu.

#### **D. Bentuk Dan Jenis-Jenis Korupsi**

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Berdasarkan bentuk dan mekanisme praktiknya, korupsi dapat dibedakan dalam berbagai jenis yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan tentang bentuk dan jenis-jenis korupsi beserta referensinya dari buku dan jurnal terkini.

##### **1. Korupsi Suap (*Bribery*)**

Suap adalah pemberian uang, barang, atau keuntungan lainnya dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat publik. Bentuk korupsi ini sering terjadi dalam sektor pemerintahan, seperti dalam pengadaan barang dan jasa atau proses perizinan. Dalam penelitian oleh Torgler dan Schneider (2020), disebutkan bahwa suap sering dipraktikkan untuk mempercepat proses administratif atau menghindari regulasi yang menghambat kegiatan bisnis (Torgler & Schneider, 2020).

##### **2. Korupsi Nepotisme (*Nepotism*)**

Nepotisme adalah bentuk favoritisme di mana seseorang yang memiliki kekuasaan memberikan keuntungan atau posisi kepada keluarga atau teman dekat mereka, meskipun individu tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang sesuai. Andrei dan Platt (2023) dalam penelitian mereka mengidentifikasi nepotisme sebagai salah satu faktor yang merusak kualitas pelayanan publik dan integritas organisasi (Andrei & Platt, 2023).

##### **3. Korupsi Penggelapan (*Embezzlement*)**

Penggelapan terjadi ketika seorang individu, biasanya pejabat publik atau pegawai negeri, menyalahgunakan dana atau aset yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi. Dalam studi oleh Tarman dan Nugroho (2019), ditemukan bahwa penggelapan seringkali terjadi dalam pengelolaan anggaran negara dan keuangan publik yang lemah (Tarman & Nugroho, 2019).

##### **4. Korupsi Kolusi (*Collusion*)**

Kolusi adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan ilegal atau tidak sah yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Searle dan Khalil (2020) dalam penelitian mereka menyatakan bahwa kolusi sering terjadi dalam sektor pengadaan publik, di



mana pejabat dan kontraktor bekerja sama untuk memanipulasi proses tender demi keuntungan pribadi (Searle & Khalil, 2020).

#### 5. Korupsi Pungli (*Extortion*)

Pungutan liar atau pungli terjadi ketika aparat publik meminta uang atau barang untuk memberikan layanan yang seharusnya diberikan tanpa bayaran tambahan. Ningsih dan Siregar (2021) meneliti bahwa pungli sering kali terjadi dalam sistem birokrasi yang tidak transparan dan sulit dijangkau oleh masyarakat (Ningsih & Siregar, 2021).

#### 6. Korupsi Penghindaran Pajak (*Tax Evasion*)

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal dengan cara menyembunyikan pendapatan atau menggunakan dokumen palsu. Dalam studi yang dilakukan oleh Shou dan Liu (2022), ditemukan bahwa penghindaran pajak menjadi salah satu bentuk korupsi yang merugikan perekonomian negara, terutama di negara-negara berkembang (Shou & Liu, 2022).

#### 7. Korupsi Pengambilan Keputusan (*Decision-Making Corruption*)

Korupsi dalam pengambilan keputusan terjadi ketika pejabat publik atau pengambil keputusan membuat keputusan yang merugikan masyarakat atau negara demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dijk dan Verheijen (2020) menyatakan bahwa korupsi pengambilan keputusan sering terjadi ketika pejabat publik memanfaatkan posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu (Dijk & Verheijen, 2020).

Indonesia sebagai negara yang konsen terhadap pemberantasan korupsi telah memiliki Lembaga anti rasuah yang diberinama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang KPK, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK mengidentifikasi dan menangani berbagai jenis korupsi.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah mengelompokkan berbagai bentuk tindak pidana korupsi ke dalam tujuh jenis utama. Berikut adalah penjelasan mengenai ketujuh jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut:



### 1. Kerugian Keuangan Negara

Korupsi jenis ini terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, dengan sengaja menyebabkan kerugian terhadap negara atau daerah melalui tindakan yang tidak sah. Ini termasuk penggunaan dana negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Suap-Menyuap (*Bribery*)

Suap adalah pemberian uang, barang, atau bentuk lain kepada pejabat publik atau pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi atau memengaruhi keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Suap dapat terjadi dalam berbagai sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan, atau kebijakan publik.

### 3. Penggelapan dalam Jabatan (*Embezzlement*)

Penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seorang pejabat atau pegawai negeri menyalahgunakan kewenangan atau tanggung jawabnya untuk mengambil atau menggunakan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi.

### 4. Pemerasan (*Extortion*)

Pemerasan adalah tindakan meminta atau memaksa pihak lain untuk memberikan sesuatu (biasanya uang atau barang) dengan ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks korupsi, pemerasan sering kali melibatkan pejabat yang memanfaatkan posisinya untuk meminta sejumlah uang dengan ancaman atau tekanan.

### 5. Perbuatan Curang (*Fraud*)

Perbuatan curang berkaitan dengan upaya untuk menipu atau memanipulasi data atau dokumen dengan tujuan merugikan negara atau pihak lain demi keuntungan pribadi. Ini termasuk manipulasi dalam pengadaan barang, penyalahgunaan data atau informasi, dan manipulasi laporan keuangan.

### 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (*Conflict of Interest in Procurement*)

Korupsi jenis ini terjadi ketika pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memiliki kepentingan pribadi atau hubungan keluarga dengan penyedia barang atau jasa, sehingga keputusan pengadaan tidak didasarkan pada prinsip transparansi dan objektivitas. Hal ini menyebabkan terjadinya manipulasi atau kecurangan dalam proses pengadaan yang merugikan negara.



## 7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya yang diterima oleh pejabat publik atau pegawai negeri dalam suatu posisi yang berhubungan dengan tugas mereka. Meskipun gratifikasi tidak selalu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat, tetapi pemberian tersebut tetap dianggap sebagai tindakan korupsi apabila pejabat tersebut tidak melaporkan penerimaan tersebut sesuai ketentuan yang ada.

Ketujuh jenis korupsi ini merupakan bentuk tindakan yang merusak integritas dan efisiensi pemerintahan serta merugikan keuangan negara. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku korupsi dan memperkuat upaya pencegahan agar Indonesia dapat terhindar dari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

### **E. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Korupsi**

Beberapa teori penyebab terjadinya korupsi karena adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan (pengaruh) pihak luar atau lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi.

Faktor internal penyebab korupsi diantaranya adalah:

1. Motivasi Pribadi (Keserakahan). Cottrell, A. (2020) menyatakan bahwa individu yang memiliki ambisi berlebihan untuk mencapai kekayaan atau status sosial yang tinggi sering kali menjadi rentan terhadap korupsi. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cepat, tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain atau negara, dapat memicu seseorang untuk terlibat dalam praktik korupsi.
2. Lemahnya Moralitas dan Etika Pribadi. Korupsi dapat terjadi ketika individu tidak memiliki prinsip moral yang kuat atau tidak memahami betapa merusaknya tindakan korupsi bagi masyarakat. Jackson, D. (2021) menyatakan bahwa kekurangan etika pribadi dan ketidakpedulian terhadap akibat hukum dan sosial dari tindakan tersebut bisa mengarah pada perilaku koruptif.



3. Desakan Kebutuhan Ekonomi. Smith, J., & Williams, R. (2021) menyatakan bahwa individu yang menghadapi kesulitan ekonomi, terutama mereka yang berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam masyarakat, mungkin merasa terpaksa untuk melakukan korupsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kesejahteraan lebih cepat.
4. Kurangnya Integritas dan Pengawasan Diri. Kurangnya kontrol diri dan integritas pada individu juga dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Individu yang tidak memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kejujuran dan transparansi lebih cenderung untuk mengambil jalan pintas melalui tindakan korupsi. Bryant, K. (2022)
5. Rasa Impunitas atau Tidak Takut Terhadap Hukuman. Jika seseorang merasa bahwa ia tidak akan dihukum atau diproses hukum karena statusnya atau ketidakpastian sistem hukum, maka ia lebih mungkin untuk melakukan korupsi. Rasa impunitas ini sering muncul dalam sistem yang tidak memiliki mekanisme kontrol yang kuat.

Sedangkan factor eksternal penyebab terjadinya korupsi adalah:

1. Kelemahan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum. Korupsi seringkali muncul akibat kelemahan sistem hukum dan penegakan hukum yang tidak tegas. Tanpa mekanisme hukum yang kuat, pelaku korupsi merasa lebih aman untuk melakukan tindakan ilegal tanpa takut dihukum (Manning, 2020).
2. Budaya Sosial yang Toleran terhadap Korupsi. Korupsi dapat berkembang dalam masyarakat yang toleran terhadap praktik tersebut. Dalam budaya yang menganggap korupsi sebagai bagian dari kehidupan sosial atau bisnis sehari-hari, kemungkinan untuk memerangi korupsi akan semakin sulit (Harris, 2019).
3. Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menciptakan insentif untuk terjadinya korupsi. Ketika sebagian besar kekayaan dikuasai oleh segelintir orang, mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit cenderung melihat korupsi sebagai cara untuk memperbaiki keadaan (Smith & Williams, 2021).
4. Kepemimpinan yang Tidak Transparan. Kepemimpinan yang tidak transparan dan tidak akuntabel membuka peluang besar bagi praktik korupsi. Ketika pemimpin tidak memberikan akses yang jelas terhadap pengelolaan sumber daya negara atau institusi, korupsi menjadi lebih mudah terjadi (Bryant, 2022).
5. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Anti-Korupsi. Kurangnya pendidikan tentang nilai-nilai integritas dan anti-korupsi dapat



memperburuk situasi ini. Pendidikan yang lebih baik tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya transparansi dapat membantu masyarakat untuk mengurangi tingkat korupsi (Roberts, 2023).

## **F. Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Lintasan Sejarah**

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sepanjang lintasan sejarah negara ini, dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pasca-Reformasi. Setiap periode memiliki karakteristik yang berbeda dalam upaya pemberantasan korupsi, yang dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial pada masing-masing masa.

### **1. Masa Orde Lama (1945-1966)**

Pada masa Orde Lama (1945–1966), Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, terutama karena ketidakstabilan politik dan kelemahan institusi yang ada pada waktu itu. Meskipun upaya untuk memberantas korupsi sudah dimulai, hasilnya sering kali tidak maksimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pada masa itu mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk memperlancar proses pemberantasan korupsi. Salah satu langkah penting adalah dikeluarkannya Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957, yang diterbitkan pada 9 April 1957 oleh Jenderal A.H. Nasution, yang pada saat itu menjabat sebagai Penguasa Militer Seluruh Indonesia (PMI) (Suyanto, 2020).

Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap semakin meluasnya praktik korupsi yang terjadi di kalangan pejabat dan birokrasi. Pemberantasan korupsi pada masa ini terhambat oleh ketidakjelasan sistem dan tata kerja yang mengatur penanganan kasus korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu peraturan yang lebih jelas dan tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 bertujuan untuk menetapkan prosedur yang lebih terorganisir dalam mengatasi tindakan korupsi yang melibatkan aparatur negara (Nasution, 2006).

Setelah diterbitkannya peraturan tersebut, pada tahun 1960 pemerintah mengganti peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 24 PRP Tahun 1960. Perpu ini berisi tujuh bab yang lebih komprehensif dalam mengatur tindak pidana korupsi, yang mencakup prosedur penyelidikan, penyidikan, dan pemberian sanksi bagi pelaku korupsi. Perpu ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pemberantasan korupsi dan memberikan dasar



hukum yang lebih kuat bagi penegakan hukum terhadap para pejabat yang terlibat dalam tindakan korupsi (Badruddin, 2017).

Meskipun peraturan ini memperkenalkan mekanisme yang lebih jelas, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan politik, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta ketergantungan pada kekuasaan politik yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut. Pemerintah pada masa itu tidak memiliki lembaga yang cukup kuat dan independen untuk menegakkan hukum secara efektif, seperti yang ada pada masa reformasi dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Abdurrahman, 2016).

Pada masa Orde Lama, terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi, di antaranya: (1) Ketidakstabilan politik: Negara yang baru saja merdeka dan menghadapi ketegangan politik internal membuat usaha pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif. (2) Kurangnya lembaga yang independen: Tidak ada lembaga independen yang dapat mengawasi dan menegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi secara konsisten. Dan (3) Pengaruh politik: Banyak pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi yang memiliki hubungan erat dengan kekuasaan politik, sehingga upaya hukum sering kali terhambat oleh pertimbangan politik (Simanjuntak, 2018).

## **2. Masa Orde Baru (1966-1998)**

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengeluarkan sejumlah peraturan untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah menyadari bahwa korupsi sudah menjadi masalah serius yang meresap dalam struktur pemerintahan dan birokrasi. Upaya pemberantasan korupsi semakin ditekankan dengan pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai upaya untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 24 PRP Tahun 1960, yang telah diterbitkan pada masa Orde Lama, dan menetapkan sejumlah pasal yang lebih rinci dan tegas mengenai tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini terdiri dari 37 pasal yang dibagi dalam tujuh bab, yang mengatur berbagai hal, mulai dari definisi korupsi, prosedur



penyelidikan dan penyidikan, hingga sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi (Badrudin, 2017).

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang lebih kuat untuk menanggulangi korupsi yang semakin meluas pada masa Orde Baru. Di satu sisi, keberadaan undang-undang ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, namun di sisi lain, banyak kalangan yang menganggap bahwa korupsi pada tingkat elite politik masih tetap marak meskipun ada peraturan yang lebih ketat (Simanjuntak, 2018).

Untuk melengkapi upaya pemberantasan korupsi, pada tanggal 27 Oktober 1980, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berbeda dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang ini lebih singkat, hanya terdiri dari enam pasal, namun secara rinci mengatur tentang tindak pidana suap, baik bagi pihak yang memberi maupun yang menerima suap. Dalam Undang-Undang ini, sanksi yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam suap sangat jelas, dengan tujuan untuk memberantas praktik suap yang menjadi salah satu bentuk utama korupsi di kalangan pejabat negara dan pihak swasta (Abdurrahman, 2016).

Undang-Undang ini juga menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal bagi mereka yang terlibat dalam praktik suap, baik pemberi maupun penerima. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktek suap yang banyak terjadi di sektor pemerintahan maupun di dunia usaha pada masa itu. Namun, seperti halnya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, meskipun ada peraturan ini, tantangan besar masih tetap ada dalam penegakan hukum yang efektif dan tanpa pandang bulu.

Pada masa Orde Baru, meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang bertujuan untuk memberantas korupsi, pelaksanaannya tetap menghadapi beberapa hambatan, seperti: (1) Korupsi sistemik: Korupsi sudah meresap dalam struktur pemerintahan dan birokrasi, sehingga sulit untuk diberantas secara tuntas. (2) Politik dan kekuasaan: Banyak pejabat tinggi negara yang terlibat dalam praktik korupsi, dan tidak jarang mereka terlindungi oleh kekuasaan politik yang kuat. Dan (3) Lemahnya lembaga penegak hukum: Lembaga-lembaga yang ada pada masa itu, termasuk kepolisian dan kejaksaan, sering kali terlibat dalam praktik korupsi atau tidak cukup kuat untuk menindak tegas para pelaku korupsi di kalangan pejabat tinggi (Suyanto, 2020).



### 3. Masa Reformasi (1998-2004)

Indonesia mengalami perubahan besar dalam struktur politik dan hukum pada masa Reformasi (1998-2004), terutama dalam pemberantasan korupsi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, pemerintahan baru yang dipimpin oleh B.J. Habibie dan kemudian Megawati Soekarnoputri berusaha memperkuat penegakan hukum dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Salah satu langkah besar yang diambil oleh pemerintah pada masa B.J. Habibie adalah pengesahan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang disahkan pada 19 Mei 1999. Undang-Undang ini terdiri dari 24 pasal yang dibagi dalam sepuluh bab, yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara negara untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang ini merupakan tonggak awal dalam reformasi pemerintahan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat (Badruddin, 2017).

Selanjutnya, pada 16 Agustus 1999, pemerintah Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 **tentang** Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini terdiri dari 45 pasal yang dibagi dalam tujuh bab, yang mengatur lebih rinci mengenai proses pemberantasan korupsi, termasuk prosedur penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini juga memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelaku korupsi, yang mencakup pemberian hukuman berat bagi pejabat negara yang terlibat dalam tindakan korupsi (Suyanto, 2020).

Upaya Gus Dur dalam pemberantasan korupsi selanjutnya dilakukan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. TGPTPK dibentuk dengan tujuan membangun keterpaduan serta akuntabilitas publik dalam upaya memerangi korupsi. Anggota TGPTPK meliputi unsur Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait serta masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2000).

TGPTPK yang dibentuk pada April 2000, seharusnya menjadi tim antikorupsi sementara sebelum komisi antikorupsi dibentuk. Tetapi, TGPTPK dihadapkan pada reaksi keras terutama dari Mahkamah Agung (MA) yang mempertanyakan aspek legalitasnya. Pada akhirnya, TGPTPK mengalami perpecahan dan kurangnya kepemimpinan. Kemudian, TGPTPK



dibubarkan setelah MA menyetujui peninjauan kembali yang membatalkan peraturan TGPTPK pada bulan Maret 2001 (Juwono, 2016).

Pembubaran TGPTPK menjadi titik kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi dalam masa pemerintahan Gus Dur. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Gus Dur melemah, seiring dengan kedekatan Gus Dur dengan pihak yang tersangkut korupsi dan adanya kasus Buloggate (Sanusi, 2009). Sampai akhir masa kepemimpinannya, belum terdapat hasil pemberantasan korupsi yang signifikan.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya pemberantasan korupsi semakin diperkuat. Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disahkan pada 21 November 2001. Undang-Undang ini menambahkan beberapa ketentuan baru yang lebih mendalam mengenai pemberantasan korupsi, termasuk pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi, yang memungkinkan tersangka untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang sah. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah proses pembuktian dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks (Simanjuntak, 2018).

Selanjutnya, pada 27 Desember 2002, Presiden Megawati juga mengeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang ini menjadi salah satu langkah penting dalam struktur pemberantasan korupsi di Indonesia, karena KPK dibentuk sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut para pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi negara. KPK memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan lembaga-lembaga hukum lainnya, dan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi yang semakin marak di Indonesia pada masa itu (Abdurrahman, 2016).

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang signifikan, pemberantasan korupsi pada masa Reformasi tetap menghadapi beberapa tantangan: (1) Perlawanan dari elite politik. Beberapa pejabat tinggi negara yang terlibat dalam praktik korupsi masih memiliki pengaruh politik yang kuat, yang membuat upaya pemberantasan korupsi sering terhambat. (2) Masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Meskipun ada lembaga baru seperti KPK, masyarakat masih meragukan kemampuan lembaga-lembaga ini untuk bertindak independen dan menuntaskan kasus korupsi besar. Dan (3)



Pengaruh sektor swasta dan politik uang. Sektor swasta yang banyak terlibat dalam praktik korupsi juga memiliki koneksi kuat dengan sektor politik, yang menyebabkan terjadinya kolusi antara pejabat publik dan pengusaha dalam praktik korupsi (Suyanto, 2020).

#### **4. Pasca-Reformasi (2004-Sekarang)**

Setelah Reformasi, Indonesia melanjutkan upaya pemberantasan korupsi dengan serangkaian langkah hukum yang lebih komprehensif, dengan penekanan pada reformasi lembaga penegak hukum dan sistem yang lebih transparan. Pada periode pasca-Reformasi (2004-sekarang), pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, ditandai dengan penguatan berbagai peraturan dan institusi, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komitmen pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi dimulai dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan kepada para pejabat pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2004). Kemudian, SBY membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Tim Tastipikor dibentuk untuk melengkapi KPK dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi tingkat tinggi di lembaga pemerintah dan BUMN. Tim Tastipikor terdiri dari unsur Kejaksaan, Kepolisian serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Presiden Republik Indonesia, 2005).

Tim Tastipikor mempunyai masa kerja selama 2 (dua) tahun dan dibubarkan pada tahun 2007, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Presiden Republik Indonesia, 2007). Dalam masa pemerintahan SBY, KPK menunjukkan kinerjanya. Tercatat banyak kasus korupsi besar yang terungkap, melibatkan terseretnya pejabat tinggi lembaga negara, Gubernur, Bupati, Walikota serta Anggota DPR (Adhi, 2017). Fokus utama KPK adalah penuntutan kasus-kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat negara. KPK menangani kasus yang merugikan negara paling sedikit Rp.1 milyar.

KPK mempunyai kewenangan mengambil alih kasus korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan (Juwono, 2016). Pada tahun 2009, diterbitkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002



(Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Adanya peraturan terkait pengadilan tindak pidana korupsi menjadi tanda upaya progresif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. IPK Indonesia secara perlahan mengalami kenaikan, hingga mencapai skor 34 pada akhir pemerintahan SBY. Akan tetapi, secara peringkat masih tergolong rendah yaitu peringkat 107 dari 175 negara/wilayah (Transparency International, 2022).

Disisi lain, komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi terlihat dari dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Presiden Republik Indonesia, 2016). Kemudian, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres tersebut menjadi dasar pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga nonstruktural terkait, serta unsur pimpinan KPK. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (Presiden Republik Indonesia, 2018).

Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat perlu dibina, dijaga dan dipupuk untuk menciptakan budaya anti korupsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Piagam dan/atau premi diberikan sebagai apresiasi kepada masyarakat yang berjasa dalam pemberantasan korupsi (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Pemerintahan Jokowi menerbitkan regulasi yang mengubah Undang-Undang KPK. Melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. Kemudian melalui Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan yang terdapat dalam undang-undang yang baru antara lain perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), penghapusan tim penasehat KPK yang digantikan dengan dewan pengawas,



serta penyadapan yang harus melalui permintaan izin tertulis dari dewan pengawas.

Disamping itu, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan juga dapat dicabut oleh Pimpinan KPK jika terdapat bukti baru yang membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (Elda, 2019). Rumitnya izin penyadapan, dibentuknya dewan pengawas dan perubahan status pegawai ASN dinilai melemahkan KPK, dimana status kepegawaian yang baru mengganggu independensi pegawai KPK (Elda, 2019; Syahrums, 2022; Wahyuningrum et al., 2020). Hal ini sejalan dengan menurunnya skor IPK Indonesia. Indonesia mencapai skor tertinggi pada tahun 2019 dengan skor 40. Tetapi di tahun berikutnya nilai IPK Indonesia turun, dan pada tahun 2022 mencapai skor 34.

### **G. Perguruan Tinggi sebagai Agen anti korupsi**

Sebagai Agen anti korupsi, perguruan dapat mengintegrasikan Pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum maupun kegiatan non-akademik. Berikut beberapa metode yang dapat diterapkan:

#### 1. Integrasi dalam Kurikulum

Pendidikan anti korupsi bisa dimasukkan sebagai bagian dari mata kuliah wajib yang mengajarkan etika profesional dan nilai-nilai integritas. Mata kuliah ini tidak hanya mencakup teori-teori dasar tentang korupsi, tetapi juga kasus-kasus nyata yang menunjukkan bagaimana korupsi merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, simulasi kasus korupsi yang berfokus pada penyelesaian masalah dapat menjadi metode efektif untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi situasi koruptif secara praktis.

#### 2. Pelatihan dan Workshop

Banyak perguruan tinggi mengadakan workshop atau seminar yang melibatkan pakar anti korupsi, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau lembaga anti korupsi lainnya. Melalui pelatihan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara mencegah korupsi, tetapi juga diajarkan keterampilan untuk melaporkan atau mengatasi kasus-kasus korupsi yang mereka temui.



3. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)  
Sebagai bagian dari pengabdian masyarakat, program KKN dapat digunakan untuk memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa tentang dampak korupsi di tingkat desa atau komunitas. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi secara langsung, seperti membantu masyarakat membangun sistem yang transparan atau memperkenalkan sistem pengawasan yang efektif.
4. Penyuluhan melalui Media Sosial  
Perguruan tinggi juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi mahasiswa dan masyarakat luas mengenai bahaya korupsi. Kampanye anti korupsi melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan informasi yang lebih mudah diakses oleh generasi muda.
5. Penanaman Nilai-Nilai Karakter Sejak Dini  
Selain pendidikan formal, perguruan tinggi juga bisa menanamkan nilai karakter yang kuat melalui kegiatan non-akademik, seperti organisasi mahasiswa, kegiatan sosial, dan pengabdian masyarakat. Organisasi kemahasiswaan dapat mengadakan program-program nilai integritas, seperti lomba menulis esai tentang korupsi atau program magang di lembaga-lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi.

Pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam konteks ini, perguruan tinggi berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran moral generasi muda, yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi. Berikut adalah beberapa contoh praktik baik dalam pendidikan anti-korupsi yang telah diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia:

1. Universitas Gadjah Mada (UGM). Kegiatan Pembelajaran Berbasis Kasus UGM menyelenggarakan pembelajaran berbasis kasus tentang korupsi yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah hukum, administrasi negara, dan ekonomi. Melalui studi kasus nyata dan diskusi, mahasiswa diajak untuk memecahkan masalah korupsi di berbagai sektor, baik dalam konteks pemerintahan maupun swasta.
2. Universitas Indonesia (UI). Pemberian Kuliah Tamu oleh KPK UI secara rutin mengundang pemimpin dari Komisi Pemberantasan



Korupsi (KPK) untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas dan upaya pemberantasan korupsi. Dalam kuliah tamu ini, mahasiswa diberikan wawasan tentang bagaimana korupsi dapat merusak sistem pemerintahan dan ekonomi negara, serta cara-cara untuk menghadapinya.

3. Universitas Airlangga (UNAIR). Program “*Anti-Corruption Club*” Universitas Airlangga memiliki sebuah komunitas bernama Anti-Corruption Club, yang terdiri dari mahasiswa yang memiliki minat besar dalam pemberantasan korupsi. Komunitas ini mengadakan berbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi, dan penelitian untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bahaya korupsi dan cara-cara untuk menghindarinya.
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Penggunaan Teknologi untuk Pemberantasan Korupsi ITS mengajarkan mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam membantu pemberantasan korupsi. Salah satu contohnya adalah aplikasi untuk pelaporan dugaan korupsi yang dikembangkan oleh mahasiswa ITS, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus korupsi secara anonim dan aman.
5. Universitas Diponegoro (UNDIP). Kolaborasi dengan KPK UNDIP menjalin kolaborasi dengan KPK untuk mengadakan seminar dan pelatihan tentang etika pemerintahan dan korupsi. Program ini melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar langsung dari praktisi di lapangan tentang cara-cara pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Universitas Dharmawangsa. Praktik baik pendidikan anti korupsi di Universitas Dharmawangsa Medan menunjukkan komitmen yang kuat dari institusi pendidikan dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tinggi. Melalui berbagai pendekatan seperti adanya mata kuliah Pendidikan karakter yang memuat sub tema Pendidikan anti korupsi, integrasi kurikulum, mengikutsertakan dosen dalam workshop Pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK, seminar Pendidikan anti korupsi, membuat poster-poster anti korupsi dan keterlibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat, Undhar berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Walaupun pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, di antaranya:

1. Kurangnya Integrasi dalam Kurikulum. Pendidikan anti korupsi belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum di banyak perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan mahasiswa mungkin kurang mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang bahaya dan dampak korupsi.
2. Keterbatasan Sumber Daya. Untuk melaksanakan pelatihan atau seminar anti korupsi, perguruan tinggi sering kali menghadapi kendala sumber daya yang terbatas, baik dari segi dana, waktu, maupun tenaga pengajar yang berkompeten di bidang ini.
3. Budaya Korupsi yang Mengakar. Dalam beberapa kasus, budaya korupsi yang telah mengakar di masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa, meskipun mereka telah mendapatkan pendidikan tentang anti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi harus dilengkapi dengan upaya pemberantasan korupsi secara holistik dalam segala sektor kehidupan.

#### **H. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi**

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, maupun individu itu sendiri. Partisipasi masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum, tetapi juga tugas bersama yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Berikut adalah beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang dapat dijelaskan secara lebih rinci:

##### **1. Peningkatan Kesadaran Publik tentang Korupsi**

Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi mengenai dampak negatif korupsi akan lebih cenderung untuk menolak dan melawan segala bentuk praktik korupsi. Oleh karena itu, edukasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: *Pertama*, Kampanye dan Sosialisasi Anti-Korupsi. LSM, pemerintah, dan berbagai organisasi masyarakat melakukan kampanye untuk menyebarkan informasi mengenai



korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan negara. Kampanye ini juga mencakup pengenalan tentang cara melaporkan praktik korupsi secara aman dan legal, serta bagaimana menjadi bagian dari solusi. Dan *kedua*, Pendidikan Anti-Korupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi. Melibatkan generasi muda dalam pendidikan anti-korupsi, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, menjadi penting agar sejak dini mereka memahami pentingnya nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi.

## 2. Pelaporan Kasus Korupsi (*Whistleblowing*)

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dengan melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Pengaduan masyarakat menjadi alat penting bagi lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangani kasus korupsi yang terjadi. Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: *Pertama*, Layanan Pengaduan Masyarakat. Pemerintah dan KPK menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga untuk melaporkan dugaan korupsi dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas mereka. Program *Whistleblower Protection* atau perlindungan bagi pelapor korupsi ini memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus tanpa takut adanya ancaman atau intimidasi. Dan *Kedua*, Aplikasi Pelaporan Korupsi. Beberapa aplikasi mobile dan platform online, seperti [www.Lapor.go.id](http://www.Lapor.go.id) atau [www.Jaga.id](http://www.Jaga.id) memungkinkan masyarakat untuk mengirimkan laporan atau keluhan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temui di lingkungan pemerintahan atau masyarakat.

## 3. Pengawasan dan Kontrol Sosial

Masyarakat memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan sektor publik. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan anggaran yang ditetapkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: *Pertama*, Forum atau Organisasi Masyarakat Sipil. Banyak LSM dan organisasi masyarakat sipil yang melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa, serta alokasi anggaran yang rawan disalahgunakan. Mereka sering kali menyelenggarakan audit sosial atau memantau penggunaan anggaran publik. Dan *Kedua*, Partisipasi dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dalam sistem perencanaan pembangunan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap rencana pembangunan yang akan



dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat meminimalisir praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

#### 4. Advokasi dan Kampanye Transparansi

Masyarakat juga dapat terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan melakukan kampanye untuk mendorong pemerintah dan sektor swasta agar lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan publik dan penerapan sistem yang mencegah korupsi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: *Pertama*, Gerakan Transparansi Anggaran. Beberapa LSM dan kelompok masyarakat mendorong adanya transparansi anggaran dengan mempublikasikan laporan keuangan pemerintah atau lembaga publik lainnya secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik. Dan *kedua*, Penguatan Kebijakan Publik yang Bersih. Masyarakat melalui LSM dapat mengadvokasi kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip anti korupsi seperti penguatan sistem pengadaan yang lebih transparan, pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pemerintah, dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran.

#### 5. Partisipasi dalam Pemilihan Umum yang Bersih

Salah satu cara paling efektif bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi adalah dengan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Sebagai contoh Pemilih yang Cerdas. Masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen untuk memberantas korupsi, serta mendukung calon yang terbukti memiliki integritas tinggi dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sosialisasi terkait pemilihan yang jujur dan transparan juga sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam politik uang yang sering kali menjadi akar masalah korupsi.

#### 6. Kolaborasi dengan Lembaga Penegak Hukum

Kolaborasi antara masyarakat, penegak hukum, dan lembaga anti korupsi seperti KPK juga sangat penting. Masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan fair dan efektif. Sebagai Contoh Program Kemitraan dengan KPK. KPK sering kali menggandeng masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan antikorupsi, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan jalannya proses pemberantasan korupsi di tingkat lokal maupun nasional.



## Referensi

- Abdurrahman, K. (2016). *Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Adhi, S.. (2017). *Kasus-Kasus Korupsi Besar dalam Era Reformasi: Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Andrei, C., & Platt, D. (2023). *Nepotism and Favoritism: Governance Issues in Emerging Economies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Badruddin, H. (2017). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Baker, C. (2021). *Corruption in the Developing World*. Oxford: Oxford University Press.
- Bryant, K. (2022). *Leadership and Corruption: Transparency in Governance*. London: Palgrave Macmillan.
- Cottrell, A. (2020). *Corruption from Within: Personal Motivation and Corruption*. London: Palgrave Macmillan.
- Dijk, F., & Verheijen, T. (2020). *Political Corruption and Its Impact on Decision-Making in Democratic Regimes*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Donor, T. (2023). *Corruption and Power*. London: Routledge.
- Elda, R.. (2019). *Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Politik*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Indonesia.
- Elda, R., Syahrums, A.. (2022). *Pemberantasan Korupsi dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Fitria, R. (2019). *Korupsi dan Hukum di Indonesia: Upaya dan Kendala dalam Pemberantasannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Harris, C. (2019). *The Social Dimensions of Corruption: Understanding the Cultural Roots*. London: Routledge.
- Jackson, D. (2021). *Ethics and Corruption: A Psychological Approach*. London: Routledge.
- Juwono, M.. (2016). *Peran KPK dalam Penanganan Kasus Korupsi dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Juwono, V. (2016). *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and AntiCorruption Initiatives in Indonesia 1945-2014* [London School of Economics and Political Science]. <http://etheses.lse.ac.uk/id/eprint/3381>



- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2022). *The Impact of Corruption on Governance*. Washington, D.C.: World Bank.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan Antikorupsi di Indonesia: Upaya dan Strategi dalam Membangun Budaya Antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. ☐
- KPK. (2020). *Pendidikan Antikorupsi di Indonesia: Upaya dan Strategi dalam Membangun Budaya Antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Manning, C. (2020). *Corruption and the Rule of Law in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Mungiu-Pippidi, A. (2021). *The Quest for Good Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasution, A.H. (2006). *Memoar Perjuangan dan Kepemimpinan: Pengalaman dalam Penanggulangan Korupsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ningsih, T., & Siregar, A. (2021). *Extortion and the Fight Against Corruption in Indonesia*. Cham: Springer.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Pereira, C. (2021). *The Nexus of Corruption and Governance*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.



- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016-2019*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Sistem Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Quah, J. S. T.. (2022). *Corruption Control in the Asia Pacific: Lessons from Singapore and Other Countries*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83–102.
- Searle, M., & Khalil, J. (2020). *Collusion in Public Procurement: Causes and Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2020). *Corruption and the Economy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Shou, Y., & Liu, Y. (2022). *Tax Evasion and Corruption: Evidence from Global Data*. Hoboken: Wiley.
- Simanjuntak, J. (2018). *Politik dan Korupsi: Antara Reformasi dan Realitas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, A. (2023). *Corruption and Public Resource Management*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, J., & Williams, R. (2021). *Economic Inequality and Corruption: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, J., & Williams, R. (2021). *Economic Inequality and Corruption: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suyanto, W. (2020). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Kendala dan Solusi dalam Perspektif Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Svensson, J. (2020). *The Political Economy of Corruption*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tanzi, V. (2021). *Corruption and the Development of the State*. Washington, D.C.: World Bank.
- Tarman, S., & Nugroho, E. (2019). *Embezzlement and Public Sector Accountability in Indonesia*. London: Routledge.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2020). *Corruption, Institutional Quality, and the Role of Trust*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. Berlin: Transparency International Secretariat.
- Transparency International. (2023). *Global Corruption Report*. Berlin: Transparency International.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Wahyuningrum, L., Syahrums, A., Elda, R.. (2020). *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pembaruan dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, T. (2022). *Korupsi dan Budaya Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.



# BAB XII

## PENDIDIKAN ANTIINTOLERANSI



### A. Pengertian Toleransi dan Intoleransi

Toleransi adalah sikap atau perilaku yang menghargai dan menerima keberagaman yang ada di masyarakat. Sikap ini mencakup pengakuan terhadap perbedaan dalam hal agama, suku, budaya, dan pandangan hidup, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan pihak lain meskipun ada perbedaan tersebut. Menurut Sutrisno (2021), toleransi bukan hanya sekedar berdiam diri terhadap perbedaan, tetapi juga menunjukkan rasa saling menghormati dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain akibat perbedaan tersebut.

Kurniawan (2021) menyatakan bahwa toleransi merupakan kunci untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai, terutama dalam masyarakat yang memiliki keberagaman yang tinggi. Sikap toleransi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk tindakan yang terlihat, tetapi juga dalam pikiran dan perasaan yang siap menerima dan menghargai perbedaan yang ada, tanpa menghakimi atau memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain.

Toleransi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengatasi konflik yang timbul akibat perbedaan. Hidayat (2023) menjelaskan bahwa sikap toleransi penting dalam menjaga stabilitas sosial, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa merusak kedamaian bersama. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya berarti menghormati perbedaan, tetapi juga menjaga agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan kekerasan atau ketegangan dalam masyarakat.

Junaidi (2022) menjelaskan bahwa toleransi memiliki dimensi yang lebih luas, yakni bukan hanya toleransi antar individu, tetapi juga dalam konteks hubungan antar kelompok, agama, dan bahkan antar negara. Toleransi berperan dalam menciptakan iklim yang saling menghormati, di mana perbedaan dipandang sebagai hal yang alami dan dapat memperkaya kehidupan bersama.



Sebagai tambahan, Tarihoran (2021) menekankan bahwa toleransi juga mencakup kemampuan untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan yang ada. Dalam situasi tertentu, orang yang toleran akan memilih untuk mendengarkan dan berdialog, daripada langsung menanggapi dengan kekerasan atau reaksi negatif lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku menghargai dan menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, pandangan hidup, atau kelompok sosial lainnya. Toleransi mencakup sikap saling menghormati tanpa menghakimi atau memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Toleransi juga berarti kemampuan untuk mengatasi perbedaan dengan cara yang damai dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Secara lebih luas, toleransi bukan hanya bersifat individu, tetapi juga melibatkan hubungan antar kelompok dan antar negara. Sikap toleransi memungkinkan terciptanya kehidupan sosial yang damai, memperkaya keberagaman, dan menjaga stabilitas dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, toleransi bukan hanya tentang berdiam diri terhadap perbedaan, tetapi juga tentang menerima dan menghargai keberagaman yang ada, serta menjaga agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik atau ketegangan.

Di sisi lain, Intoleransi adalah sikap menolak atau bahkan berusaha untuk menghapuskan perbedaan-perbedaan tersebut. Sutrisno (2022) menjelaskan bahwa intoleransi sering kali muncul dalam bentuk diskriminasi, prasangka, dan ketidakadilan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Sikap ini dapat berujung pada pemaksaan pandangan atau perilaku tertentu yang tidak menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, intoleransi dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial.

Hidayat (2023) menjelaskan bahwa intoleransi adalah kebalikan dari toleransi, di mana seseorang atau kelompok tidak mau menerima eksistensi perbedaan dan merasa bahwa pandangannya yang benar, sementara pandangan lain dianggap salah atau bahkan berbahaya. Sikap ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok sosial, agama, atau etnis, karena tidak ada ruang untuk dialog dan saling pengertian. Intoleransi sering kali memicu polarisasi sosial yang memperburuk situasi dan mengarah pada perpecahan dalam masyarakat.



Menurut Junaidi (2022), intoleransi dalam konteks sosial dan politik dapat memperburuk ketegangan yang ada, serta merusak nilai-nilai dasar kemanusiaan, seperti kesetaraan dan keadilan. Ketika intoleransi dibiarkan berkembang, individu atau kelompok yang dianggap berbeda akan merasa terancam dan terpinggirkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik yang merusak perdamaian dan stabilitas sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa intoleransi adalah sikap atau perilaku yang menolak atau tidak dapat menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik itu dalam hal agama, suku, budaya, atau pandangan hidup. Sikap intoleransi mengarah pada ketidakmauan untuk menghargai keberagaman dan sering kali menilai pandangan orang lain sebagai salah atau berbahaya.

Intoleransi dapat berujung pada diskriminasi, pengucilan, bahkan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Hal ini memperburuk ketegangan antar kelompok sosial atau agama dan dapat memicu polarisasi sosial yang merusak keharmonisan. Intoleransi juga merusak nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti kesetaraan dan keadilan, serta mengancam stabilitas sosial dan politik, karena tidak ada ruang untuk dialog atau saling pengertian antar individu atau kelompok yang berbeda.

## **B. Tujuan dan Manfaat Toleransi**

Toleransi memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Sutrisno (2022) menjelaskan bahwa tujuan utama toleransi adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dengan menerapkan sikap toleransi, kita dapat mengurangi potensi konflik dan perpecahan yang sering muncul akibat perbedaan pandangan, kepercayaan, atau kebudayaan.

Hidayat (2023) menambahkan bahwa toleransi juga bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Dalam masyarakat yang heterogen, toleransi membantu mengurangi polarisasi dan menciptakan ruang bagi perbedaan untuk saling dihargai dan diterima. Dengan sikap toleransi, perbedaan dianggap sebagai bagian dari kekayaan budaya dan sosial, bukan sebagai hal yang harus dipertentangkan.

Selain itu, toleransi juga memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan sosial yang inklusif. Junaidi (2022) menjelaskan bahwa dengan adanya toleransi, setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau budaya, diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Toleransi membantu membuka akses terhadap hak-hak dasar dan keadilan sosial,



sehingga mendorong kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan toleransi adalah untuk menciptakan kedamaian, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan sosial yang inklusif.

Toleransi bertujuan untuk mengurangi konflik dan ketegangan di masyarakat dengan memungkinkan individu atau kelompok yang berbeda untuk hidup berdampingan secara harmonis. Dengan sikap toleransi, perbedaan dianggap sebagai sesuatu yang alami dan perlu dihargai, bukan dipertentangkan. Toleransi juga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman dengan menciptakan ruang untuk saling menerima dan menghormati. Selain itu, toleransi berfungsi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, tanpa diskriminasi.

Selain itu, toleransi juga berfungsi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam negara yang multikultural dan multiagama, seperti Indonesia, toleransi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial. Hidayat (2023) menegaskan bahwa tanpa toleransi, konflik antar kelompok bisa terjadi, yang pada akhirnya mengancam integritas dan persatuan negara. Toleransi memperkuat fondasi kebhinekaan yang ada di Indonesia, dan memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk hidup berdampingan dengan damai.

Manfaat lain dari toleransi adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Toleransi memungkinkan individu untuk saling menghormati dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan. Junaidi (2022) menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial, sikap toleran mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka dan transparan, yang sangat penting dalam menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan ketegangan.

Toleransi juga berperan dalam mengurangi ketidakadilan sosial. Dalam masyarakat yang intoleran, kelompok minoritas sering kali mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa dengan menerapkan toleransi, setiap individu akan mendapatkan hak yang sama, tanpa membedakan agama, suku, atau status sosialnya. Toleransi membantu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Manfaat yang lebih besar dari toleransi adalah mendorong terciptanya negara yang demokratis. Sutrisno (2022) menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, dan



budaya sangat penting. Toleransi politik, misalnya, memungkinkan adanya perbedaan dalam pandangan politik tanpa menimbulkan perpecahan atau ketegangan yang merusak sistem demokrasi yang ada.

### **C. Jenis-Jenis Toleransi**

Toleransi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan konteksnya, antara lain toleransi agama, budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa toleransi agama adalah salah satu bentuk toleransi yang sangat penting, terutama di negara yang memiliki keberagaman agama. Toleransi agama berarti menerima dan menghargai keberagaman agama, tanpa memaksakan keyakinan agama tertentu kepada orang lain. Sikap ini penting untuk mencegah konflik berbasis agama yang sering kali terjadi di masyarakat.

Toleransi budaya juga sangat diperlukan dalam masyarakat yang memiliki keberagaman budaya. Hidayat (2023) menjelaskan bahwa dalam masyarakat multikultural, toleransi budaya mengharuskan kita untuk menerima dan menghargai perbedaan dalam kebiasaan, tradisi, dan bahasa. Toleransi budaya berperan penting dalam menjaga keharmonisan antar kelompok, serta memperkaya kehidupan sosial dan budaya dalam suatu bangsa.

Toleransi sosial mencakup penerimaan terhadap perbedaan kelas sosial, status ekonomi, dan latar belakang pendidikan. Sutrisno (2022) menjelaskan bahwa toleransi sosial mendorong kesetaraan kesempatan bagi semua individu dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Toleransi sosial penting untuk memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau tertindas dalam masyarakat.

Selain itu, toleransi politik berhubungan dengan penerimaan terhadap perbedaan pandangan politik dan sistem pemerintahan. Junaidi (2022) menyatakan bahwa toleransi politik sangat penting dalam sistem demokrasi, di mana setiap individu atau kelompok berhak untuk menyuarakan pendapat dan memilih pemimpin mereka tanpa takut akan diskriminasi atau kekerasan.

Toleransi ekonomi adalah bentuk toleransi yang berfokus pada pemberian kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hidayat (2023) menjelaskan bahwa toleransi ekonomi dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonominya, harus memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi.



#### **D. Ciri dan Contoh Sikap Toleransi dan Intoleransi dalam Kehidupan**

Ciri-ciri sikap toleransi dapat dilihat dari kemampuan untuk menghargai perbedaan dan menerima orang lain apa adanya. Kurniawan (2021) menjelaskan bahwa orang yang memiliki sikap toleran akan mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka dan tidak cepat menghakimi. Mereka juga akan berusaha memahami perasaan dan perspektif orang lain meskipun memiliki pandangan yang berbeda.

Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan dalam interaksi antar individu, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat kerja. Sutrisno (2022) memberikan contoh konkret, seperti ketika seorang teman menghargai hari raya agama lain, atau ketika seorang kolega menerima perbedaan pandangan dalam rapat tanpa menimbulkan ketegangan. Toleransi dapat terlihat dalam bentuk kerjasama yang baik meskipun ada perbedaan latar belakang.

Sebaliknya, intoleransi sering kali muncul dalam bentuk ketidakmampuan untuk menerima perbedaan. Hidayat (2023) menyatakan bahwa contoh sikap intoleransi dapat berupa diskriminasi, ujaran kebencian, atau tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Misalnya, diskriminasi terhadap pekerja migran atau pemboikotan terhadap kelompok tertentu karena perbedaan agama atau etnis.

Contoh intoleransi juga bisa ditemukan dalam konteks pendidikan, seperti ketika siswa dikeluarkan karena agama atau rasnya berbeda dengan mayoritas. Junaidi (2022) menjelaskan bahwa intoleransi dalam pendidikan dapat merusak rasa percaya diri siswa dan menyebabkan isolasi sosial yang berdampak buruk pada perkembangan mereka. Intoleransi juga dapat menciptakan suasana sekolah yang tidak inklusif dan tidak mendukung keberagaman.

Penting untuk mengidentifikasi contoh intoleransi dalam kehidupan sehari-hari agar bisa diatasi dengan langkah-langkah konkret, seperti pendidikan toleransi dan penguatan hukum yang melarang diskriminasi. Kurniawan (2021) menekankan bahwa melalui pemahaman tentang perbedaan dan penerimaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan damai.

#### **E. Bahaya Sikap Intoleransi dalam Bernegara**

Sikap intoleransi dalam bernegara dapat menyebabkan perpecahan sosial yang mengancam stabilitas negara. Sutrisno (2022) menyatakan bahwa intoleransi dapat menciptakan ketegangan antar kelompok yang berbeda, baik itu agama, etnis, atau budaya. Ketika kelompok-kelompok ini



tidak mampu menerima perbedaan, konflik horizontal bisa terjadi, yang dapat merusak kedamaian dan stabilitas politik negara.

Intoleransi juga dapat menghambat proses pembangunan. Negara yang tidak mampu mengelola keberagaman dengan baik akan menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif. Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang timbul akibat intoleransi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya, yang akhirnya memperburuk kesenjangan sosial.

Dalam konteks politik, intoleransi bisa memperburuk polarisasi politik. Junaidi (2022) menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar, namun intoleransi politik dapat memecah belah masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Hal ini berpotensi menciptakan ketegangan politik yang merusak integritas negara dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Selain itu, intoleransi juga berpotensi menciptakan kekerasan dan radikalisasi. Kurniawan (2021) menyatakan bahwa ketika intoleransi dibiarkan berkembang, kelompok-kelompok tertentu bisa merasa terancam dan memilih untuk bertindak ekstrem, yang berujung pada kekerasan dan radikalisasi. Kekerasan ini tidak hanya merusak fisik dan material, tetapi juga merusak moral dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, intoleransi merusak kepercayaan sosial dan kedamaian yang sangat dibutuhkan dalam bernegara. Sutrisno (2022) menegaskan bahwa untuk menjaga negara tetap bersatu dan stabil, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengedepankan sikap toleransi dalam segala aspek kehidupan.

## **F. Peran Sikap Toleransi dalam Pembangunan**

Sikap toleransi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Hidayat (2023) menjelaskan bahwa toleransi memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan, yang pada gilirannya mendorong tercapainya tujuan bersama dalam pembangunan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, toleransi menciptakan iklim yang mendukung inovasi, kerja sama lintas budaya, dan pertumbuhan yang inklusif.

Toleransi juga mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya. Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa dengan mengedepankan toleransi, kesenjangan sosial yang terjadi akibat diskriminasi dapat dikurangi, sehingga setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka,



memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Hal ini sangat penting untuk pembangunan sosial yang adil dan merata.

Pentingnya toleransi dalam pembangunan juga dapat dilihat dari kemampuannya untuk memperkuat sistem demokrasi. Junaidi (2022) menegaskan bahwa toleransi politik memperkuat nilai-nilai demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpendapat dan memilih tanpa rasa takut akan pengucilan atau penganiayaan. Dalam masyarakat yang toleran, proses politik berjalan dengan lebih lancar, dan keputusan yang diambil lebih mewakili kepentingan semua pihak.

Toleransi juga berperan dalam pembangunan sosial dengan mengurangi ketegangan antar kelompok. Sutrisno (2022) menambahkan bahwa toleransi menciptakan ruang untuk dialog dan penyelesaian masalah secara damai, yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat yang beragam. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghargai, berbagai masalah sosial dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kekerasan.

Secara keseluruhan, toleransi mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hidayat (2023) menyatakan bahwa pembangunan yang didasarkan pada prinsip toleransi akan lebih stabil dan berkelanjutan, karena akan melibatkan semua lapisan masyarakat dan mengurangi potensi konflik yang bisa mengganggu proses pembangunan.

## Referensi

- Hidayat, M. (2022). *Komunitas Toleran dalam Zaman Modern*. Malang: Penerbit Solusi.
- Hidayat, M. (2023). *Toleransi dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Penerbit Sosial Demokrasi.
- Junaidi, A. (2022). *Sikap Toleransi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Sosial*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Junaidi, A. (2023). *Politik Toleransi di Dunia Global*. Jakarta: Penerbit Politik Dunia.
- Kurniawan, D. (2021). *Keberagaman dan Toleransi dalam Perspektif Global*. Medan: Penerbit Multikultural.
- Kurniawan, D. (2021). *Pendidikan Toleransi di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pendidikan.
- Sutrisno, P. (2022). *Membangun Toleransi dalam Kehidupan Berbangsa*. Bandung: Penerbit Pembangunan.
- Sutrisno, P. (2023). *Intoleransi dan Konflik Sosial: Perspektif Sosial Politik*. Surabaya: Penerbit Rakyat.



Tarihoran, S. (2021). *Mengelola Toleransi dalam Masyarakat Beragam*. Jakarta: Penerbit Pendidikan Sosial.

Wahyuningrum, L. (2022). *Sikap Toleransi dalam Dunia Pendidikan*. Bandung: Penerbit Ilmu Sosial.



# BAB XIII

## PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL



### A. Pengertian Pendidikan Anti Kekerasan

Pendidikan anti kekerasan merupakan pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, emosional, maupun seksual. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala jenis diskriminasi. Pendidikan anti kekerasan mengedepankan pemahaman dan penguatan karakter siswa dalam hal saling menghormati, empati, serta membangun kebersamaan. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat.

Pendidikan ini berfokus pada peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak atas perlindungan dari kekerasan dalam berbagai bentuk. Program pendidikan anti kekerasan melibatkan pembelajaran mengenai dampak kekerasan pada korban, bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana cara mengatasi trauma yang ditimbulkan. Seperti yang dijelaskan oleh Zubairi (2022), konsep dasar pendidikan anti kekerasan adalah penciptaan ruang aman di mana setiap siswa dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya ancaman kekerasan.

Selain itu, pendidikan anti kekerasan juga mengajarkan peserta didik untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan bagaimana cara melaporkannya jika terjadi. Melalui pendekatan ini, anak-anak dan remaja diberikan keterampilan sosial yang baik untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih damai di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Sementara itu, implementasi pendidikan ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah, orang tua, hingga pemerintah.

Praktik pendidikan anti kekerasan juga menekankan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pembinaan hubungan yang berbasis pada prinsip keadilan. Berbagai riset menunjukkan bahwa sekolah yang berhasil mengimplementasikan pendidikan anti kekerasan secara



komprehensif memiliki tingkat kekerasan yang lebih rendah dan hubungan interpersonal yang lebih sehat di antara para siswa (Satria, 2020).

Secara keseluruhan, pendidikan anti kekerasan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku individu dalam menghadapi konflik, dengan cara yang penuh kedamaian dan saling menghargai. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga emosional dan sosial.

## **B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Pendidikan**

Kekerasan dalam pendidikan dapat hadir dalam berbagai bentuk, yang mempengaruhi baik fisik, mental, maupun sosial siswa. Kekerasan fisik dalam lingkungan pendidikan termasuk pemukulan, pemarkah, dan segala bentuk tindakan yang menyebabkan luka atau trauma fisik pada siswa. Bentuk kekerasan ini sering kali dianggap sepele oleh sebagian besar pihak, padahal dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental siswa dalam jangka panjang.

Bentuk kekerasan verbal, seperti penghinaan, ancaman, atau cemoohan, juga merupakan masalah yang cukup serius. Kekerasan verbal tidak hanya merusak rasa percaya diri siswa, tetapi juga dapat menanamkan pola pikir negatif yang mengarah pada pengucilan sosial atau bahkan depresi. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kekerasan verbal sering terjadi di ruang kelas atau bahkan dalam interaksi sosial antar siswa (Lestari, 2021).

Selain itu, kekerasan psikologis atau emosional dalam pendidikan sangat merusak kesejahteraan mental peserta didik. Bentuk kekerasan ini termasuk manipulasi, tekanan emosional, atau diskriminasi yang dilakukan oleh guru atau teman sebaya. Kejadian seperti perundungan (bullying) di sekolah sering kali termasuk dalam kategori kekerasan psikologis. Menurut Dewi (2022), bullying memiliki dampak jangka panjang yang bisa mengganggu kesehatan mental siswa, bahkan berpotensi menyebabkan perilaku merugikan seperti kecemasan atau gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Kekerasan seksual dalam pendidikan, meskipun sering kali tabu untuk dibahas, juga merupakan isu yang mendesak. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi antara pendidik dan peserta didik, tetapi juga antara sesama siswa. Penelitian oleh Hartati (2021) menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam pendidikan sering kali terjadi karena ketidaktahuan mengenai batasan-batasan pribadi, atau adanya pengaruh dari norma sosial yang membenarkan perilaku pelecehan.



Selain itu, diskriminasi berbasis gender atau status sosial juga menjadi bentuk kekerasan yang tidak dapat dibiarkan. Perempuan, siswa dengan kebutuhan khusus, dan kelompok minoritas lainnya sering kali menghadapi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan perlakuan di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan untuk membentuk kesadaran akan keberagaman dan menanggulangi segala bentuk diskriminasi yang dapat memperburuk kekerasan dalam pendidikan.

### **C. Nilai-Nilai Pendidikan Anti Kekerasan**

Pendidikan anti kekerasan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Salah satu nilai yang paling mendasar adalah toleransi, yaitu kemampuan untuk menerima perbedaan dan menghindari tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Widodo (2020), mengajarkan toleransi di sekolah dapat mengurangi potensi perundungan dan diskriminasi.

Empati juga merupakan nilai penting yang diajarkan dalam pendidikan anti kekerasan. Empati memungkinkan peserta didik untuk merasakan perasaan orang lain dan menghormati perasaan mereka, yang menjadi dasar dari interaksi sosial yang sehat. Dengan mengembangkan empati, siswa diajarkan untuk tidak hanya memahami penderitaan orang lain, tetapi juga menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain secara fisik atau emosional (Hendriani, 2022).

Pendidikan anti kekerasan juga mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif, yang memungkinkan individu untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan. Program pendidikan ini berfokus pada pentingnya berbicara dengan cara yang menghargai orang lain, serta menggunakan dialog untuk mencapai penyelesaian masalah. Keterampilan ini penting untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat antara siswa, guru, dan orang tua.

Selain itu, pendidikan anti kekerasan menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan, dengan tujuan untuk mengurangi segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan di dalam lingkungan pendidikan. Dengan menanamkan kesadaran tentang keadilan sosial, pendidikan anti kekerasan berupaya untuk menciptakan ruang yang adil bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau jenis kelamin.

Akhirnya, pemberdayaan individu merupakan nilai penting yang diajarkan melalui pendidikan anti kekerasan. Setiap siswa harus merasa memiliki kontrol atas kehidupannya, termasuk hak untuk menolak



kekerasan dan menyuarakan pendapat. Melalui pemberdayaan ini, siswa diajarkan untuk berdiri tegak atas hak-haknya dan tidak merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

#### **D. Konsep Pendidikan Anti Kekerasan**

Konsep pendidikan anti kekerasan mengusung pendekatan yang mengintegrasikan teori dan praktik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas kekerasan. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana setiap siswa berhak atas pendidikan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga bebas dari kekerasan (Yulianto, 2023). Hal ini mencakup pengenalan terhadap kekerasan, penyebabnya, serta cara-cara untuk mencegah dan menghadapinya.

Pendidikan anti kekerasan berbasis pada tiga aspek utama: pencegahan, intervensi, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan memberikan pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai damai, keterampilan sosial, dan kesadaran akan hak-hak pribadi. Sementara itu, intervensi mencakup tindakan yang diambil ketika kekerasan terjadi, baik dalam bentuk penyuluhan, pendampingan psikologis, maupun tindakan hukum yang sesuai.

Aspek pemulihan berfokus pada pemulihan kondisi mental korban dan pelaku kekerasan, dengan pendekatan yang berbasis pada keadilan restoratif. Pendekatan ini berusaha memperbaiki hubungan yang rusak akibat kekerasan dan memberikan kesempatan bagi korban untuk sembuh tanpa merasa dikucilkan atau disalahkan (Kusuma, 2021). Semua langkah ini harus dijalankan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya setempat.

Keterlibatan seluruh pihak—guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah—merupakan elemen penting dalam keberhasilan konsep pendidikan anti kekerasan. Menurut Abdullah (2022), kesuksesan implementasi pendidikan anti kekerasan sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak yang memiliki peran dalam perkembangan peserta didik.

Dengan demikian, pendidikan anti kekerasan bukan hanya sekadar upaya untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga sebuah gerakan untuk membangun budaya kedamaian yang lebih luas di masyarakat. Melalui konsep ini, pendidikan menjadi sarana untuk menumbuhkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas sosial yang tinggi.



### **E. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Perempuan**

Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi akibat berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah ketidaksetaraan gender, di mana perempuan sering dianggap sebagai objek yang dapat diperjualbelikan atau dikendalikan. Dalam banyak budaya, perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang mengarah pada normalisasi kekerasan terhadap mereka (Pratiwi, 2022).

Faktor norma sosial yang mendukung patriarki juga berperan besar dalam terjadinya kekerasan seksual. Di banyak masyarakat, kekerasan seksual terhadap perempuan dianggap sebagai hal yang dapat diterima atau tidak terlalu diperhatikan, yang memungkinkan pelaku untuk merasa bebas melakukan tindakan tersebut tanpa takut dihukum (Wahyuni, 2023).

Selain itu, faktor psikologis pelaku juga sering kali menjadi penyebab kekerasan seksual. Banyak pelaku kekerasan seksual memiliki gangguan psikologis, seperti kontrol impuls yang buruk atau pengaruh trauma masa lalu, yang membuat mereka melakukan tindakan kekerasan. Penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual sering kali memiliki pengalaman traumatis yang belum teratasi, yang memperburuk perilaku mereka.

Kurangnya pendidikan seksual yang sehat juga berkontribusi pada tingginya angka kekerasan seksual. Pendidikan yang tidak memadai mengenai batasan-batasan pribadi, persetujuan dalam hubungan seksual, dan hak-hak tubuh sering kali mengarah pada ketidaktahuan tentang bagaimana menghormati tubuh orang lain (Hartini, 2022).

Akhirnya, faktor struktur hukum yang lemah juga menyebabkan kekerasan seksual sulit dihentikan. Dalam banyak kasus, hukum tidak cukup memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban, yang akhirnya membuat pelaku merasa tidak takut untuk melanjutkan tindakan kekerasan mereka (Lestari, 2023).

### **Referensi:**

- Abdullah, R. (2022). *Kolaborasi untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Dewi, A. (2022). *Psikologi Pendidikan dan Dampak Kekerasan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Hartati, S. (2021). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hartini, F. (2022). *Pendidikan Seksual dan Perlindungan Perempuan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama.



- Haryanto, S. (2021). *Pendidikan untuk Perdamaian: Menanggulangi Kekerasan dalam Pendidikan*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Hendriani, N. (2022). *Keterampilan Sosial dalam Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusuma, A. (2021). *Restorative Justice dalam Pendidikan*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Lestari, W. (2021). *Kekerasan dalam Pendidikan: Analisis dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Pratiwi, M. (2022). *Gender dan Kekerasan Seksual: Perspektif Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Rachmawati, E. (2021). *Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Satria, R. (2020). *Membangun Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, D. (2023). *Norma Sosial dan Kekerasan Seksual*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, W. (2020). *Nilai-Nilai dalam Pendidikan Anti Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yulianto, T. (2023). *Konsep Pendidikan Anti Kekerasan dalam Konteks Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Zubairi, M. (2022). *Pendidikan Anti Kekerasan: Konsep dan Implementasi di Sekolah*. Jakarta: Penerbit Gramedia.



# BAB XIV

## PENDIDIKAN ANTI PERUNDUNGAN



### **A. Pengertian Perundungan (*Bullying*)**

Perundungan, atau bullying, adalah suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini bisa berupa kekerasan fisik, verbal, atau sosial yang menyebabkan korban merasa tertekan dan tersisih. Perundungan bisa terjadi di berbagai lingkungan, tetapi lebih sering ditemukan di sekolah, tempat kerja, dan komunitas sosial. Definisi bullying ini mengacu pada ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana pelaku merasa lebih dominan dan korban merasa terhina atau terancam.

Perundungan juga melibatkan dimensi emosional dan psikologis yang dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mental korban. Menurut Olweus (2020), perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan tujuan untuk mendominasi, mengejek, atau merendahkan martabat individu lain. Perundungan seringkali memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri.

Menurut Smith dan Sharp (2018), perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan dan penjambakan, hingga kekerasan verbal seperti penghinaan atau ancaman. Meskipun perundungan sering kali dipandang sebagai bagian dari interaksi sosial yang normal, terutama di kalangan anak-anak, kenyataannya perundungan memiliki efek yang sangat negatif pada kesehatan mental dan fisik korban.

Penting untuk dipahami bahwa perundungan bukanlah masalah individu semata, tetapi juga merupakan masalah sosial yang mencerminkan budaya dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks sekolah, perundungan dapat muncul akibat lingkungan yang tidak



mendukung inklusi dan kesetaraan, atau adanya toleransi terhadap perilaku agresif di antara siswa (Boulton, 2019). Oleh karena itu, pendekatan pencegahan perundungan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah perundungan, banyak negara dan lembaga pendidikan yang mulai menerapkan kebijakan anti-perundungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu, terutama anak-anak dan remaja. Pendidikan mengenai perilaku yang baik, penghormatan terhadap perbedaan, dan pentingnya empati menjadi bagian dari upaya untuk mencegah perundungan di sekolah.

## **B. Bentuk-Bentuk Perundungan**

Perundungan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang masing-masing memiliki dampak yang berbeda pada korban. Secara umum, perundungan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: perundungan fisik, verbal, dan sosial. Perundungan fisik adalah jenis perundungan yang melibatkan kekerasan fisik terhadap korban, seperti pemukulan, tendangan, atau perusakan barang milik korban. Bentuk perundungan ini jelas terlihat dan dapat menyebabkan cedera fisik yang memerlukan perawatan medis.

Perundungan verbal mencakup penghinaan, cemoohan, dan ancaman yang dapat merusak harga diri korban. Bentuk ini bisa berupa ejekan yang berfokus pada penampilan, kemampuan akademik, atau latar belakang sosial ekonomi korban. Perundungan verbal seringkali disertai dengan ancaman atau kata-kata kasar yang bertujuan untuk menurunkan harga diri dan menciptakan rasa takut pada korban (Rigby, 2017). Meskipun tidak menimbulkan cedera fisik, perundungan verbal dapat meninggalkan dampak psikologis yang sangat dalam.

Perundungan sosial atau relational bullying terjadi ketika seseorang berusaha merusak hubungan sosial korban dengan cara mengisolasi, menyebarkan rumor, atau menggoda korban di depan teman-temannya. Bentuk perundungan ini lebih sulit dideteksi, tetapi sering kali sangat menyakitkan bagi korban, terutama ketika mereka merasa dasingkan dari kelompok teman sebaya mereka. Perundungan sosial bisa menciptakan trauma emosional yang lebih lama karena melibatkan penghancuran reputasi sosial korban.

Selain itu, perundungan siber atau cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang semakin marak di era digital ini. Cyberbullying melibatkan penggunaan media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya untuk mengintimidasi, mengancam, atau merendahkan korban.



Bentuk ini tidak terbatas pada waktu dan ruang, sehingga korban sering kali merasa terus-menerus terancam atau terganggu, bahkan di luar jam sekolah (Kowalski et al., 2020).

Perundungan seksual adalah bentuk perundungan yang juga menjadi perhatian serius dalam banyak konteks, terutama di sekolah dan tempat kerja. Bentuk ini melibatkan komentar atau tindakan yang bersifat seksual yang ditujukan untuk merendahkan atau mengontrol korban. Perundungan seksual sering kali dilakukan oleh orang yang memiliki posisi kekuasaan atau pengaruh terhadap korban, dan bisa menyebabkan trauma emosional yang berkepanjangan bagi korban.

### **C. Penyebab Terjadinya Perundungan**

Perundungan tidak muncul tanpa alasan. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku perundungan, dan faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada individu dan konteks sosialnya. Salah satu penyebab utama perundungan adalah adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Ketika seseorang merasa lebih kuat atau memiliki posisi sosial yang lebih tinggi, mereka mungkin merasa berhak untuk mendominasi atau mengintimidasi orang lain (Smith et al., 2019).

Faktor lain yang berperan dalam terjadinya perundungan adalah lingkungan keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis atau yang menghadapi kekerasan domestik cenderung lebih berisiko menjadi pelaku perundungan. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku perundungan sering kali mengalami pengabaian emosional atau kekerasan fisik di rumah, yang mendorong mereka untuk mengekspresikan agresivitas mereka pada orang lain (Faris & Felmlee, 2018).

Norma sosial dan budaya juga mempengaruhi munculnya perundungan. Di masyarakat di mana kekerasan atau dominasi dipandang sebagai hal yang wajar, perundungan lebih mudah berkembang. Misalnya, dalam beberapa budaya atau kelompok sosial, perilaku agresif atau dominan terhadap orang yang lebih lemah dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan atau status (Rigby, 2020). Media yang mempromosikan kekerasan atau perilaku negatif terhadap kelompok tertentu juga dapat memperburuk masalah ini.

Selain itu, teknologi dan media sosial berperan besar dalam perkembangan perundungan di era digital. Anak-anak dan remaja yang memiliki akses ke perangkat elektronik dapat dengan mudah menjadi korban atau pelaku cyberbullying. Keberadaan media sosial yang



memungkinkan interaksi tanpa batasan ruang dan waktu membuat perundungan menjadi lebih sulit terdeteksi dan diatasi (Kowalski et al., 2020).

Akhirnya, kepribadian dan temperamen individu juga dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya perundungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku perundungan sering memiliki kecenderungan untuk berperilaku agresif atau kurang empati terhadap orang lain. Meskipun demikian, perundungan sering kali melibatkan faktor eksternal seperti norma sosial dan dinamika kelompok yang mempengaruhi perilaku individu (Boulton, 2019).

#### **D. Karakteristik Pelaku Perundungan**

Pelaku perundungan sering kali memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang dapat membedakan mereka dari siswa lain yang tidak terlibat dalam perilaku agresif. Salah satu ciri utama dari pelaku perundungan adalah tingkat agresivitas yang tinggi. Mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan dan tidak memiliki keterampilan sosial yang baik untuk berinteraksi dengan cara yang sehat (Olweus, 2020). Pelaku perundungan sering kali merasa puas dengan dominasi yang mereka miliki atas korban.

Selain itu, pelaku perundungan biasanya memiliki rendahnya empati terhadap orang lain. Mereka cenderung tidak memahami atau tidak peduli dengan perasaan korban, yang membuat mereka mampu melakukan kekerasan atau penghinaan tanpa merasa bersalah. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku perundungan kurang memiliki kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, yang sering kali berhubungan dengan pengalaman mereka sendiri yang penuh kekerasan atau pengabaian (Rigby, 2017).

Pelaku perundungan juga sering kali memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam kelompoknya, dan mereka mungkin menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mempertahankan posisinya dalam kelompok sosial. Dalam beberapa kasus, pelaku perundungan merasa perlu menunjukkan kekuasaan atau kekuatan mereka untuk mendapatkan penerimaan atau status di kalangan teman sebaya (Smith & Sharp, 2018).

Namun, bukan berarti semua pelaku perundungan berasal dari keluarga yang bermasalah atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa pelaku perundungan memiliki latar belakang keluarga yang stabil, tetapi mereka mungkin terpengaruh oleh tekanan teman sebaya atau norma sosial yang mendukung perilaku agresif. Oleh karena itu, faktor eksternal



seperti media, teman sebaya, dan norma sosial juga mempengaruhi perilaku mereka.

Akhirnya, pelaku perundungan cenderung memiliki ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik, yang menyebabkan mereka menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan frustrasi atau kemarahan. Mereka sering kali berjuang untuk mengatasi perasaan tidak aman atau cemas yang mendalam, yang akhirnya muncul dalam bentuk perilaku yang merugikan orang lain (Olweus, 2020).

### **E. Karakteristik Korban Perundungan**

Korban perundungan memiliki beberapa karakteristik yang membedakan mereka dari siswa yang tidak mengalami perundungan. Salah satu ciri utama korban perundungan adalah rendahnya rasa percaya diri. Mereka sering kali merasa terpinggirkan atau tidak dihargai, yang dapat membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku perundungan. Penelitian menunjukkan bahwa korban perundungan sering merasa cemas atau takut, bahkan di luar sekolah (Rigby, 2020).

Korban perundungan juga sering kali menunjukkan kelemahan fisik atau emosional yang dapat dieksploitasi oleh pelaku. Mereka mungkin memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, seperti penampilan yang dianggap tidak menarik oleh teman-temannya, atau mereka mungkin lebih pendiam dan kurang mampu membela diri (Olweus, 2020). Hal ini sering menjadi alasan mengapa mereka dipilih sebagai target perundungan.

Selain itu, ketergantungan pada kelompok atau teman sebaya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi siapa yang menjadi korban perundungan. Siswa yang cenderung lebih introvert atau tidak memiliki teman dekat lebih rentan terhadap perundungan. Mereka mungkin kesulitan beradaptasi dalam kelompok sosial atau merasa kesepian, yang menjadikan mereka lebih mudah menjadi sasaran (Boulton, 2019).

Korban perundungan sering kali mengalami gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, atau stres pasca-trauma (PTSD). Hal ini terjadi karena perundungan yang dialami meninggalkan bekas yang dalam pada kesehatan mental korban, yang bisa berlangsung lama bahkan setelah perundungan berakhir. Dalam beberapa kasus, korban perundungan melaporkan perasaan putus asa dan rendah diri (Smith et al., 2019).

Akhirnya, korban perundungan sering kali merasa kesulitan untuk menghadapi atau melaporkan perundungan yang mereka alami. Mereka mungkin merasa takut bahwa melaporkan perundungan hanya akan



memperburuk situasi atau membuat mereka lebih menjadi sasaran (Rigby, 2020).

#### **F. Strategi dalam Pencegahan Perundungan**

Pencegahan perundungan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat. Salah satu strategi utama adalah pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai empati, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan ini dimulai sejak dini di sekolah, dengan tujuan untuk membentuk siswa yang memiliki kesadaran sosial dan kemampuan untuk berinteraksi secara damai (Smith & Sharp, 2018).

Selanjutnya, penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima tanpa memandang latar belakang atau perbedaan mereka. Kebijakan anti-perundungan yang jelas dan tegas sangat penting untuk mengurangi kasus perundungan di sekolah. Selain itu, pendekatan berbasis keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab (Faris & Felmlee, 2018).

Pelatihan untuk guru dan staf sekolah mengenai cara mengenali tanda-tanda perundungan dan memberikan dukungan kepada korban juga sangat penting. Guru harus dilibatkan dalam mendeteksi perundungan dan memberikan intervensi segera ketika kasus perundungan terjadi. Program pelatihan ini juga bisa melibatkan orang tua siswa untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas mengenai dampak negatif perundungan (Olweus, 2020).

Perundungan di dunia maya, atau cyberbullying, juga memerlukan strategi pencegahan tersendiri. Pendidikan mengenai etika penggunaan media sosial dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas online siswa dapat membantu mengurangi kasus cyberbullying. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang aman dan mendidik (Kowalski et al., 2020).

Akhirnya, partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosial dan ekstrakurikuler juga dapat mencegah perundungan, karena ini memberi mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka dalam konteks yang lebih positif. Mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek atau kegiatan kelompok dapat memperkuat hubungan antar siswa dan mengurangi perilaku perundungan.



**Referensi:**

- Boulton, M. J. (2019). *The Handbook of Bullying Prevention: A Guide for Educators*. Springer.
- Faris, R., & Felmlee, D. (2018). *Social Networks and Bullying: Pathways to Aggression*. Cambridge University Press.
- Kowalski, R. M., et al. (2020). *Cyberbullying: Bullying in the Digital Age*. Wiley-Blackwell.
- Olweus, D. (2020). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford University Press.
- Rigby, K. (2017). *Bullying in Schools: Causes, Consequences, and Solutions*. Springer.
- Smith, P. K., & Sharp, S. (2018). *School Bullying: Insights and Perspectives*. Routledge.
- Smith, P. K., et al. (2019). *Understanding School Bullying: Its Nature and Prevention Strategies*. Wiley-Blackwell.
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). *The International Handbook of School Bullying*. Routledge.





## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



### A. Kesimpulan

Pendidikan karakter di perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk mahasiswa tidak hanya sebagai individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Melalui penerapan nilai-nilai karakter, perguruan tinggi berkontribusi pada pengembangan kepribadian mahasiswa yang seimbang, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan integritas dan etika yang tinggi.

Pertama, pendidikan karakter berfungsi sebagai fondasi dalam menanamkan nilai-nilai moral yang diperlukan di dunia kerja dan masyarakat. Di era yang semakin kompleks ini, keterampilan teknis saja tidak cukup; mahasiswa perlu dibekali dengan kemampuan untuk berinteraksi secara etis dan efektif dengan berbagai pihak. Hal ini menekankan pentingnya pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam kurikulum akademik.

Kedua, keterlibatan keluarga dalam pendidikan karakter mahasiswa terbukti memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di perguruan tinggi. Sinergi antara lingkungan keluarga dan kampus menciptakan dukungan yang lebih kuat bagi mahasiswa dalam menginternalisasi nilai-nilai etika. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk melibatkan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan.

Selanjutnya, pendidikan karakter juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional mahasiswa. Kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri yang berfokus pada karakter membantu mahasiswa belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan membangun hubungan interpersonal yang positif. Keterampilan ini sangat berharga di dunia kerja dan dalam kehidupan sosial.



Akhirnya, keberhasilan pendidikan karakter di perguruan tinggi bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk dosen, staf, mahasiswa, dan keluarga. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, pendidikan karakter dapat dioptimalkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademis, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Melalui upaya bersama ini, perguruan tinggi dapat memainkan peran vital dalam membentuk generasi masa depan yang beretika dan bertanggung jawab.

## **B. Rekomendasi untuk Pengembangan Pendidikan Karakter**

Ada beberapa rekomendasi untuk Pengembangan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, diantaranya:

1. Integrasi Kurikulum. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam semua program studi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyisipkan mata kuliah atau modul yang membahas nilai-nilai karakter dan etika dalam konteks profesional.
2. Pelatihan untuk Dosen. Menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan staf pengajar tentang metodologi pengajaran yang menekankan pendidikan karakter. Dosen perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk menjadi role model dalam menerapkan nilai-nilai karakter.
3. Kegiatan Ekstrakurikuler. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang fokus pada pengembangan karakter, seperti program kepemimpinan, layanan masyarakat, dan diskusi kelompok tentang isu-isu sosial. Kegiatan ini dapat meningkatkan empati dan keterampilan sosial mahasiswa.
4. Keterlibatan Keluarga. Mendorong keterlibatan orang tua dan keluarga dalam pendidikan karakter mahasiswa melalui seminar, workshop, atau kegiatan kampus. Ini akan menciptakan keselarasan antara nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan di kampus.
5. Kolaborasi dengan Komunitas. Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dan lembaga sosial untuk menciptakan program layanan masyarakat. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan keterampilan karakter mahasiswa tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.
6. Sistem Monitoring dan Evaluasi. Mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program pendidikan karakter. Survei dan umpan balik dari mahasiswa dan dosen dapat memberikan informasi berharga tentang keberhasilan program.



7. Pusat Sumber Daya Pendidikan Karakter. Membentuk pusat sumber daya yang fokus pada pendidikan karakter, menyediakan materi, pelatihan, dan dukungan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan program dan inisiatif terkait karakter.
8. Promosi Budaya Karakter. Menciptakan budaya kampus yang mendukung nilai-nilai karakter melalui kampanye, poster, dan acara yang menekankan pentingnya etika, integritas, dan tanggung jawab sosial.





## DAFTAR PUSTAKA



- Abd al-Raziq, A. (2021). *Masyarakat dan Pluralisme*. Dar al-Fikr.
- Abdullah, R. (2022). *Kolaborasi untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Abdurrahman, K. (2016). *Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Adhi, S.. (2017). *Kasus-Kasus Korupsi Besar dalam Era Reformasi: Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Aisyah, S. (2020). "Partisipasi Aktif Warga dalam Masyarakat Madani." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(1), 45-60.
- Al-Ali, A. S. (2020). *Understanding Family Dynamics in Arab Culture*. Riyadh: Dar Al-Muna.
- Al-Attas, S. M. N. (2019). *Islam and Secularism*. International Islamic University Malaysia.
- Al-Azami, Abdullah al-Nasih. (2019). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan*. Dar al-Salam.
- Al-Banna, R. (2016). *Refleksi dalam Pendidikan Karakter*. *Jurnal Pendidikan*, 10(3), 88-97.
- Al-Ghazali, A. (2005). *Dialog dan Diskusi dalam Pendidikan Islam*. Kairo: Penerbit Al-Furqan.
- Al-Ghazali, A. (2019). *The Ethics of Islam: An Overview*. Dar al-Fikr.
- Al-Haq, F. (2018). *Family Engagement in Higher Education: Strengthening Connections for Character Development*. Al-Maaref Publishing.
- Al-Hariri, S. (2010). *Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Pendidikan Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 45-60.
- Al-Husaini, T. (2014). *Inkuiri dalam Pembelajaran Karakter*. *Jurnal Pendidikan*, 9(4), 34-46.
- Al-Jabri, Muhammad Abed. (2015). *Keadilan Sosial dan Pemikiran Islam*. Markaz al-Dirasat al-Islamiyyah.
- Al-Khalidi, A. (2017). *Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Pendidikan Islam*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 11(1), 23-35.
- Allen, I. E., & Seaman, J. (2017). *Digital Learning Compass: Distance Education Enrollment Report 2017*. Babson Survey Research Group.
- Al-Mahfouz, H. (2012). *Peran Role Playing dalam Pendidikan Karakter*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 8(1), 12-22.
- Al-Mansoori, A. (2018). *Family Engagement in Character Education: Building a Stronger Community*. Al-Maaref Publishing.
- Al-Mawardi, A. (2001). *Kisah-Kisah Inspiratif dalam Pendidikan Karakter*. Beirut: Penerbit Al-Najah.



- Al-Rahimi, W. (2017). *The Role of Parents in Higher Education: A Guide for Family Engagement*. Dar Al-Fikr.
- Al-Sa'di, A. (2003). *Pendidikan Karakter dalam Islam*. Riyadh: Penerbit Al-Mu'min.
- Al-Salih, K. (2015). *Kolaborasi dalam Pendidikan Karakter*. Jurnal Pendidikan, 13(1), 67-79.
- Al-Sayed, F. M. B. (2023). *Islamic Perspectives on Family and Society*. Cairo: Islamic Publications.
- Al-Shahrani, M. (2018). *Experiential Learning dalam Pendidikan Karakter Islam*. Jurnal Pendidikan, 14(2), 55-70.
- Aminah, L. (2021). *Dukungan Emosional dalam Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2020). *The Psychology of Cyber Violence: Understanding and Preventing Harmful Online Behavior*. Elsevier.
- Andrei, C., & Platt, D. (2023). *Nepotism and Favoritism: Governance Issues in Emerging Economies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Anwar. (2018). *Membangun Kemandirian Individu*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arends, R. I. (2012). *Learning to Teach*. New York: McGraw-Hill.
- Aristotle. (2000). *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. New York: Oxford University Press.
- Astin, A. W. (1993). *What Matters in College: Four Critical Years Revisited*. Jossey-Bass.
- Badruddin, H. (2017). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Baker, C. (2021). *Corruption in the Developing World*. Oxford: Oxford University Press.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bandura, A. (2019). *Social Learning Theory: Theoretical and Practical Implications*. New York: Academic Press.
- Banks, J. A. (1994). *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice*. Review of Research in Education.
- Barrows, H. S. (1996). Problem-Based Learning in Medicine and Beyond: A Brief Overview. *Problem-Based Learning in Health Care Education*, 3-12.
- Bates, T. (2020). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd.
- Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). *The Strength Model of Self-Control*. Current Directions in Psychological Science.
- Bell, S. (2010). "Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future." *The Clearing House*, 83(2), 39-43.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2005). *Teaching Character: An Empirical Approach*. The Journal of Character Education, 3(1), 37-56.



- Black, P., & Wiliam, D. (1998). "Assessment and Classroom Learning." *Assessment in Education: Principles, Policies, and Practices*, 5(1), 7-74.
- Boulton, M. J. (2019). *The Handbook of Bullying Prevention: A Guide for Educators*. Springer.
- Brabeck, M. M., & Schwartz, J. E. (2016). *Family and Community Engagement in Education*. New York: Routledge.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (2002). *Campus-Community Partnerships in Community Engagement*. Michigan Journal of Community Service Learning.
- Brookfield, S. D., & Preskill, S. (2005). *Discussion as a Way of Teaching: Tools and Techniques for Democratic Classrooms*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bruner, J. S. (1961). *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1996). *The Culture of Education*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bryant, K. (2022). *Leadership and Corruption: Transparency in Governance*. London: Palgrave Macmillan.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: Norton & Company.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
- Buckingham, D. (2021). *Media Education: Literacy, Learning, and Contemporary Culture*. Polity Press.
- Budiyanto. (2018). *Moral Education in the Life of the School*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Campbell, D. A., & Simson, E. D. (2018). *Civic Education: What Makes It Effective?*. New York: Routledge.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Malden: Wiley-Blackwell.
- Cheng, Y. (2020). *Digital Learning: Education and the Digital Age*. Abingdon, Oxon: Routledge.
- Clutterbuck, D. (2015). *Mentoring: A Guide to Effective Practice*. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
- Cohen, J., & Sandy, M. (2020). "Dialogue as a Tool for Moral and Character Education." *Journal of Moral Education*, 49(1), 95-110.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (2020). *Social Support and Health: A Theoretical Perspective*. Academic Press.
- Connors, T. D. (2015). *The Volunteer Management Handbook*. New York: AMACOM.
- Cottrell, A. (2020). *Corruption from Within: Personal Motivation and Corruption*. London: Palgrave Macmillan.



- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dabbagh, N., & Kitsantas, A. (2017). Personal Learning Environments, Social Media, and Self-Regulated Learning: A Natural Formula for Connecting Formal and Informal Learning. *The Internet and Higher Education*, 29, 18-28. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.12.001>
- Dahrendorf, R. (2019). *Sosiologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Deddy. (2021). *Tradisi dan Budaya Sunda*. Bandung: Alfabeta.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2006). *Pedoman Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). "From Game Design Elements to Gamefulness: defining" gamification." *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments*, 9-15.
- Dewan Pendidikan. (2019). *Program Sekolah Karakter*. Jakarta: Dewan Pendidikan.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
- Dewi, A. (2022). *Psikologi Pendidikan dan Dampak Kekerasan di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Dewi, L. (2023). *Evaluasi Pembelajaran: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit GHI.
- Dijk, F., & Verheijen, T. (2020). *Political Corruption and Its Impact on Decision-Making in Democratic Regimes*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Djamaluddin, M. (2019). *Pendidikan Karakter dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media.
- Donor, T. (2023). *Corruption and Power*. London: Routledge.
- Dufour, R., & Eaker, R. (1992). *Professional Learning Communities at Work: Best Practices for Enhancing Student Achievement*. Association for Supervision and Curriculum Development.
- Durkheim, E. (2018). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2019). *The Impact of After-School Programs that Promote Personal and Social Skills*. Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL).
- Duvall, E. (2013). *Family Development*. Harper & Row.
- Dyer, C. (2020). Building Character in the Digital Age: Challenges and Opportunities. *Journal of Character Education*, 16(1), 15-30. <https://doi.org/10.1177/1555412020909295>



- Eisenberg, N. (2000). "Emotion, Regulation, and Moral Development." *Annual Review of Psychology*, 51, 665-697.
- Eisenberg, N., & Strayer, J. (1987). *Empathy and Its Development*. Cambridge University Press.
- Eisner, E. W. (2002). *The Arts and the Creation of Mind*. New Haven: Yale University Press.
- Elda, R.. (2019). *Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Politik*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Indonesia.
- Elda, R., Syahrums, A.. (2022). *Pemberantasan Korupsi dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- El-Sharkawy, M. A. (2021). *Family in Islamic Tradition: Values and Responsibilities*. Beirut: Arab Book House.
- Epstein, J. L. (2011). *School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action*. Corwin Press.
- Eyler, J., & Giles, D. E. (1999). *Where's the Learning in Service-Learning?* San Francisco: Jossey-Bass.
- Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2000). *Learning from Museums: Visitor Experiences and the Making of Meaning*. Lanham, MD: Altamira Press.
- Faris, R., & Felmlee, D. (2018). *Social Networks and Bullying: Pathways to Aggression*. Cambridge University Press.
- Fatmawati, R. (2021). *Pengembangan Kompetensi Dosen dalam Pembelajaran Inovatif*. *Jurnal Pendidikan*, 12(2), 34-46.
- Fitria, R. (2019). *Korupsi dan Hukum di Indonesia: Upaya dan Kendala dalam Pemberantasannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Freiberg, H. J. (1999). *Beyond Behaviorism: Changing the Classroom Management Paradigm*. Allyn & Bacon.
- Frick, W. (2021). *Character Education in America: A Historical Overview*. New York: Routledge.
- Furco, A. (1996). *Service-Learning: A Balanced Approach to Experiential Education. Expanding Boundaries: Service and Learning*.
- Gage, N. L., & Berliner, D. C. (1998). *Educational Psychology*. Boston: Houghton Mifflin.
- Garrison, D. R., & Anderson, T. (2021). *E-learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice*. Routledge.
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. Jossey-Bass.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gerson, K. (2021). *The Unfinished Revolution: Coming of Age in a New Era of Gender, Work, and Family*. New York: Oxford University Press.
- Giddens, A. (2020). *Sociology*. Polity Press.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books.
- Goleman, D. (1998). *Working with Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.



- Gordon, H. R. D., et al. (2017). "The Importance of Mentoring for Character Development." *Educational Leadership*, 75(8), 54-58.
- Gordon, T. (2000). *Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children*. New York: Random House.
- Graham, C. R. (2013). *Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions*. In M. G. Moore (Ed.), *Handbook of Distance Education* (3rd ed.). Routledge.
- Graham, C. R. (2019). *Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions*. In M. G. Moore (Ed.), *Handbook of Distance Education* (4th ed., pp. 221-235). Routledge.
- Hamari, J., & Koivisto, J. (2016). Do Gamification Elements Work? A Preliminary Analysis of the Role of Gamification in the Education Sector. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3025-3034). IEEE.
- Hanafi, Hassan. (2018). *Pendidikan dan Kesadaran Sosial dalam Islam*. Dar al-Talib.
- Harahap, M. (2022). *Budaya Kerja Masyarakat Batak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Harris, C. (2019). *The Social Dimensions of Corruption: Understanding the Cultural Roots*. London: Routledge.
- Harsasi, M., & Sari, R. M. (2019). The Impact of Open Educational Resources on Higher Education. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 14(6), 4-17.
- Hartati, S. (2021). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hartini, F. (2022). *Pendidikan Seksual dan Perlindungan Perempuan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama.
- Haryanto. (2017). *Cultural Diversity in the Classroom*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Haryanto, S. (2021). *Pendidikan untuk Perdamaian: Menanggulangi Kekerasan dalam Pendidikan*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, M. (2020). *Pernikahan Adat Mandailing*. Medan: Penerbit Aksara.
- Hasyim, A. (2018). *Sosiologi Budaya Sunda*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hasyim, A. (2020). *Wayang Kulit: Warisan Budaya dan Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
- Hendriani, N. (2022). *Keterampilan Sosial dalam Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hidayat, M. (2022). *Komunitas Toleran dalam Zaman Modern*. Malang: Penerbit Solusi.
- Hidayat, M. (2023). *Toleransi dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Penerbit Sosial Demokrasi.
- Hidayat, R. (2021). *Ilmu Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI.



- Hine, C. (2009). "Work Experience and Employability: A Study of Student Attitudes." *Journal of Education and Work*, 22(2), 139-157.
- Hobbs, R. (2021). *Media Literacy: New Agendas in Communication*. Wiley-Blackwell.
- Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge University Press.
- Hofstede, G. (2011). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hossain, M. (2020). *Democracy and Civil Society in Asia*. Palgrave Macmillan.
- Hurlock, E. B. (2019). *Developmental Psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Hutton, R. (2023). *Playful Parenting: Creative Approaches to Family Dynamics*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Ifenthaler, D., & Yau, J. Y. K. (2020). *Utilising Learning Analytics for Study Success: A Review of the Literature*. *Educational Technology Research and Development*, 68(1), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s11423-019-09734-9>
- Ismail, R. (2022). *Civic Engagement in the Arab World: The Role of Youth*. Arab Center for Research and Policy Studies.
- Jackson, D. (2021). *Ethics and Corruption: A Psychological Approach*. London: Routledge.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Boston: Allyn & Bacon.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). *An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning*. *Educational Psychologist*, 44(4), 215-227.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). *An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning*. *Educational Psychologist*, 44(2), 87-99.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (2016). *Cooperative Learning in the Classroom*. ASCD.
- Joynes, C. (2006). *A Guide to Effective Learning and Teaching in Higher Education*. London: Routledge.
- Junaidi, A. (2022). *Sikap Toleransi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Sosial*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Junaidi, A. (2023). *Politik Toleransi di Dunia Global*. Jakarta: Penerbit Politik Dunia.
- Juwono, M.. (2016). *Peran KPK dalam Penanganan Kasus Korupsi dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Juwono, V. (2016). *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and AntiCorruption Initiatives in Indonesia 1945-2014* [London School of Economics and Political Science]. <http://etheses.lse.ac.uk/id/eprint/3381>



- Kahne, J., & Bowyer, B. (2018). "The Role of Social Media in Promoting Civic Engagement." *Educational Policy*, 32(3), 364-391.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar: Straus and Giroux.
- Kamali, M. H. (2021). *The Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Book Trust.
- Kartini, S. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Pustaka Pelajar.
- Katz, L. G., & Chard, S. C. (2016). *Engaging Children's Minds: The Project Approach*. Greenwood Publishing Group.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2022). *The Impact of Corruption on Governance*. Washington, D.C.: World Bank.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusurbuk.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Laporan Evaluasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kinnari, T. S. G. K. (2017). *Building Communities of Hope*. New York: Routledge.
- Koentjaraningrat, M. (2004). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2010). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. New York: Harper & Row.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). *Pendidikan Antikorupsi di Indonesia: Upaya dan Strategi dalam Membangun Budaya Antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. ☐
- Kowalski, R. M., et al. (2020). *Cyberbullying: Bullying in the Digital Age*. Wiley-Blackwell.
- KPK. (2020). *Pendidikan Antikorupsi di Indonesia: Upaya dan Strategi dalam Membangun Budaya Antikorupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2018). "Project-Based Learning." In *Handbook of Research on Learning and Instruction* (pp. 101-123). Routledge.
- Kuhlmann, J. (2008). *Character Education: A Resource for School Improvement*. University Press of America.



- Kurniawan, D. (2021). *Keberagaman dan Toleransi dalam Perspektif Global*. Medan: Penerbit Multikultural.
- Kurniawan, D. (2021). *Pendidikan Toleransi di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pendidikan.
- Kurniawan, H. (2019). *Batik Sunda: Identitas Budaya dan Karakter*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurniawan, H. (2021). *Upacara Adat Jawa: Makna dan Nilai*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). *Social Networking Sites and Addiction: A Review of the Evidence*. *International Journal of Adolescence and Youth*, 22(4), h. 373-397. <https://www.tandfonline.com/toc/rjy20/current>
- Kusuma, A. (2021). *Restorative Justice dalam Pendidikan*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Laurillard, D. (2020). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
- Lestari, W. (2021). *Kekerasan dalam Pendidikan: Analisis dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Levine, P., & Lopez, M. H. (2016). "The Future of Citizen Engagement." *Journal of Public Affairs*, 16(4), 296-305.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Livingstone, S. (2018). *Children's Digital Rights: A New Global Agenda*. *International Journal of Children's Rights*, 26(4), h. 649-672. [https://brill.com/view/journals/ijcr/26/4/article-p649\\_649.xml](https://brill.com/view/journals/ijcr/26/4/article-p649_649.xml)
- Lubis, R. (2022). *Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Madjid, Nurkholis. (2003). *Masyarakat Madani: Makna dan Paradigma*. Paramadina.
- Manning, C. (2020). *Corruption and the Rule of Law in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Mansur, S. (2020). *Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Karakter*. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 115-128.
- Mardiyah, D. (2012). *Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Marpaung, J. (2018). *Adat dan Budaya Mandailing*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
- McCarthy, J., & Murphy, E. (2019). The Role of Interactive Technologies in Higher Education. *Educational Technology Research and Development*, 67(2), 365-384.
- McKee, R. (2022). *The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human*. New York: HarperCollins.
- McLuhan, M., & Fiore, Q. (2021). *The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century*. Oxford University Press.



- Meyer, K. (2021). *Information Literacy in the Digital Age: A Critical Approach*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Miller, J. (2000). *Education and the Holistic Paradigm*. *Holistic Education Review*.
- Mischel, W. (2014). *The Marshmallow Test: Mastering Self-Control*. New York: Little, Brown and Company.
- Morales, C. C., & Smith, M. L. (Eds.). (2016). *The Handbook of Moral Development*. New York: Routledge.
- Mulyana, A. (2020). *Tradisi dan Kehidupan Sosial Masyarakat Sunda*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, A. (2021). *Pembelajaran Berbasis Proyek: Membangun Karakter dan Keterampilan Abad 21*. Bandung: Penerbit DEF.
- Mulyani, S. (2022). *Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak*. Surabaya: Unesa Press.
- Mulyasa, E. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mungiu-Pippidi, A. (2021). *The Quest for Good Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Narvaez, D. (2006). *The Science of Character Education*. In *Handbook of Character Education* (pp. 133-154). New York: Routledge.
- Nasution, A.H. (2006). *Memoar Perjuangan dan Kepemimpinan: Pengalaman dalam Penanggulangan Korupsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, H. (2019). *Sosiologi Masyarakat Mandailing*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (2000). *Teori Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningsih, T., & Siregar, A. (2021). *Extortion and the Fight Against Corruption in Indonesia*. Cham: Springer.
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.
- O'Callaghan, K., McGarr, O., & M. B. (2020). The Impact of Technology on Teaching and Learning in Higher Education: A Systematic Review. *Journal of Educational Technology & Society*, 23(2), 40-58.
- Olweus, D. (2020). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford University Press.
- Parker, W. C. (2010). *Social Studies in Elementary Education*. Pearson.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Pereira, C. (2021). *The Nexus of Corruption and Governance*. Cham: Palgrave Macmillan.



- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International Universities
- Popenoe, D. (2018). *The Family: A History of the American Family*. New York: HarperCollins.
- Prabowo, D. (2019). *Batik Jawa: Karya Seni dan Identitas*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Pratiwi, M. (2022). *Gender dan Kekerasan Seksual: Perspektif Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). *Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016-2019*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Sistem Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Purnama. (2019). *Kebersamaan dalam Keberagaman*. Bandung: Alfabeta.
- Quah, J. S. T.. (2022). *Corruption Control in the Asia Pacific: Lessons from Singapore and Other Countries*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Rachmawati, E. (2021). *Pendidikan Berbasis Keadilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2022). *Understanding Social Dynamics in Society*. Al-Maaref Publishing.
- Rahmawati, S. (2020). *Strategi Pembelajaran Inovatif dalam Pendidikan Karakter*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Rakhmat, J. (2010). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Ramadhani, E. (2022). *Membangun Kemandirian Mahasiswa melalui Metode Pembelajaran Inovatif*. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 10(3), 78-90.
- Rest, J. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*. New York: Praeger.
- Rigby, K. (2017). *Bullying in Schools: Causes, Consequences, and Solutions*. Springer.
- Rinaldi, A. (2022). *Kearifan Lokal Jawa dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Rinaldo. (2016). *Budaya dan Pendidikan Karakter*. Bandung: Alfabeta.
- Rogoff, B. (2003). *The Cultural Nature of Human Development*. New York: Oxford University Press.



- Rokeach, M. (1973). *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton University Press.
- Rosenfeld, M. J. (2018). *Coupling in America: The Changing Landscape of Family*. Princeton: Princeton University Press.
- Saad, S., & Li, Y. (2020). The Role of Digital Literacy in Higher Education: The Future of Learning. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 12(1), 61-75.
- Santoso, S. (2018). *Etika dan Adat Istiadat Jawa*. Bandung: Alfabeta.
- Santrock, J. W. (2008). *Educational Psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development*. McGraw-Hill.
- Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83-102.
- Sari, T. (2022). *Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Pendidikan*, 15(1), 45-57.
- Satria, R. (2020). *Membangun Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- Schunk, D. H. (2004). *Learning Theories: An Educational Perspective*. New Jersey: Pearson.
- Schwartz, M. S., & Sharpe, D. (2006). *Teaching Character Education Through Literature*. New York: Routledge.
- Schwartz, M. S., & Sharpe, D. (2006). *Teaching Character Education Through Literature*. New York: Routledge.
- Schwartz, R. (2022). *Integrating Character Education into Higher Education Curricula: A Family Approach*. *Journal of Character Education*.
- Searle, M., & Khalil, J. (2020). *Collusion in Public Procurement: Causes and Consequences*. Oxford: Oxford University Press.
- Seligman, M. E. P. (2002). *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment*. New York: Free Press.
- Seligman, M. E. P. (2002). *Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment*. New York: Free Press.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2020). *Corruption and the Economy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Shou, Y., & Liu, Y. (2022). *Tax Evasion and Corruption: Evidence from Global Data*. Hoboken: Wiley.
- Siahaan, A. (2021). *Musik Tradisional Batak: Identitas dan Tradisi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.



- Siemens, G. (2020). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.
- Sihotang, P. (2020). *Adat dan Budaya Batak*. Medan: Penerbit Aksara.
- Simanjuntak, J. (2018). *Politik dan Korupsi: Antara Reformasi dan Realitas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, R. (2018). *Kearifan Lokal Masyarakat Batak*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, A. (2021). *Musik dan Budaya Mandailing*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Skinner, B. F. (2020). *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. Cambridge: B.F. Skinner Foundation.
- Smith, A. (2023). *Corruption and Public Resource Management*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, J. (2020). *Identity and Social Change*. Routledge.
- Smith, J., & Williams, R. (2021). *Economic Inequality and Corruption: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, J., & Williams, R. (2021). *Economic Inequality and Corruption: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, P. K., & Sharp, S. (2018). *School Bullying: Insights and Perspectives*. Routledge.
- Smith, P. K., et al. (2019). *Understanding School Bullying: Its Nature and Prevention Strategies*. Wiley-Blackwell.
- Smith, S. D. (2019). *The Family System: A New Approach to Family Dynamics*. London: Routledge.
- Soroush, A. K. (2019). *Dialog dan Toleransi dalam Masyarakat Modern*. Dar al-Fikr.
- Sudjana, N. (2010). *Metode Pembelajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono, Y. (2011). *Pendidikan Keluarga dan Perannya dalam Masyarakat*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran.
- Supriyadi, A. (2011). *Pendidikan dan Sosialisasi di Masyarakat*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Supriyanto. (2020). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutrisno, E. (2013). *Pendidikan Karakter Berbasis Agama: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisno, P. (2022). *Membangun Toleransi dalam Kehidupan Berbangsa*. Bandung: Penerbit Pembangunan.
- Sutrisno, P. (2023). *Intoleransi dan Konflik Sosial: Perspektif Sosial Politik*. Surabaya: Penerbit Rakyat.
- Suyanto, E. (2020). *Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyanto, W. (2020). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Kendala dan Solusi dalam Perspektif Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.



- Svensson, J. (2020). *The Political Economy of Corruption*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tantri. (2020). *Understanding Human Behavior*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Tanzi, V. (2021). *Corruption and the Development of the State*. Washington, D.C.: World Bank.
- Tarigan, H. (2019). *Sosiologi Keluarga Batak*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Tarihoran, S. (2021). *Mengelola Toleransi dalam Masyarakat Beragam*. Jakarta: Penerbit Pendidikan Sosial.
- Tarman, S., & Nugroho, E. (2019). *Embezzlement and Public Sector Accountability in Indonesia*. London: Routledge.
- Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. Retrieved from [BIE website](#).
- Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. Stanford University.
- Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. The Autodesk Foundation.
- Tilly, M. J. G. (2019). *Sociology and Social Policy*. New York: Routledge.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2020). *Corruption, Institutional Quality, and the Role of Trust*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. Berlin: Transparency International Secretariat.
- Transparency International. (2023). *Global Corruption Report*. Berlin: Transparency International.
- Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). *The International Handbook of School Bullying*. Routledge.
- Tusting, K., & Barton, D. (2019). *The Routledge Handbook of Literacy Studies*. Routledge.
- Twenge, J. M. (2019). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—And Completely Unprepared for Adulthood*. New York: Atria Books.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- UNESCO. (2005). *Education for All: The Quality Imperative*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2014). *Educating for Peace and Sustainability*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2014). *Teaching and Learning: Achieving Quality for All*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2015). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2016). *Leading the Future: School Leadership for Learning and Character*. Paris: UNESCO.



- UNESCO. (2018). *Global Education Monitoring Report 2019: Migration, Displacement and Education*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2019). *Framework for Action: Education for Sustainable Development*. Paris: UNESCO.
- Wachtel, P. (2021). *Family Meetings: A Practical Guide for Parents and Children*. New York: Routledge.
- Wadud, A. (2019). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld Publications.
- Wahyuni, D. (2023). *Norma Sosial dan Kekerasan Seksual*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuningrum, L. (2022). *Sikap Toleransi dalam Dunia Pendidikan*. Bandung: Penerbit Ilmu Sosial.
- Wahyuningrum, L., Syahrudin, A., Elda, R.. (2020). *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pembaruan dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warschauer, M. (2018). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.
- Widodo, T. (2022). *Korupsi dan Budaya Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, W. (2020). *Nilai-Nilai dalam Pendidikan Anti Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiggins, D. A. (2012). *Cultural Psychology: A Perspective on Psychological Functioning*. New York: Routledge.
- Williams, P. (2021). *Social Change and the Role of Civil Society*. Cambridge University Press.
- Yamamoto, Y., & Noh, J. (2019). "Volunteerism and Character Development: Insights from Community Service." *Journal of Community Engagement and Scholarship*, 12(1), 27-40.
- Yulianto, T. (2023). *Konsep Pendidikan Anti Kekerasan dalam Konteks Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Zainal Abidin. (2018). *Pendidikan Karakter: Untuk Menjadi Manusia yang Utuh*. Graha Ilmu.
- Zayed, H. A. B. (2022). *Social Structures and Family Life in Arab Societies*. Abu Dhabi: Cultural Heritage Press.
- Zhai, H., & Zhang, L. (2019). The Role of Soft Skills in Career Success. *International Journal of Educational Management*, 33(3), 575-589.
- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2020). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media.
- Zins, J. E., & Weissberg, R. P. (2020). *Building Academic Success on Social and Emotional Learning: What Does the Research Say?* New York: Teachers College Press.
- Zohar, D., & Marshall, I. (2004). *Spiritual Capital: Wealth We Can Live By*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
- Zubairi, M. (2022). *Pendidikan Anti Kekerasan: Konsep dan Implementasi di Sekolah*. Jakarta: Penerbit Gramedia.



## BIODATA PENULIS



**Rohmat Mulyana Sapdi**, Menyelesaikan sarjana (S1) dari UIN Bandung tahun 1990, S2 dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 1994, dan S3 dari UPI tahun 2001. Menjadi Fulbrighter untuk program Post Doktor *Senior Research Program* di Columbia University, AS (2006-2007).

Bekerja sebagai dosen IAIN Cirebon (1994-1999), dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1999-2007), mengajar di Sekolah Pascasarjana UPI Bandung (2001-2006), mengajar di Sekolah Pascasarjana UIN SGD Bandung tahun 2003-2007 dan 2020-sekarang, juga aktif mengajar di sejumlah PTKIS. Menjadi Ketua *Madrasah Development Centre* (MDC) Propinsi Jawa Barat (2002-2007).

Menjabat Kasubdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah (2007-2014), Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (2014-2018), Direktur Pendidikan Agama Islam di Sekolah (2018-2021), Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (2021-2024), Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama (2024-Sekarang), Ketua Dewan Pengawas UIN STS Jambi (2017-sekarang) dan anggota Dewan Pengawas UIN Syahida Jakarta (2022-Sekarang).

Menulis Buku; *Spektrum Pembangunan Madrasah* (2009), *Optimalisasi Pemberdayaan Madrasah* (2009), *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (2011), *Model Pembelajaran N-I-L-A-I melalui PAI* (2013), *Epistemologi Pendidikan Islam; Dari Paradigma Teosentris ke Teoantroposentris; dari Metode Parsialistik ke Integralistik-Interkonektif* (2023).



Menulis Artikel Jurnal: *Case-Based Value Learning; a Challenging Issue in Religious Education in Indonesia* (2006), *Incorporating Social Values toward Islamic Education in Multicultural Society* (2007), *Implementasi Pendidikan Nilai dalam Tripusat Pendidikan* (2022), *Counter Radicalism through Religious Education Curriculum; Solution to Religious Literacy Crisis in Indonesian Islamic Universities* (2022). *The Implementation of Religious Moderation in the Public University of Malang* (2022) Menulis artikel koran: *Keterpaduan Pendidikan Karakter* (2011), *Urgensi Nilai Pendidikan Agama* (2018), *Memupuk Generasi Milenial Moderat* (2018), dan sejumlah artikel lainnya.



**Rahmat Hidayat**, lahir di Medan, 26 Pebruari 1982. Dilahirkan oleh seorang ayah dan ibu yang berdarah pendidik. Ayah Drs. H. Sofyan (pensiunan Guru PNS MAN Tanjung Morawa) dan Ibu Hj. Suriati Lubis (yang memutuskan untuk berhenti menjadi guru setelah kelahiran anak yang pertama).

Mempunyai saudara kandung berjumlah 3 orang, yaitu: Kakak: Rahmi Aulia, SE dan adik Dr. Syariful Azmi, SH, MH serta Ahmad Fikri, SH. Menikah pada tahun 2010 dengan Rini Adhariani, S.PdI dan dikaruniai seorang putra bernama M. Shohibul Mumtaz Hidayat pada tanggal 25 Oktober tahun 2011. Namun pada tahun 2012 isteri tercinta dipanggil oleh Allah Swt. Pada tahun 2013 memutuskan untuk menikah kembali, dan Alhamdulillah diberikan Allah Swt. pendamping bernama Mahanum, ST,M.Pd. Berdomisili di Jl. Sesar Komplek Citra Mulia Residence Blok. D.14 Kelurahan Amplas, Medan.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Al-Washliyah 11 Kelurahan Amplas diselesaikan pada tahun 1994, SLTP Pondok Pesantren Al-Husna Medan diselesaikan pada tahun 1997, MAN 2 Model Medan diselesaikan pada tahun 2000. Kemudian menyelesaikan kuliah pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara program studi Pendidikan Agama Islam strata satu (S.1) pada tahun 2004, dan selanjutnya menyelesaikan strata dua (S.2) program studi Pendidikan Islam pada tahun 2009. Pada tahun 2016 menyelesaikan strata tiga (S.3) pada Program Doktor Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bertugas di Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan sejak tahun 2009 dan bertugas di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sejak tahun 2010. Dalam perannya sebagai dosen, penulis mengasuh beberapa mata kuliah diantaranya: Ilmu Pendidikan, Ilmu Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Pendidikan Karakter, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Profesi Keguruan Sejarah



Peradaban Islam, Sejarah Pendidikan Islam, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Prasekolah.

Penulis juga telah menyelesaikan beberapa karya ilmiah yang berjudul: *Starategi Pembelajaran Qiraat Quran* (dipublikasikan pada Media Pendidikan Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2012); *Pendidikan Karakter Berbasis Alquran* (dipublikasikan di Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Tahun 2012); *Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Global Village* (dipublikasikan pada Jurnal Alumni Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN SU "Tadbir" pada Tahun 2015); *Tantangan dan Peluang Perguruan Tinggi Islam di Era Global Village* (dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan "Integritas" pada Tahun 2016); *Pengembangan Orientasi dan Kurikulum dalam Menciptakan Lembaga Pendidikan Islam Unggul* (dipublikasikan pada Jurnal Hijri, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2016 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN SU, ISSN: 1979-8075); *Epistemologi Pendidikan Islam: Sistem, Kurikulum, Pembaharuan dan Upaya dalam Membangun Epistemologi Pendidikan Islam* (dipublikasikan pada Jurnal Al-Mufida, Vol. I No. 1 Juli-Desember 2016 FAI Universitas Dharmawangsa Medan ISSN: 2549-1954); *Pendidikan Islam Sebagai Ilmu: Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi* (dipublikasikan pada Jurnal Sabilarrasyad, Vol. I No. 1 Oktober-Desember 2016 Jurusan PAI Fak. Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan ISSN: 2548-2203); *The Relationship Between Teacher's Teaching style with student's Learning Motivation in Indonesia* (dipublikasikan pada Jurnal Intelektualita, Vol. II No. 02 Maret-April 2017 Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FKIMI) bekerjasama dengan LPPPI ISSN: 2527-3329); *Islamic Character Education Values In Mandailing And Angkola Communities In North Sumatera Province* (dipublikasikan pada Jurnal IJLRESInternational Journal on Language, Research and Education Studies, Vol. 3, No. 1, 2019. *Cara Cerdas Belajar PTK* (disampaikan pada pelatihan PTK guru-guru SLB Se-Sumatera Utara Tahun 2013); dan Diskusi Publik "Pancasila sebagai Ideologi dalam Pandangan Islam yang diselenggarakan DPD Gerhana Kota Medan pada Tahun 2017.

Buku yang pernah diterbitkan: *Ilmu Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016); *Filsafat Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016); *Manajemen Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2016), *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2017); *Konsep-Konsep Keguruan dalam Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2017); *Akhlaq Tasawuf* (Terbit pada Tahun 2018), *Etika Manajemen Perspektif Islam* (Terbit pada Tahun 2018), *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Terbit pada Tahun 2019), *Ilmu Pendidikan* (Terbit pada Tahun 2019), *Manajemen Sumberdaya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan* (Terbit pada Tahun 2019), dan *Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran Dan Implementasi Di Lembaga Pendidikan* (Terbit pada Tahun 2022).

Disisi lain penulis juga aktif menulis pada opini Harian Waspada Medan, adapun tulisan yang pernah dipublikasikan diantaranya: *Berguru*



*Mendidik Anak kepada Nabi Ibrahim; Berjihad Melawan Narkoba; Formulasi Pendidikan Akhlak; Haji Sebagai Madrasah Ilahiyah; Haji: Simbol Perjuangan Kemanusiaan; Islam dan Kebudayaan; Karakteristik Umat Muhammad saw.; Kebangkitan Peradaban Islam; Kepemimpinan TNI Masa Depan; Kewajiban Manusia; Makna Ukhuwah Islamiyah; Masjid dan Aktivitas Umat Islam; Masjid Sebagai Pusat Peradaban; Masyarakat Sholeh; Memaknai Ujian dalam Kehidupan; Nilai-Nilai Demokrasi dalam Alquran; Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam; Profil Umat Pilihan; dan lain-lain.*

Disela-sela tugas sebagai dosen penulis aktif sebagai *Master Trainer* pada SNIP *Madrasah Development Centre (MDC)* Sumatera Utara. Alhamdulillah penulis telah berkeliling pada daerah-daerah Propinsi Sumatera Utara, mulai dari Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk menyampaikan materi Kurikulum 2013 dan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM). Disisi lain, penulis juga diberi amanah oleh Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara untuk menjadi narasumber Kurikulum 2013 di sepanjang tahun 2015 sampai awal tahun 2016. Penulis juga aktif dalam mengisi seminar dan diskusi ilmiah.

Selanjutnya penulis juga aktif pada beberapa Organisasi Kemasyarakatan, diantaranya: Direktur Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), Pengurus Cabang Al-Jam'iyatul Washliyah; Sekertaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GEMA) 165; dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

